

361. 76 05988

GAR
?
1997



PENGARUH PENYALAHGUNAAN ALKOHOL
TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
DI KOTAMADIA JAYAPURA - IRIAN JAYA

TESIS

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh

TELLY J. GARPENASSY
NIM : B. 102 94 0076

Pembimbing

Prof. Dr. H. MULADI, S.H.

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G
1 9 9 7

PENGARUH PENYALAHGUNAAN ALKOHOL
TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
DI KOTAMADIA JAYAPURA – IRIAN JAYA

oleh

TELLY J. GARPENASSY

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal ..10 Januari 1998.....

Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,



Prof. Dr. H. MULADI, S.H.
NIP : 130 354 858

Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum,

Prof. H. PURWAHID PATRIK, S.H.
NIP : 130 307 058

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan berkat dan anugerah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Tesis ini diberi judul "Pengaruh Penyalahgunaan Alkohol Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Di Kotamadia Jayapura - Irian Jaya", dengan maksud untuk mengetahui perkembangan tindak pidana yang terjadi akibat pengaruh alkohol atau minuman keras, dan bagaimana upaya-upaya penanggulangannya.

Dalam penguraian tesis ini penulis menyadari adanya kekurangan dan kelemahan baik dari segi bahasanya maupun segi ilmiahnya. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis serta litteratur yang serba terbatas, sehingga mungkin bobot ilmiahnya masih jauh dari harapan. Namun demikian penulis menyadari bahwa "Tiada Gading Yang Tak Retak", sehingga segala kritik dari pihak manapun penulis terima dengan lapang dada demi penyempurnaan tesis ini.

Tesis ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu selayaknya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan

rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Diponegoro Semarang.
2. Sekretaris program studi magister ilmu hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. .Muladi, S.H., sebagai pembimbing sekaligus sebagai Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Paulus Hadisaputro, S.H., M.H., sebagai pembimbing metodologi.
5. Bapak Drs. Sonny Kareth sebagai tokoh masyarakat dan Kepala Suku Ayamuru Sorong yang banyak membantu penulis dalam pengumpulan Data.
6. Rekan-rekan angkatan ke 13 yang banyak memberi dorongan untuk penyelesaian tesis ini, dan pihak lainnya yang tidak sempat disebut satu persatu yang semuanya mempunyai andil dalam penyelesaian studi ini.

Semoga tulisan yang sederhana ini dapat berguna untuk memenuhi kewajiban penulis kepada fakultas dan bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukan.

Semarang, Oktober 1997.

Penulis,

TELLY J. GARPENASSY.
NIM : B. 102 940 076

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Hipotesis	9
F. Metode Penelitian	11
BAB II : GAMBARAN UMUM KOTA JAYAPURA	
A. Sejarahnya	16
B. Keadaan Geografis	27
C. Keadaan Topografis	29
D. Keadaan Penduduk	31
BAB III : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis Penyalahgunaan Alko- hol/Minuman Keras dan Tindak Pidana Kekerasan	35
1. Pandangan Para Sarjana Tentang Alko- hol dan Penyalahgunaannya	35

Halaman

2. Pengertian Minuman Keras	43
3. Bahaya Penyalahgunaan Minuman Keras	53
4. Pengertian Pemabukan Menurut KUHP..	59
5. Pengertian Tindak Pidana Dalam Kaitan Dengan Pemabukan.....	64
6. Tindak Pidana Kekerasan Akibat Pe- ngaruh Alkohol.....	70
B. Tata Cara Pengadaan atau Pemasukkan Minuman Keras ke Irian Jaya.....	92

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana Akibat Pengaruh Alkohol	99
1. Di Kecamatan Jayapura Utara	101
2. Di Kecamatan Jayapura Selatan	104
3. Di Kecamatan Abepura	107
4. Di Polres Jayapura	115
B. Data Minuman Keras Yang Beredar Di Kota madia Jayapura	119
C. Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Minuman Keras	123
1. Faktor Undang-Undang	123
2. Faktor Sosial Budaya (Kebiasaan)....	131
3. Faktor Kebijakan Pemda (Perda)	136
D. Kebijakan Penanggulangan	151

Halaman

BAB V : P E N U T U P

A. Kesimpulan	170
B. S a r a n	176
DAFTAR PUSTAKA	178
LAMPIRAN	182

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Penduduk Kotamadia Jayapura Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 1995	32
2.	Penduduk Kotamadia Jayapura Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 1995	34
3.	Tindak Pidana Kekerasan Akibat Pengaruh Alkohol/Miras di Wilayah Hukum Polsek Jayapura Utara Lima Tahun Terakhir 1992 - 1996	102
4.	Tindak Pidana Kekerasan Akibat Pengaruh Alkohol/Miras di Wilayah Hukum Polsek Jayapura Selatan Lima Tahun Terakhir 1992 - 1996	105
5.	Tindak Pidana Kekerasan Akibat Pengaruh Alkohol/Miras Di Wilayah Hukum Polsek Abepura Lima Tahun Terakhir 1992 - 1996	108
6.	Frekuensi Tindak Pidana Kekerasan Akibat Penyalahgunaan Minuman Keras di Kodia Jayapura Lima Tahun Terakhir 1992 - 1996	111
7.	Perkembangan Total Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Minuman Keras di Kodia Jayapura Lima Tahun Terakhir 1992 - 1996	114
8.	Perkembangan Jumlah Tindak Pidana Pemabukan Di Wilayah Hukum Polres Jayapura Lima Tahun Terakhir 1992 - 1996	116
9.	Jumlah Tindak Pidana Pemabukan Di Pengadilan Negeri Jayapura Tahun 1993 - 1996	128
10.	Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Keras Di Kotamadia Jayapura Tahun 1991/1992 - 1995/1996.	144

ABSTRAK

Tesis ini dibuat dengan latar belakang pemikiran bahwa minuman beralkohol (minuman keras) berpotensi timbulnya kriminalitas, dan merusak kesehatan. Oleh karena itu alkoholisme tidak boleh dibiarkan merajalela di tengah masyarakat karena mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sekaligus mengganggu stabilitas pembangunan daerah. Alkoholisme atau penyalahgunaan alkohol sekarang ini sangat kompleks sehingga penanganannya harus serius dan konsepsional.

Penggunaan minuman keras/alkohol secara berlebihan dan tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah, baik bagi diri sendiri, maupun orang lain atau lingkungan masyarakat sekitarnya. Penyalahgunaan alkohol merupakan penyebab atau paling sedikit sebagai faktor pencetus terjadinya tindak kriminal. Data dalam tesis ini menunjukkan adanya hubungan antara minuman keras dan tindak pidana. Dalam arti bahwa penyalahgunaan minuman keras dapat menimbulkan tindak pidana kekerasan, antara lain penganiayaan, pencurian, zina/cabul/susila, pengrusakan, perkosaan, dan pembunuhan.

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan tindak pidana kekerasan yang terjadi akibat pengaruh alkohol, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orang menyalahgunakan minuman keras, dan bagaimana penanggulangannya.

Penelitian tesis ini dilakukan di Kotamadia Jayapura, yaitu di Kecamatan Jayapura Utara, Kecamatan Jayapura Selatan, dan Kecamatan Abepura. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan pengamatan untuk mendapatkan data primer, sedangkan untuk mendapatkan data sekunder dilakukan studi kepustakaan. Bentuk penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan penyalahgunaan alkohol (pemabukan) dengan terjadinya tindak pidana.

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa minuman keras/alkohol merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan di Kotamadia Jayapura. Dalam arti apabila minuman keras disalahgunakan oleh para pemakainya. Data menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir (1992-1996) telah terjadi tindak pidana kekerasan akibat pengaruh alkohol/minuman keras sebanyak 416 kasus, dengan rincian; tindak pidana penganiayaan 39,42% (164 kasus), pencurian 38,70% (161 kasus), zina/cabul/susila

10,82% (45 kasus), pengrusakan 7,21% (30 kasus), perkosaan 3,61% (15 kasus), dan pembunuhan 0,24% (1 kasus).

Dari tiga lokasi penelitian yang berada di wilayah Kotamadia Jayapura, Kecamatan Jayapura Selatan rawan pemabukan, dalam arti di Kecamatan Jayapura Selatan lebih banyak terjadi tindak pidana kekerasan akibat pengaruh penyalahgunaan minuman keras/alkohol dibandingkan dengan kedua Kecamatan lainnya. Dengan perbandingan Kecamatan Jayapura Selatan 68,03% (283 kasus), Kecamatan Abepura 16,35% (68 kasus), dan Kecamatan Jayapura Utara 15,62% (65 kasus). Data ini dihitung dari lima tahun terakhir (1992-1996).

Tindak pidana kekerasan yang dimaksud dalam tesis ini ialah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dimana mereka berada dalam keadaan mabuk. Minuman keras golongan A yang beredar di Jayapura tahun 1996 sebanyak 103.362 karton atau 2.480.688 botol/kaleng. Jumlah ini sudah melebihi kuota untuk kota Jayapura yang hanya 100.000 karton bir jenis Anker, Bintang dan Guinness. Di sini belum termasuk minuman keras golongan B dan C. Ini sudah terlalu banyak untuk ukuran kota Jayapura dengan jumlah penduduk yang masih sedikit.

Beberapa upaya pengendalian peredaran minuman keras yang dilakukan aparat penegak hukum berupa operasi penertiban terhadap pemasok, penjual dan pemakai minuman keras. Demikian juga pemerintah daerah (Gubernur) telah mengeluarkan instruksi penertiban tempat-tempat penjualan dan peredaran minuman keras di Propinsi Irian Jaya. Semuanya ini dilakukan dalam rangka pengamanan Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998, jadi sifatnya sementara. Ini namanya tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Sebaiknya tindakan pengendalian minuman keras dimulai pada semua lini, mulai dari produsen (pabrik), pemasok, penjual dan pemakai, sehingga diharapkan dapat berhasil guna. Pokoknya penindakan harus dimulai dari sektor-hulu sampai sektor hilir.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, yang hakikatnya ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka sasaran utama pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tenteram, sejahtera, lahir dan batin.

Hal ini mengandung arti bahwa melalui pembangunan diharapkan semakin nyata dapat dirasakan peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Agar pembangunan tersebut berlangsung dan berhasil sesuai dengan rencana, mutlak diperlukan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Untuk itu perlu dipelihara dan ditingkatkan Kamtibmas sehingga mendorong makin berkembangnya kreativitas, meningkatkan kegairahan hidup dan memperluas peran serta rakyat dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

Melihat hakikat pembangunan nasional tersebut, maka tentunya untuk mencapai tujuan itu tidak terlepas dari berbagai hambatan. Salah satu faktor hambatan adalah penyalahgunaan alkohol atau minuman keras yang

pengaruhnya tidak jarang menimbulkan masalah di dalam masyarakat, antara lain terjadinya berbagai tindak pidana.

Soedjono Dirdjosisworo (1984) berdasarkan beberapa pendapat (hasil penelitian), mengemukakan bahwa alkoholisme kronis yang dialami atau diderita orang yang jiwanya sudah tak sehat, selama perkembangannya begitu merusak penderita-penderita yang malang, sehingga dapat menyebabkan penyimpangan perilaku termasuk tindak pidana atau kejahatan yang bermacam-macam. Alkohol membawa pengaruh pada penderitanya sedemikian rupa sehingga yang bersangkutan dapat melakukan deviasi perilaku yang bertentangan dengan norma hukum dan norma-norma sosial. Dalam penelitian statistik kriminal, sekitar tahun 1946-1947 terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh orang dalam keadaan mabuk, tetapi pada tahun-tahun tersebut jumlahnya tidak terlalu menonjol. Setelah tahun-tahun 1960-an terjadi perubahan yang cukup menonjol, yaitu bahwa alkoholisme membawa pengaruh sosial yang kontras, sehingga Harry Barner dan Negley K. Teeters dalam bukunya "New Horizons in Criminology", menyatakan bahwa alkoholisme dikategorikan sebagai penyakit masyarakat atau social pathology. Sebagai penyakit sosial jelas alkoholisme merupakan gejala sosial yang berpengaruh terhadap timbulnya berbagai bentuk perilaku yang membawa

dampak negatif bagi masyarakat. Perbuatan penyimpangan tersebut misalnya seperti penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, gangguan lalu lintas dan sebagainya, yang dilakukan para pemabuk. Katakanlah dewasa ini masalah alkoholisme yang berupa peminum minuman keras adalah penyebab timbulnya masalah sosial, baik di Eropa maupun Anglo - Amerika sudah merupakan masalah aktual yang memerlukan perhatian dan penanggulangan yang serius (Dirdjosisworo, 1984 : 2-3).

Di tingkat internasional pun fenomena alkoholis mendapat perhatian, antara lain dalam Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana - Cuba, di mana ditegaskan bahwa salah satu faktor kondusif penyebab kejahatan (khususnya dalam masalah Urban Crime) adalah : (h) penyalahgunaan alkohol ... (Nawawi Arief, 1996:13). Demikian juga dalam Kongres PBB ke-5 tahun 1975 di Jenewa di mana salah satu point pembicaraan dalam topik khusus "perubahan bentuk dan dimensi kejahatan" adalah: (c) kejahatan yang berhubungan dengan alkohol ... (Nawawi Arief, 1994:13).

Grat Van Den Heuvel dalam addenda : Bab V, VI dan VII bukunya W.M.E. Noach (terjemahan J.E. Sahetapy-1992) mengatakan bahwa yang sekarang ini menonjol, yaitu penelitian etiologi dengan sengaja telah menjadi sangat pragmatis dan diarahkan pada bidang-bidang tertentu, dan salah satunya adalah "penyalahgunaan alkohol dan

kepribadian" (Noach, 1992:138).

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa masalah penyalahgunaan alkohol bukan lagi merupakan masalah individu tetapi sudah merupakan masalah masyarakat, bangsa dan negara.

Banyak artikel menunjukkan bahwa alkohol berhubungan erat dengan kriminalitas pada satu pihak, dan pada lain pihak alkohol berhubungan secara timbal-balik dengan kondisi sosial-politik, sosial - ekonomi dan sosial-budaya. Untuk mengkajinya perlu digunakan pendekatan etiologi kriminal, yaitu bahwa penyalahgunaan alkohol (pemabukan) disebabkan oleh berbagai faktor yang terjalin atau berhubungan satu sama lainnya. Sehingga untuk memahami fenomena ini perlu dipelajari kondisi sosial, budaya, ketentuan perundang-undangan, kebijakan pemda (perda), dan tingkah laku manusia pemabuk itu sendiri. Mengapa masyarakat senang minum minuman keras, mengganggu ketertiban umum, dan tidak tertutup kemungkinan melakukan berbagai tindak pidana. Hal inilah perlu dikaji secara keseluruhan, mengapa demikian!

Masalah minum alkohol di Irian Jaya, dan khususnya di Jayapura bukan merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras sudah memasyarakat dan merupakan suatu hal yang sulit diatasi, sampai-sampai aparat penegak hukum menjadi

jenuh atau bosan melihat keadaan ini.

Namun demikian, kita tidak boleh membiarkan masalah ini merajalela di tengah masyarakat yang sedang membangun. Karena hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana hal ini bisa terwujud, sedangkan di pihak lain manusia Indonesia yang hendak dibangun itu dihancurkan dengan alkohol.

Walaupun kita tahu salah satu income/pendapatan daerah yang cukup besar untuk Irian Jaya, dan khususnya di Jayapura adalah berasal dari pajak minuman keras. Namun di sisi lain pengaruh daripada minuman keras menimbulkan banyak masalah dalam hidup bermasyarakat. Berbagai contoh kasus dampak minuman keras cukup banyak, yaitu terjadinya berbagai jenis tindak pidana kekerasan antara lain misalnya penganiayaan, pencurian, zina/cabul/susila, pengrusakan, perkosaan, pembunuhan, membuat keributan di malam hari, menghentikan taksi minta uang untuk beli minuman keras, meminta uang terhadap orang yang lewat di hadapan mereka, minum di tempat umum dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengamatan, di Irian Jaya dan khususnya di Jayapura minuman keras beredar di mana-mana, ini disebabkan pemasukan minuman keras yang terlalu berlebihan, bahkan ada yang tanpa melalui prosedur hukum. Hal inilah yang memberi peluang kepada

masyarakat untuk mengkonsumsi minuman keras secara bebas.

Kondisi tersebut terjadi disebabkan kurangnya penertiban dan pengawasan yang baik dari pihak yang berwenang terhadap arus pemasukan, pemasaran minuman keras maupun terhadap masyarakat pemakainya.

Masalah penyalahgunaan minuman keras/alkohol atau disebut juga masalah pemabukan kurang mendapat pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahkan pasal-pasal yang mengatur tentang masalah tersebut sedikit sekali dan sanksinya pun terlalu ringan. Padahal kalau kita mengamati atau melihat kejadian-kejadian yang terjadi akibat pemabukan membawa kerugian yang tidak sedikit, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat luas. Atau singkatnya, segi negatifnya lebih banyak daripada segi positifnya.

B. Permasalahan

Penyalahgunaan alkohol atau minuman keras atau dapat juga disebut pemabukan adalah suatu hal yang mengganggu keamanan dan ketenangan orang dalam masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat mengharapkan agar pemerintah segera menanggulangnya, karena apabila hal ini dibiarkan dan tidak ditanggulangi, maka pengaruh

minuman keras atau alkohol ini akan merajalela di tengah-tengah masyarakat dan akan membawa efek-efek negatif, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar di kalangan masyarakat maupun pemerintah, dan sekaligus akan mengganggu stabilitas pembangunan daerah.

Pengamatan sementara menunjukkan bahwa banyak terjadinya tindak pidana kekerasan di Irian Jaya (khususnya Jayapura) sebagian besar disebabkan oleh pengaruh alkohol atau penyalahgunaan minuman keras. Penyalahgunaan minuman keras atau pemabukan itu sendiri merupakan perbuatan-perbuatan yang sering terjadi, ini dikarenakan lemahnya sanksi pidana yang dikenakan kepada para pelakunya pada satu pihak, dan kurangnya pengawasan, baik dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan aparat penegak hukum terhadap pemasukan, pemasaran minuman keras dan terhadap masyarakat pemakainya pada lain pihak.

Dengan adanya kelemahan-kelemahan ini maka masyarakat dengan mudah melakukan penyalahgunaan minuman keras yang banyak menimbulkan tindak pidana kekerasan, seperti penganiayaan, pencurian, pengrusakan, perkosaan, pembunuhan, perkelahian dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara singkat dapat dirumuskan permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh alkohol dengan terjadinya tindak pidana kekerasan di Kotamadia Jayapura.
2. Sejauhmana peranan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pemabukan yang mengakibatkan tindak pidana di Kotamadia Jayapura.

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa banyak tindak pidana kekerasan yang terjadi akibat pengaruh alkohol di Kotamadia Jayapura.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab mengapa orang di Jayapura senang minum minuman keras dan menimbulkan tindak pidana maupun mengganggu ketertiban umum.
3. Untuk mengetahui bagaimana aparat penegak hukum menangani tindak pidana kekerasan akibat pengaruh alkohol di Kotamadia Jayapura.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menyusun konsepsi penanggulangan tindak pidana akibat pengaruh alkohol.
2. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan

sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khusus ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah pemabukan.

E. Hipotesis

Suatu hipotesis akan diterima kalau bahan-bahan penelitian membenarkan pernyataan itu. Dan akan ditolak bilamana kenyataan menyangkalnya.

Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, yang harus diuji kebenarannya dengan jalan riset. Jadi hipotesis adalah dugaan sementara, yang mungkin benar atau mungkin juga bisa salah. Ia akan ditolak jika faktanya menyangkal, dan akan diterima jika fakta membuktikan kebenarannya. Penerimaan atau penolakan itu tergantung pada hasil pengolahan data (Kartono, 1990 : 78).

Ronny Hanitijo Soemitro mengatakan bahwa mengenai cara menyusun hipotesis tidak ada ketentuan yang berlaku umum, tetapi sebagai pegangan dapat dikemukakan hipotesis hendaknya menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Hanitijo Soemitro, 1990 : 43).

Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Hipotesis 1 : Ada hubungan erat antara penyalahgunaan alkohol dengan terjadinya tindak pidana kekerasan.

Variabelnya adalah sebagai berikut :

- Variabel bebas : penyalahgunaan alkohol
- Variabel tergantung : terjadinya tindak pidana kekerasan.

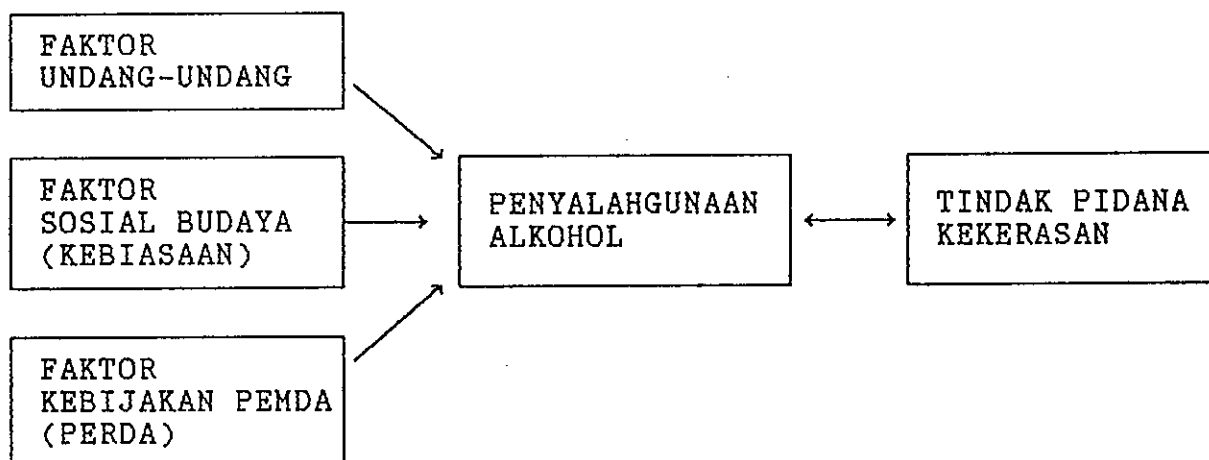
Hipotesis 2 : Ada hubungan erat antara faktor Undang-undang, Sosial Budaya (kebiasaan), dan kebijakan Pemda (Perda) dengan penyalahgunaan alkohol.

Variabelnya adalah sebagai berikut :

- Variabel bebas : adalah UU, sosial budaya (kebiasaan) dan kebijakan Pemda (Perda)
- Variabel tergantung : adalah penyalahgunaan alkohol.

Untuk gambaran yang lebih lengkap mengenai pola hubungan antara variabel tersebut, dapat dijelaskan secara diagramatis sebagai berikut :

SKEMA HUBUNGAN
ANTAR VARIABEL PENELITIAN



Dengan uraian penjabaran di atas, diharapkan proses penelitian dapat berjalan lancar dan konsisten sehingga mampu mengungkapkan tujuan penelitian yang diharapkan.

F. Metode Penelitian

Di dalam melakukan penelitian dipergunakan metode-metode tertentu untuk menjawab tujuan penelitian. Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

Oleh karena masalah pokok dalam penelitian ini adalah masalah pengaruh alkohol dan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam masyarakat, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, artinya penelitian ini lebih menekankan kepada

analisis data primer. Namun demikian, untuk menunjang dan memperdalam pembahasan/analisis permasalahan diperlukan juga pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis ketentuan perundang-undangan dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan hubungan pemabukan atau penyalahgunaan alkohol dengan terjadinya tindak pidana.

3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder.

Adapun metode yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut, yaitu dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder yang bersumber dari berbagai bahan pustaka yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Bahan pustaka tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, putusan-

putusan pengadilan, perda, buku-buku, majalah ilmiah, hasil seminar dan lain-lain.

b. Studi Lapangan

Metode ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti di lapangan untuk mendapatkan data primer, dan secara teknis dipakai cara-cara sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan para responden. Di mana sebelumnya telah disiapkan daftar pertanyaan.
2. Pengamatan, yaitu mengadakan pengamatan terhadap mabuk-mabukan dan tempat-tempat (kios) yang menjual minuman keras secara bebas.
Instrumen ini digunakan untuk memberikan gambaran yang obyektif dan melengkapi data yang tidak mampu dijaring melalui wawancara.

4. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Kecamatan Jayapura Utara, Kecamatan Jayapura Selatan, Kecamatan Abepura - Kotamadia Jayapura. Sedangkan instansi pemerintah yang dijadikan tempat penelitian atau sebagai pemberi data/informasi adalah Polsek Jayapura Utara, Polsek

Jayapura Selatan, Polsek Abepura, Polres Jayapura, Pengadilan Negeri Jayapura, Pendapatan Daerah Kodia Jayapura, Perekda Tk. I Irian Jaya, Polda Irian Jaya dan Biro Hukum Setwilda Tingkat I Irian Jaya.

b. Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini tidak bermaksud meneliti keseluruhan populasi yang ada, dan untuk itu ditentukan sampel penelitian yang dapat mewakili populasi.

- Populasi penelitian ini adalah seluruh individu yang suka minum minuman keras dan membuat onar atau keributan, mengganggu ketertiban umum dan bahkan sering melakukan tindak pidana di Kotamadia Jayapura.
- Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah individu (50 orang) yang sering mabuk-mabukan, membuat keributan, mengganggu ketertiban umum, dan melakukan tindak pidana kekerasan.

Sampel tersebut ditentukan dengan prosedur purposive sampling karena memiliki ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasi (Hanitijo Soemitro, 1990 : 51).

Berdasarkan sampel tersebut dapat ditentukan responden dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kecamatan Jayapura Utara	16	orang
2. Kecamatan Jayapura Selatan	16	orang
3. Kecamatan Abepura	18	orang
Jumlah	50	orang

Selain itu, juga yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah para pimpinan/kepala atau pejabat yang ditunjuk dari masing-masing instansi sebagaimana yang disebutkan di atas.

5. Analisis Data

Keseluruhan data yang telah dikumpulkan, selanjutnya diproses melalui tahap identifikasi dan klasifikasi untuk kemudian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif, sehingga diharapkan hasil penelitian dapat mengungkapkan masalah yang dikaji secara lengkap.

Analisis kualitatif, yaitu mengkaji secara kritis ketentuan hukum yang mengatur masalah pemabukan, dan kebijakan Pemda (Perda) tentang pemasukan minuman keras, serta mengungkapkan kebiasaan (budaya) masyarakat dalam mengkonsumsi minuman keras.

Analisis kuantitatif, yaitu data yang diperoleh disusun dalam bentuk tabel, kemudian ditentukan frekuensi dan prosentasenya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA JAYAPURA

Pada bagian ini akan diuraikan secara singkat sejarah kota Jayapura dari dulu hingga sekarang, dan berbagai peristiwa serta perkembangan yang terjadi di kota Jayapura. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengantarkan kita mengenal/memahami kota Jayapura sebelum memasuki pembahasan materi tesis ini.

A. Sejarahnya

Kota Jayapura untuk pertama kali bernama Hollandia, yang pada waktu itu hanya berbentuk sebuah kam atau pos pasukan Belanda. Seorang perwira Belanda yang bernama Kapten Infanteri F.J.P. Sachse sebagai Komandan Pasukan Belanda memimpin sebuah penyelidikan perbatasan berdasarkan besluit nomor 4 tertanggal Agustus 1909 memasuki wilayah bagian ini dengan kapal "Edi". Dengan kepiawaian strateginya dan dibantu Prof.Dr. Wichmann dia merasa perlu mendapatkan lahan untuk membangun pos pertahanan yang baik di darat. Karena sebelumnya pos Belanda berada di pulau Debi (1900), satu pulau kecil di laut sebelah barat Enggros di teluk Yotefa. Di pulau ini pos Belanda pertama dibangun di ujung timur yang waktu itu dinamakan Gebieden der Nederlands Oost Indie.

Dengan pendekatan yang baik kepada Ondoafi (Kepala suku) Tobati Laut, Ireeuw peluang itu diperoleh, sehingga ia bersama pasukannya menyusuri pantai keluar dari teluk Yotefa terus ke teluk Numbai (sekarang teluk Yos Sudarso). Di muara sungai Anafre dan anakannya itu ada lahan yang ideal, berlatar belakang rawa dengan dusun sagu dalam dua lembah yang indah sebelum mencapai jalan aliran sungai pada tebing gunung Dofonsoro. Di atas tanah milik suku Ireeuw yang adalah juga tanah perburuhan umum masyarakat, di kedua teluk inilah dinilai baik untuk membangun pos. Pada waktu itu juga dibayarkan 40 ringgit kepada Ondoafi Tobati Laut berikut beberapa barang lain untuk kelapa yang tumbuh di situ. Tanah pencaharian masyarakat tersebut sejak itu dialihkan hak olahannya dari penduduk di kedua teluk itu menjadi lahan penempatan pos Belanda.

Setelah segala sesuatunya dipersiapkan 10 orang pasukan Belanda bersama beberapa kuli orang Dayak dan dua pedagang kelontong berbangsa Tionghoa menyiapkan lahan di muara sungai Anafre dan anakannya itu. Kegiatan ini berlangsung sampai sehabis dan baru selesai pada pukul 09.00 pagi keesokan harinya. Sebuah tenda telah selesai terpasang. Kemudian pada pukul 10.00 tanggal 7 Maret 1910 di pagi yang sedikit gerimis, Kapten Sachse bersama seluruh pasukannya

berdiri menghadang surya. Sepuluh pucuk senjata diarahkan ke langit, pelatuknya ditarik. Bunyi dentuman bergelegar, satwa dan penghuni manusia menyaksikannya "Keharibaan Baginda Ratu aku menamakan Kam ini Hollandia". (Narasi dikutip dari Description d'un voyage outour du monde, Een gouden jubileum Hollandia 50 jaar 1960, oleh Don A.L. Flassy, Cenderawasih Pos, 11 Maret 1997)

Sumber lain menyebutkan karena pada waktu itu belum ada penentuan perbatasan antara Nederlands Nieuw Guinea dan Nieuw Guinea Jerman, sehingga belum jelas daerah mana yang menjadi perbatasan antara Residen - Assisten Residen dan Kontelir di Nieuw Guinea. Nieuw Guinea Utara masuk residensi Ternate, dan sebagai wakilnya untuk Nieuw Guinea adalah asisten residen Manokwari. Berdasarkan beslit Gubernemen No. 4 tanggal 28 Agustus 1909 kepada Ass. Residen ini diperbantukan satu detasemen tentara. Dalam Surat Keputusan ini antara lain tertera :

Zijnde dit detachement bestemd in de eerste plaats tot het verrichten van voorarbeid ten behoeve van de in het volgend jaar optredende Nederlandsch-Duitsche grens regelingscomissie en verder om naar de inzichten van bedoelde Assisten Resident, dit terzake naar de aanwijzingen van den Resident van Ternate on Onderhorigheden zal hebben te handelen, werkzaam te zijn tot stelselmatige exploratie van het tot genoemde afdeling behorend gebied en voor zeveel nodig tot handhaving van het gezag aldaar. (A.W. Siagian M.O., 1978 : 140)

(Detasemen ini diperbantukan terutama untuk mengadakan persiapan bagi Komisi Pengaturan Perbatasan antara Belanda - Jerman yang akan melakukan tugasnya pada tahun berikutnya dan selanjutnya mengambil tindakan seperlunya sesuai

dengan pandangan Ass. Residen berdasarkan petunjuk Residen Ternate dan daerah takluknya, untuk eksplorasi secara teratur dalam daerah tersebut dan sejauh mungkin untuk memegang kekuasaan).

Sebagai lanjutan dari pelaksanaan surat keputusan tersebut pada tanggal 28 September 1909 kapal "Edi" mendaratkan satu detasemen tentara di bawah komando Kapten Infanteri F.J.P. Sachse. Sebagai tempat pendaratan dipilih daerah dekat sungai Numbai yang airnya jernih. Kepada Kapten Sachse diperbantukan 2 perwira, diantaranya Dr. Gyellerup dan perwira laut kelas satu J.H. Luymes yang mengepalai tim komisi perbatasan. Segera dimulai menebang pohon-pohon kelapa sebanyak 40 batang, tetapi segera pula dibayarkan kepada pemiliknya seharga 40 ringgit. Berdirilah kam pertama yang terdiri dari tenda-tenda, tetapi segera diusahakan untuk mendirikan perumahan dari bahan sekitar yang ada. Dan kam pertama inilah oleh Kapten Sachse memberi nama "Hollandia". Lahirlah Hollandia (Jayapura sekarang) pada tanggal 7 Maret 1910 dalam cuaca sedikit buruk, tetapi Kapten Sachse tetap berpidato, mula-mula dalam bahasa Belanda, selanjutnya dalam bahasa Melayu dengan penuh semangat. Setelah itu bendera dinaikkan, semoga dengan perlindungan Tuhan tidak akan diturunkan sepanjang masa. (A.W. Siagian M.O., 1978 : 142)

Sejak itu berdirilah Kam Hollandia yang memang sengaja dibangun untuk menyikapi Germaniahoeek (di Vanimo)

di tepian timur perbatasan negara yang kita warisi hingga sekarang. Pos baru Belanda "Hollandia" yang terletak pada curuk lembah (kloof) itu kemudian berkembang menjadi hunian yang menawan.

Pos berjalan lambat tapi pasti karena kemudian diikuti juga dengan kegiatan pembangunan lain. Terutama pembangunan dalam bidang gereja, para misionaris (penginjil) bekerja keras membangun masyarakat di bidang kerohanian, gereja membuka sekolah-sekolah untuk masyarakat setempat. Roda pemerintahan juga berlangsung dalam masyarakat untuk mendekatkan pada peradaban dunia luar yang semakin terbuka berkat kerja keras gereja.

Periode perang dunia II memberi kedudukan Hollandia semakin berarti. Germanishoek lumpuh dengan hengkangnya Jerman yang telah kalah perang dunia I. Kedudukan Hollandia semakin penting. Jenderal Douglas Mac Arthur (April 1944) dengan pasukan sekutunya mendarat di Hollandia untuk menggempur tentara Dai Nipon semakin membuka peluang pembangunan kota ini. Pemerintah Hindia Belanda menjadikan Hollandia ibukota Nieuw Guinea. Hamadi pantai adalah menjadi tempat landing port amphi yang membawa amunisi dan perlengkapan perang. Jenderal Mac Arthur bersama pasukannya, tank dan kendaraan perang berarak menuju ke Ifar Gunung di Sentani. Di atas gunung inilah beliau bermarkas dan mengatur strategi perang di Pasifik. Di

tempat ini sekarang telah dibangun/dipugar tugu Jenderal Douglas Mac Arthur sebagai monumen sejarah.

Kemudian kota Hollandia di dalam perkembangannya di sekitar tahun 1958 hingga tahun 1960-an dalam pemerintahannya menghendaki tumbuhnya sistem kepartaian dengan adanya wakil rakyat, maka dibentuklah "Nieuw Guinea Raad (1961), yaitu DPR-nya untuk masyarakat Irian. Dengan adanya Nieuw Guinea Raad ini sehingga muncul berbagai partai atau organisasi, yang pada akhirnya dapat berubah haluan dan bergerak di bawah tanah menentang pemerintah Belanda. Misalnya ; KIM (Komisi Indonesia Merdeka) di bawah pimpinan dr. Gerungan yang berpraktek di Hollandia Binnen (sekarang Abepura) memprakarsai peristiwa pemberontakan Hollandia Binnen ; partai Irian (Ikut RI anti Nederlands) menyebar kurirnya ke berbagai tempat. Di Serui kelompok Silas Papare bersama dr. Sam Ratulangi telah gencar pula dengan aksi mempertahankan kedaulatan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang menarik dalam dekade perjuangan ini mereka (para pejuang) tidak lagi memahami/menyebut nama kota Hollandia, tetapi menggunakan nama Kotabaru sebagai pengganti kata Hollandia. Di Kotabaru, gelombang aksi perjuangan dan gerakan di bawah tanah digalakkan, Tepy dan pengikutnya bermarkas di Doyo Baru dan bersama Marten Indei mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Galim Reasa

dengan partainya Gerakan Rakyat Irian Barat (GRIB) berkobar di Fakfak. Gelombang pergerakan pelawanan ini bergulir kemana-mana, hampir di seluruh Irian. Perjuangan terus berlanjut, berbagai pemuda Irian menyeberang lewat Sorong bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk kembali merebut Irian Barat (sekarang Irian Jaya) melalui perjuangan Trikora.

Dengan adanya Komando Trikora (1961) dan atas desakan dunia internasional Belanda harus hengkang dari bumi Irian Barat. Karena pada waktu itu begitu gencarnya diplomasi dan perdebatan yang dilakukan pemerintah Indonesia di forum internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diperjuangkan dengan gigih oleh Sudjarwo Tjondronegoro, S.H., baik secara formal maupun tidak formal sampai akhirnya tercapai persetujuan Indonesia-Belanda yang disebut "New York Agreement" ditanda tangani di New York pada tanggal 15 Agustus 1962 - suatu persetujuan yang akan mengakhiri secara final pemerintahan kolonial Belanda di Irian Barat (Tjondronegoro, 1977 : 26). Dan beliau ini pula-lah yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk mengepalai perwakilan Republik Indonesia di Irian Barat yang berkedudukan di Kotabaru (Jayapura) selama masa pemerintahan sementara United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) - 1 Oktober 1962 sampai dengan 30 April 1963.

UNTEA adalah sebuah Badan Penguasa Pelaksana Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk oleh dan berada di bawah kekuasaan Sekretaris Jenderal PBB dengan tugas pokok :

- a. Menerima penyerahan pemerintahan atas wilayah Irian Barat dari pihak Belanda.
- b. Menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian Barat selama suatu masa tertentu.
- c. Menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada pihak Republik Indonesia.

(The Liang Gie - F. Soegeng Istanto, 1968 : 57).

Jadi United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) ini adalah merupakan badan internasional yang menjalankan pemerintahan di Irian Barat berdasarkan persetujuan bersama antara Indonesia dan Belanda (persetujuan New York - 1962).

Pada tanggal 1 Oktober 1962 berlangsunglah pemerintahan UNTEA di Irian Barat di bawah pimpinan mula-mula Jose Rolz Bennet yang tak lama kemudian diganti oleh Dr. Djallal Abdoh sebagai United Nations Administrator. Mulai hari itu pula bendera PBB dikibarkan di Irian Barat berdampingan dengan bendera Kerajaan Belanda. Pada 31 Desember 1962 bendera Belanda diturunkan dan sebagai ganti dinaikkanlah bendera Indonesia (Merah Putih) untuk berkibar berdampingan dengan bendera PBB.

Untuk memelihara/menjaga keamanan dan ketertiban umum dimasa pemerintahan UNTEA ini dikirim pasukan keamanan PBB (United Nations Security Forces) yang terdiri dari kelompok pasukan Pakistan, angkatan udara Amerika Serikat dan Kanada, serta kontingan Indonesia semuanya berada di bawah kekuasaan Sekretaris Jenderal PBB.

Pada tanggal 1 Mei 1963 pagi hari di Kotabaru (Jayapura sekarang), berlangsung penyerahan kekuasaan pemerintahan sepenuhnya atas Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan ini dilakukan oleh Adminsitrator UNTEA Dr. Djalal Abdoh kepada Sudjarwo Tjondronegoro, SH., sebagai wakil pemerintah Republik Indonesia. Peristiwa bersejarah ini dihadiri CV. Narasimhan yang diutus sebagai wakil dari Sekretaris Jenderal PBB. Dan pada hari itu juga berakhirlah pemerintahan sementara UNTEA di Irian Barat sekaligus bendera PBB diturunkan dan dinaikkan sang saka Merah putih diiringi lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya di Taman Imbi Kotabaru (The Liang Gie - F. Soegeng Istanto, 1968 : 65-66). Singkatnya, tepat pada tanggal 1 Mei 1963 Irian Barat (Irian Jaya) kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Sejarah mencatat bahwa Nederlands Nieuw Guinea harus mengganti nama menjadi Irian Barat. Bersamaan dengan itu nama Kotabaru sebagai pengganti nama

Hollandia yang dikenal pada masa pergerakan berubah nama menjadi Sukarnapura. Anggota Nieuw Guinea Raad yang dibetuk tahun 1961 menghimpun diri beserta dengan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRDGR). Melalui DPRGR ini kemudian ditetapkan sistem plebisit yang harus dijalankan sesuai amanat PBB yang tersurat dalam salah satu point dari New York Agreement 1962. Alhasil terbentuklah apa yang dikenal dengan sebutan anggota Dewan Musyawarah Perwalian (DMP) yang bertugas menyatakan kehendak rakyat dalam Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969. Pepera ini dilaksanakan di seluruh kabupaten di wilayah Propinsi Irian Barat (Irian Jaya) oleh wakil-wakil rakyat dari masing-masing kabupaten di bawah pengawasan langsung PBB. Tim utusan khusus PBB di bawah pimpinan Mr. Ortizan datang ke Irian Jaya (Irian Barat) dan menyaksikan langsung pelaksanaan Pepera di setiap kabupaten lalu hasilnya di bawa pulang untuk dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal PBB. Hasilnya, Irian Jaya tetap masuk negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak bisa dipisahkan dari wilayah Indonesia lain. Dengan demikian secara de yure diakui dunia internasional bahwa Irian Jaya resmi wilayah negara Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia mulai membangun Irian Jaya di berbagai bidang, serta memberi peluang kepada

investor untuk menanamkan modal di Irian Jaya. Apalagi pada waktu itu (1969) Pelita I dicanangkan, sehingga negara memerlukan dana pembangunan dan penanam modal besar-besaran. Yang terbesar sejak kemerdekaan belum pernah terjadi, tambang tembaga bercampur emas berkadar tinggi dimulai dipegunungan Erst disiasati oleh Cartenz pada abad 17 (1635) dan yang kemudian dibuktikan Colijan Dosy atas bantuan penerbang Marine Wissel di tahun 1953 itu menjadi tumpuan harapan. Kota tembaga, Tembagapura, dan Timika menjadi kenyataan. Bapak Presiden Soeharto pada tahun 1972 dalam meresmikannya sekaligus mengganti nama Irian Barat menjadi Irian Jaya dan kota Sukarnapura menjadi Jayapura.

Memang Hollandia dimasa lalu (tahun 1950 hingga 1960) menjadi kota idaman setiap insan manusia di Pasifik Selatan, dikatakan "Hollandia Syndrome" (Cendrawasih Pos, 11 Maret 1997). Sekarang Jayapura menjadi tumpuan harapan nusantara menuju era perdagangan bebas abad Pasifik, sekaligus Irian Jaya menjadi pulau masa depan.

Demikianlah sekilas perkembangan nama kota Jayapura yang dimulai dari nama kota Hollandia - Kotabaru - Sukarnapura, dan Jayapura sampai sekarang. Sedangkan untuk nama Irian Jaya, yang dulunya bernama Nederlands Nieuw Guinea diganti menjadi Irian Barat - kemudian berubah lagi menjadi Irian Jaya sampai se-

karang. Jayapura menjadi pusat pemerintahan sekaligus ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya. Kemudian dalam perkembangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1979 Kota Jayapura ditetapkan sebagai Kota Administratif dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai sarana dalam pembinaan wilayah dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perjalanan waktu volume pekerjaan yang semakin meningkat, beban tugas terus bertambah, jumlah penduduk semakin meningkat, semakin melebarnya pengembangan wilayah sehingga perlu peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu Kota Administratif Jayapura ditingkatkan menjadi Kotamadia Daerah Tingkat II. Maka dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 dibentuklah Kotamadia Daerah Tingkat II Jayapura. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Moh. Yogie S. Memet pada tanggal 21 September 1993 di Jayapura.

B. Keadaan Geografis

Kotamadia Daerah Tingkat II Jayapura terletak di bagian utara Propinsi Irian Jaya, merupakan ibukota dan pusat pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Irian

Jaya. Letaknya berada pada wilayah Indonesia paling timur dan dekat perbatasan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Papua New Guinea (PNG), dan mempunyai posisi yang strategis di pandang dari berbagai aspek utamanya di bidang Pertahanan Keamanan Negara.

Dalam setengah dasawarsa terakhir, terlihat adanya tingkat pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan, khususnya di bidang prasarana infrastruktur fisik, yang saat ini bahkan melebihi kapasitas daya dukung fisik kawasan, sehingga hal tersebut menjadikan pengembangan fisik kota serta gerakan mobilitas penduduk cenderung mengarah keluar kota dari utara ke selatan yang mencakup kecamatan Abepura, kecamatan Muara Tami, kecamatan Arso, dan kecamatan Sentani, kendatipun sentral kegiatan sebagian besar masih dilakukan di pusat kota.

Dilihat secara geografis Kodia Jayapura terletak pada posisi $1^{\circ}28' 17,26''$ - $3^{\circ}58' 0,28''$ Lintang Selatan dan $137^{\circ}34' 10,6''$ - $141^{\circ}0' 8,22''$ Bujur Timur. Luas wilayah adalah 940 Km^2 atau 94.000 Ha, terdiri 4 (empat) wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Jayapura Utara, kecamatan Jayapura Selatan, kecamatan Abepura, dan kecamatan Muaratami, yang selanjutnya terbagi dalam 11 Desa dan 16 Kelurahan.

Posisi geografis Kodia Jayapura mempunyai batas administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Lautan Pasifik;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Arso,
Kabupaten Jayapura;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Negara PNG;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Sentani
dan Depapre, Kabupaten Jayapura.

Apabila memperhatikan luas Kodia Jayapura 940 Km² atau 0,22 % dari luas Irian Jaya merupakan daerah terkecil tetapi apabila dibandingkan dengan kotamadia se Indonesia maka Kodia Jayapura merupakan Kodia dengan wilayah paling luas. Wilayah ini juga berada di wilayah yang strategis, karena dekat dengan perairan internasional, berpotensi sebagai daerah wisata, dan mempunyai kandungan pertambangan yang menjanjikan.

C. Keadaan Topografis

Kondisi topografis Kodia Jayapura pada umumnya terdiri atas medan bergelombang, yang terdiri dari kawasan hutan lindung, hutan wisata yang bercampur dengan permukiman dan perladangan penduduk, serta perbukitan kapur yang terjal dan curam. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan topografi Jayapura cukup bervariasi, mulai dari dataran landai, berbukit dan bergunung-gunung.

Jayapura berada pada ketinggian \pm 700 meter diatas permukaan laut dengan kondisi 30% daerah tidak layak huni, karena terdiri dari perbukitan yang terjal, rawa-rawa, hutan lindung dan hutan konservasi dengan kemiringan 40%. Kota Jayapura beriklim tropis basah dengan suhu minimum 29°C , dan maksimum $31,8^{\circ}\text{C}$. Curah hujan bervariasi antara 45 - 255 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata berkisar antara 148-175 hari hujan per tahun (R. Roemantyo, 1996 : 3-4).

Sedangkan untuk wilayah yang terletak di tepi pantai umumnya terdiri dari dataran tebing terjal, hutan rawa, hutan bakau dan dataran bergelombang lainnya, tanah yang datar atau landai jumlahnya sangat sedikit.

Secara prosentatif, kawasan hutan negara yang merupakan kawasan dominan dilihat dari luas areal diperuntukan sebagai hutan lindung dan hutan wisata, yaitu sebesar 57%, kawasan hutan masyarakat termasuk areal lahan perladangan sebesar 24%, serta sisanya sebesar 19% umumnya diperuntukan sebagai daerah permukiman dan industri.

Akan tetapi dalam realitasnya ketiga kawasan dengan fungsi yang sangat berbeda tersebut, dan seharusnya diterapkan secara konsisten untuk memelihara daya dukung alam, ternyata di dalam penerapannya sering tidak terkendalikan, dikarenakan batasan-batasan fisik antara ketiganya, masih tidak jelas serta perilaku

sosial-budaya penduduk dalam pola tatanan kehidupan yang pada umumnya masih sangat rendah kesadarannya terhadap arti pentingnya sumber daya alam bagi keselamatan hidup dan generasi penerusnya.

D. Keadaan Penduduk

Mengamati penduduk di Kotamadia Jayapura adalah heterogen, yaitu terdiri dari semua suku yang ada di Indonesia ini terwakili di Jayapura. Jadi Jayapura itu menampung berbagai suku yang ada di Indonesia dengan latar belakang yang berbeda-beda.

Penduduk yang berdomisili di wilayah Kotamadia Jayapura menurut data tahun 1995 sebanyak 186.716 jiwa dengan laju pertumbuhan 5,47% per tahun selama Pelita V (R. Roemantyo, 1996 : 5). Penduduk tersebut dengan kondisi kehidupan dilihat dari aspek ekonomi, sosial dan budaya bersifat sangat beragam (heterogen), serta umumnya berdomisili di beberapa pusat permukiman, baik yang bersifat resmi sesuai dengan rencana pengembangan tata ruang, maupun pusat-pusat permukiman yang bersifat liar.

Gambaran mengenai keadaan penduduk di Kotamadia Jayapura dilihat dari jenis kelamin per Kecamatan dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

TABEL 1
PENDUDUK KOTAMADIA JAYAPURA
MENURUT JENIS KELAMIN PER KECAMATAN
TAHUN 1995

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jayapura Utara	37.262	30.267	67.529
2.	Jayapura Selatan	35.908	29.689	65.597
3.	Abepura	29.262	23.714	53.590
	Jumlah	103.046	83.670	186.716

Sumber : Kantor Statistik Kodia Jayapura, 1997.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dilihat dari jenis kelamin penduduk laki-laki merupakan jumlah terbanyak, yaitu 55,19% dari total penduduk, sedangkan penduduk perempuan sebesar 44,81%. Sementara jika dilihat dari klasifikasi kepadatan per wilayah kecamatan (tiga kecamatan), maka kecamatan Jayapura Utara jauh lebih padat dibandingkan dengan kecamatan Jayapura Selatan dan kecamatan Abepura, yaitu 67.529 jiwa (36,17%) berbanding dengan 65.597 jiwa (35,13%) dan 53.590 jiwa (28,70%).

Lebih tingginya tingkat kepadatan penduduk di wilayah kecamatan Jayapura Utara dibandingkan dengan penduduk di wilayah kecamatan Jayapura Selatan dan kecamatan Abepura adalah karena pusat-pusat permukiman penduduk umumnya terkonsentrasi di beberapa kelurahan kota di Jayapura Utara yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan perdagangan tingkat propinsi Irian

Jaya, sehingga banyak menyerap para migran, baik dari kawasan pinggiran kota sekitarnya, maupun dari kabupaten, bahkan propinsi lainnya.

Penyebaran penduduk di Kotamadia Jayapura kurang merata, penduduk banyak terkonsentrasi di pusat kota, yaitu kecamatan Jayapura Utara dan Jayapura Selatan dengan jumlah penduduk 133.126 jiwa dengan luas wilayah hanya 112 Km². Sedangkan di kecamatan Abepura dengan luas wilayah 828 Km² terdiri dari daerah rata dan landai hanya berpenduduk 53.590 jiwa.

Tingkat pertambahan penduduk pun mengalami pelonjakan, hal ini disebabkan semakin lancarnya sarana transportasi kapal laut dan pesawat udara, serta arus urbanisasi penduduk dari desa ke kota. Hal ini memang sulit dibendung karena semuanya mau ke kota untuk mencari pekerjaan dengan berbekal pengetahuan dan ketrampilan yang sangat rendah sehingga sulit bersaing. Dengan demikian terjadilah banyak pengangguran yang pada akhirnya menimbulkan berbagai masalah sosial, salah satunya adalah mabuk-mabukan.

Pada kesempatan ini juga perlu dikemukakan tingkat pertumbuhan penduduk menurut strata (kelompok) umur dan jenis kelamin tahun 1995 agar memberi gambaran kepada kita strata umur mana yang paling tinggi. Hal ini dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini.

TABEL 2
 PENDUDUK KOTAMADIA JAYAPURA
 MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
 TAHUN 1995

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	13.253	10.759	24.012
5 - 9	13.364	10.853	24.217
10 - 14	11.685	9.488	21.173
15 - 19	10.987	8.916	19.903
20 - 24	12.498	10.150	22.648
25 - 29	12.213	9.913	22.126
30 - 34	8.843	7.179	16.022
35 - 39	6.609	5.361	11.970
40 - 44	4.617	3.748	8.365
45 - 49	3.420	2.778	6.198
50 - 54	2.318	1.886	4.204
55 - 59	1.304	1.066	2.370
60 - 64	906	735	1.641
65 - 69	513	420	933
70 - 74	269	217	486
75 +	247	201	448
Jumlah	103.046	83.670	186.716

Sumber : Kantor Statistik Kodia Jayapura, 1997.

Tabel tersebut di atas memperlihatkan 16 kelompok umur dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Jayapura Utara, Kecamatan Jayapura Selatan dan Kecamatan Abepura, yang pada akhirnya dapat ditentukan kelompok umur mana yang sangat dominan melakukan tindak pidana (pemabukan) setelah menganalisa data.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis Penyalahgunaan Alkohol/Minuman Keras dan Tindak Pidana Kekerasan.

Beberapa kerangka teori yang menggambarkan mengenai hal-hal mendasar dari pengaruh penyalahgunaan alkohol yang menimbulkan tindak pidana kekerasan dapat diketengahkan sebagai berikut :

1. Pandangan Para Sarjana tentang Alkohol dan Penyalahgunaannya

Sudah sejak lama orang mengenal alkohol, yaitu sejenis minuman yang bila diminum dapat memabukan. Jenis alkohol banyak ragamnya, masing-masing terkenal di daerah atau lokalitas sendiri-sendiri, masing-masing dengan kadar alkohol yang berbeda-beda, dari yang rendah sampai yang tinggi.

Pemakaian alkohol dalam jangka waktu yang cukup lama membuat ketergantungan terhadap alkohol, dan apabila orang mulai tergantung pada alkohol, maka terjadilah apa yang dinamakan alkoholisme.

Alkoholisme diartikan sebagai "suatu keadaan dimana seorang individu telah tidak mampu lagi mengontrol banyaknya alkohol yang diminumnya, dalam pengertian bahwa tidak mampu menjauhkan diri dari

minuman keras atau menghentikan minumannya sesaat sebelum keracunan alkohol" (Dirdjosisworo, 1984 : 24-25).

Dari definisi ini ditemukan istilah tidak bisa mengontrol diri, lasimnya meliputi dua gejala yang berbeda. Yang pertama adalah ketidakmampuan melakukan sesuatu tanpa alkohol, atau ketidakmampuan mengendalikan ketegangan pribadi tanpa minum, yang sering disebut tidak mampu untuk menjauhkan diri dari alkohol. Yang kedua adalah ketidakmampuan menghentikan minuman begitu ia memulainya.

Dengan demikian secara singkat dikatakan bahwa alkoholisme adalah kecanduan minuman keras sedemikian rupa sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu mengendalikan diri untuk menahan agar tidak minum. Hal yang demikian ini sangat membahayakan bagi diri sendiri, baik fisik maupun jiwanya, serta kehidupan sosial disekitarnya. Oleh karena itu yang penting disini dituntut adanya kontrol atau pengawasan dan pengendalian diri agar menjaga jarak atau bila perlu menjauhkan diri dari alkohol.

E.M. Jellinek salah seorang sarjana terkemuka dalam masalah alkohol memberikan definisi yang sangat luas. Beliau menyarankan bahwa untuk kepentingan operasional, alkoholisme didefinisikan sebagai "setiap penggunaan minuman yang mengandung

alkohol yang menyebabkan timbulnya kerugian, baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi masyarakat atau kedua-duanya" (Dirdjosisworo, 1984 : 26). Apabila orang mulai tergantung pada alkohol, maka terjadilah apa yang dinamakan alkoholisme. Alkoholisme sebenarnya adalah akibat dari masalah individual dan masalah sosial yang cukup kompleks. Pada kenyataannya, mereka yang minum minuman keras secara berlebihan akan menderita. Penderitaan tersebut antara lain mabuk sedemikian rupa sehingga dapat melakukan apa saja yang bersifat pengrusakan, diantaranya berupa tindak pidana (Dirdjosisworo, 1984 : 137).

W.A. Bonger berpendapat bahwa alkoholisme atau penyalahgunaan minuman keras merupakan faktor kriminogeen, yang dapat menimbulkan kejahatan dalam berbagai bentuk dan variasinya, sehingga beliau menyimpulkan bahwa di antara 7 (tujuh) faktor penyebab timbulnya kejahatan maka alkoholisme sebagai salah satu faktor penyebab kejahatan. Walaupun beliau mengakui bahwa pengaruh alkoholisme terhadap kejahatan biar pun sudah berkurang daripada dulu, sekarang masih juga tetap besar dan banyak segi-seginya, dan pembahasan mengenai persoalan ini pasti belum selesai (Bonger, 1982 : 109).

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa para petugas hukum harus lebih berhati-hati kalau menghadapi seorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk setelah minum terlalu banyak minuman keras. Menurut beliau adalah amat kecil kemungkinan seorang dalam keadaan mabuk (*dronkenschap*) melakukan tindak pidana lolos dari hukuman. Apabila seorang dalam keadaan mabuk mengendarai mobil sehingga menabrak orang sampai orang ini meninggal dunia atau luka berat, maka seorang itu sepantasnya harus dikenakan hukuman lebih berat dari seorang yang tidak mabuk (Prodjodikoro, 1979 : 82-83).

Mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin setelah minum alkohol dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, karena kecermatan penglihatan seseorang berkurang jika ia minum alkohol. Juga kemampuan membedakan warna terganggu, misalnya membedakan warna lampu lalu lintas merah atau hijau yang sedang menyala. Koordinasi motorik juga terganggu sehingga ketrampilan memegang kemudi, menginjak rem, kopling dan menggerakkan persneling terganggu. Dalam kondisi yang demikian mudah terjadi kecelakaan.

Sudarto, guru besar hukum pidana mengatakan bahwa mabuk di Indonesia tidak merupakan kejadian sehari-hari, karena hal ini berhubungan dengan hidup

keagamaan dan iklim di daerah ini yang tidak membutuhkan pemakaian alkohol secara mutlak. Tidak demikian halnya di negara-negara Eropa dan Amerika. Di Indonesia alkohol bukanlah minuman yang istimewa, hanya saja orang menggunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, yang pada akhirnya bisa disalahgunakan.

Pemabukan banyak terjadi dan oleh karena pemabukan ini dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban umum yang berupa kejahatan atau pelanggaran, maka hukum pidana bersangkutan paut pula dengan persoalan pemabukan (Sudarto, 1987 : 100).

Selanjutnya Sudarto mengemukakan pertanyaan; Bagaimanakah bila ada orang melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk, dapatkah ia dipertanggungjawabkan ?

Beliau menjawabnya dengan mengatakan bahwa "dalam hal seseorang sengaja memabukan diri sebelum melakukan sesuatu tindak pidana agar menjadi berani (courage drinken), pada hakikatnya hubungan antara kehendak dengan perbuatannya tidak putus. Orang tersebut masih dapat dikatakan menyadari nilai perbuatan beserta akibatnya, oleh karena itu ia dapat dipertanggungjawabkan" (Sudarto, 1987 : 99-100).

Lain halnya dengan orang yang tanpa kemauan sendiri menjadi mabuk, dalam hal ini dapat diterima adanya ketidak-mampuan bertanggungjawab, karena ia melakukan perbuatan yang tidak disadari, ia ada dalam keadaan yang bersifat penyakit (*pathologisch roes*). Tingkat kemabukan sukar ditentukan secara pasti, oleh karena itu tidak dapat dijadikan ukuran untuk menetapkan mampu dan tidak mempunya bertanggungjawab seseorang (Sudarto, 1975 : 100).

Minum alkohol di Jayapura tidak dikenal istilah sadar atau tidak sadar semuanya sama saja karena orang semakin bangga kalau mabuk. Oleh karena itu di Jayapura tidak dikenal mabuk itu suatu penyakit (*pathologisch roes*). Sehingga aparat penegak hukum membuat kesepakatan bahwa mabuk dan melakukan tindak pidana dalam bentuk apapun harus diproses secara hukum, karena yang dilihat bukan latar belakang mabuknya tetapi akibat yang ditimbulkannya.

W.M.E. Noach (terjemahan J.E. Sahetapy-1992) mengatakan bahwa penggunaan alkohol yang sering dalam kelompok mendorong perbuatan agresif. Para penjahat karena nafsu agresif, mereka mudah tersinggung sehingga berbuat agresif (*penganiayaan*) atau mengungkapkan secara lisan atau tulisan (*penghinaan, pencemaran nama, penodaan nama*). Lasimnya tipe

semacam ini memperlihatkan miskin-rasa dan oleh karena itu kurangnya rasa sosial yang dapat menahan dirinya (Noach, 1992 : 91).

Marcus A. Kupp dan Milton J. Chatton dua orang ahli kedokteran dari Amerika Serikat dalam penelitian mereka terhadap alkoholisme dikatakan bahwa alkoholisme disebabkan karena adanya masalah-masalah pribadi yang hendak dipecahkan. Masalah-masalah yang dihadapi manusia tidak lain daripada kegagalan-kegagalan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang selalu menuntut.

Masalah-masalah yang dimaksud berhubungan dengan aspek ekonomi, pergaulan dalam masyarakat dan keluarga, kesehatan dan cita-cita, semuanya ini menyebabkan tekanan bathin, pikiran yang kacau, rasa kekurangan bahkan banyak lagi masalah-masalah lain. Untuk mencari pemecahannya maka alkoholisme pun selalu mendapat perhatian orang banyak untuk memilihnya sebagai cara pemecahan.

I.J. Cairns mengemukakan bahwa alkohol adalah cairan yang bening tak berwarna, dengan rumus kimia C_2H_5OH - termasuk golongan carbo-hidrat. Alkohol merupakan gisi yang buruk, karena tidak mengandung vitamin, mineral, atau protein (I.J.Cairns, 1982 : 9).

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa kemabukan yang kronis berhubungan erat dengan kecanduan, dalam hal bahwa si pencandu terus menerus memakai alkohol demi untuk menghilangkan derita atau kesengsaraan emosional atau psikis, serta menghasilkan pelarian dari situasi pedih. Banyak orang memandang alkoholisme sebagai kejahatan yang amat besar, dan orang yang kecanduan alkohol adalah amat besar dosanya.

Seminar Narkoba (Narkotik, Obat-obat terlarang dan Alkohol) menyatakan alkohol adalah barang-barang yang dapat merusak tubuh, jiwa dan roh manusia, menyebabkan banyak penderitaan, cacat-cacat dan macam-macam kejahatan. Alkitab melarang manusia merusakkan dirinya dengan perkara-perkara ini (Seminar Narkoba, 1972 : 1).

Biasanya orang-orang seperti ini lebih mudah berbuat macam-macam dosa, seperti bohong, dusta, curi, merampok, memperkosa, berzina, berjudi, berkelahi, merusak, membunuh dan sebagainya. Orang seperti ini menjadi duri dan sampah masyarakat, sebab itu perlu usaha-usaha pencegahan dan melepaskan orang yang sudah terlanjur rusak. Mereka perlu kasih dan pertolongan yang tepat, layani dengan kuasa dan nikmat Allah sampai mereka bertobat.

2. Pengertian Minuman Keras

Minuman keras adalah sejenis minuman yang mengandung alkohol dan dapat memabukkan seperti beer, anggur, whiskey, brandy, jenever dan beberapa jenis lainnya.

Pengertian minuman keras itu sendiri dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Menurut ordonantie ketentuan-ketentuan yang mengatur penggunaan dan jaminan cukai-cukai atas minuman keras adalah bahan-bahan cair yang mengandung alkohol yang dihasilkan dengan penyulingan sopi manis, sopi pahit dan minuman-minuman lain hasil penyulingan yang diperuntukkan untuk segera dipakai, demikian pula air wangi, air cuci rambut, air kumur dan semua bahan cair yang diolah memakai alkohol, tetapi hanya sekedar bahan cair yang kadarnya lebih tinggi dari lima liter alkohol dalam satu botol hekto liter pada derajat panas lima belas derajat celcius (LN Tahun 1934 No. 665)
- b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan minuman keras adalah minuman yang memabukkan bila diminum, misalnya beer, anggur dan sebagainya (minuman yang mengandung alkohol dipakai sebagai minuman kesenangan) (penjelasan Pasal 300 KUHPidana). Sedangkan

menurut penjelasan Pasal 537 KUHP, minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat memabukkan. Misalnya tuak, saguweer dan sebagainya.

- c. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/MENKES/PER/IV/1977, tentang Minuman Keras. Yang dimaksud minuman keras menurut peraturan ini adalah semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat, yang meliputi; minuman keras golongan A, minuman keras golongan B, dan minuman keras golongan C (Rusdihardjo, 1994 : 28).

Hal-hal pokok yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Penggolongan minuman keras

Minuman keras dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

a. *Minuman keras golongan A*

Adalah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% sampai 5%, misalnya ; Bir Bintang, Champindo Anggur Buas, Green Sand, San Miguel, Angker Bir.

b. *Minuman keras golongan B*

Adalah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% sampai dengan 20%,

misalnya; Anggur Malaga, Anggur Kolesom, Whisky Drum, Anggur Orang Tua.

c. Minuman keras golongan C

Adalah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% sampai dengan 55%, misalnya ; Jenever, Johny Wolker, Mension house, Mc Donald (Brandy), Scotch Brandy.

2. Badan-badan usaha di bidang minuman keras adalah:

- a. Produsen minuman keras
- b. Importir minuman keras
- c. Pedagang besar minuman keras
- d. Penyalur minuman keras
- e. Pengecer minuman keras
- f. Penjual minuman keras.

3. Hal perizinan

Semua badan usaha yang disebut dalam butir 2 tersebut di atas disamping izin yang telah diperoleh dari instansi/departemen lain yang berwenang harus pula mendapat izin dari Departemen Kesehatan.

a. Sebagai contoh :

1. Untuk produsen minuman keras

Izin dari Departemen Kesehatan hanya diberikan apabila telah memiliki izin dari Menteri Perindustrian dan Per-

dagangan, dan Menteri Keuangan.

2. Untuk importir minuman keras

Izin dari Departemen Kesehatan hanya diberikan apabila telah memiliki izin impor dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan Menteri Keuangan.

3. Untuk pedagang besar minuman keras

Izin dari Departemen Kesehatan hanya diberikan apabila telah memiliki izin pedagang besar dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

4. Untuk penyalur minuman keras

Izin dari Departemen Kesehatan hanya diberikan apabila telah memiliki izin pedagang menengah dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

5. Untuk pengecer minuman keras

Izin dari Departemen kesehatan hanya diberikan apabila telah memiliki izin pedagang kecil dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan izin dari Menteri Keuangan.

6. Untuk penjual minuman keras

Izin dari Departemen Kesehatan hanya diberikan apabila telah memiliki izin

dari Menteri Keuangan dan izin usaha dari Pemerintah Daerah setempat.

b. Perlu dijelaskan :

1. Bahwa biaya yang harus dibayar dalam rangka perizinan ini, adalah biaya administrasi perizinan dan tidak termasuk pajak minuman keras.
2. Pungutan biaya tersebut semuanya disetor ke Kas Negara sebagai pendapatan negara.

4. Pengawasan Mutu

- a. Terhadap bahan etanol yang akan digunakan untuk produksi dan terhadap produksi akhir sebelum diedarkan harus dilakukan pemeriksaan mutu.
- b. Minuman keras yang diimpor harus disertai sertifikat analisis.
- c. Dilarang mengedarkan minuman keras yang mengandung metanol (CH_3OH) lebih dari 0,1% dihitung terhadap kadar etanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$).

5. Penjualan/Periklanan

- a. Hak menjual minuman keras oleh masing-masing badan usaha meliputi :
 1. Produsen minuman keras hanya boleh menjual minuman keras kepada pedagang besar minuman keras.

2. Pedagang besar minuman keras hanya boleh menjual minuman keras kepada penyalur minuman keras.
 3. Dan seterusnya, terakhir penjual minuman keras hanya boleh menjual/langsung menjual kepada konsumen.
- b. Pada penyerahan minuman keras golongan C kepada konsumen, pengecer minuman keras harus mencatat tanggal penyerahan, nama dan alamat penerima, nomor dan tanggal paspor atau kartu penduduk, serta jenis dan jumlah minuman keras yang diserahkan.
 - c. Lokasi penjualan minuman keras seperti restoran, kedai, bar atau tempat lain untuk diminum di tempat penjualan, tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit.
 - d. Dilarang menjual atau menyerahkan minuman keras kepada anak dibawah umur 16 tahun.
 - e. Dilarang memasang iklan promosi untuk minuman keras golongan C.
6. Sistem Laporan
- a. Produsen, importir, pedagang besar minuman keras harus mengirim laporan berkala tiap akhir bulan menurut contoh yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawas-

an Obat dan Makanan.

- b. Laporan tersebut dikirim ke Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat.

(Dirdjosisworo, 1984 : 120-122).

- d. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, tertanggal 31 Januari 1997. Yang dimaksud dengan minuman beralkohol menurut Keppres ini adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol (Pasal 1 Keppres Nomor 3 tahun 1997).

Selanjutnya dalam Pasal 3 Keppres ini dikelompokkan minuman beralkohol baik hasil industri di dalam negeri maupun yang berasal dari impor dalam golongan-golongan sebagai berikut :

- 1. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman

beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu prosen) sampai dengan 5% (lima prosen).

2. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima prosen) sampai dengan 20% (dua puluh prosen).
3. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh prosen) sampai dengan 55% (lima puluh lima prosen).

Untuk minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Produksi atau pembuatan minuman beralkohol di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan standar mutu minuman beralkohol ditetapkan Menteri Kesehatan. Masalah cukai minuman beralkohol produksi dalam negeri, bea masuk, cukai serta pajak-pajak lain bagi minuman beralkohol yang berasal dari impor besarnya ditetapkan Menteri Keuangan, dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan Menteri Kesehatan. Dengan demikian tidak diperbolehkan ada pungutan apapun lainnya.

Mengenai pembuatan minuman beralkohol secara tradisional - izin usaha dan pengawasannya dilakukan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Keppres ini menegaskan bahwa pelaksanaan dan pengendalian minuman beralkohol dilakukan secara terkoordinasi oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan instansi pemerintah terkait. Demikian juga dalam hal pengendalian produksi, pengedaran, dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol sangat penting dalam rangka terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban kehidupan dalam masyarakat.

- e. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 11 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pemasukan Minuman Keras Antar Pulau ke Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, tertanggal 24 Pebruri 1994, menetapkan bahwa minuman keras adalah "semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat yang digolongkan dalam golongan A, B, dan C" (Pasal 1 ayat (d) Perda No. 11 Tahun 1994).

Minuman keras golongan A adalah minuman keras yang berkadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu prosen) sampai dengan 5% (lim prosen). Minuman

keras golongan B adalah minuman keras yang berkadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima prosen) sampai dengan 20% (dua puluh prosen). Minuman keras golongan C adalah minuman keras yang berkadar ethanol lebih dari 20% (dua puluh prosen) sampai dengan 55% (lima puluh lima prosen).

Dalam Perda ini ditetapkan bahwa semua pemasukan minuman keras ke wilayah daerah Propinsi Irian Jaya harus dengan izin Gubernur Kepala Daerah. Minuman keras yang masuk ke Irian Jaya terbatas pada :

1. Untuk golongan A maximal berisi 1000 ml per botol/kaleng;
2. Untuk golongan B dan C maximal berisi 2000 per botol.

Izin diberikan kepada Perusahaan Daerah, Perseoran Terbatas (PT), CV atau Firma yang bergerak di bidang perdagangan dan berkedudukan atau mempunyai cabang di wilayah daerah Irian Jaya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa setiap jenis minuman keras yang berkadar alkohol baik tinggi maupun rendah, atau yang dibuat di pabrik-pabrik maupun yang dibuat secara tradisional dengan cara apapun di katagorikan sebagai minuman keras.

3. Bahaya Penyalahgunaan Minuman Keras

Penyalahgunaan minuman beralkohol atau minuman keras akan menekan aktivitas susunan syaraf pusat, sehingga mempengaruhi pusat pengendalian diri di otak dan berkhasiat seolah-olah sebagai perangsang (stimulant) susunan syaraf. Akibat penekanan ini rasa malu akan berkurang, peminum lebih berani berbicara, lebih leluasa berkomunikasi dengan orang lain, dan tidak merasa cemas. Minum minuman keras dalam jumlah yang banyak mengakibatkan peminum akan berjalan sempoyongan, berbicara menjadi tidak jelas, daya ingatan dan kemampuan menilai sesuatu terganggu untuk sementara waktu.

Pada tingkat keracunan (intoksikasi) yang lebih dikenal dengan istilah mabuk, terlihat gejala banyak bicara, jalan sempoyongan, bola mata bergerak-gerak ke samping, mata merah, terjadi perubahan alam perasaan, mudah marah dan tersinggung.

Keracunan alkohol dapat dibagi dalam lima tingkat, yaitu :

1. Tingkat sub klinik, bila kadar alkohol dalam darah 0-100 ml darah atau dalam urine 0-150 mg/100 ml urine.

Dalam keadaan ini orang masih kelihatan normal hanya sedikit perubahan dalam test kepekaan psikologi .

2. Tingkat stimulasi, bila kadar alkohol dalam darah 40-220 mg/100 ml darah atau dalam urine 130-290 mg/100 ml urine.

Pada tingkat ini emosi tidak stabil, daya tahan menurun, tidak ada koordinasi otot dan respon terhadap orang lain sangat lambat.

3. Tingkat kebingungan (confusion), bila kadar alkohol dalam darah 180-310 mg/100 ml darah atau dalam urine 260-450 mg/100 ml urine.

Gejala yang terlihat adalah adanya gangguan sensasional (alam perasaan), terjadi dis orientasi (tidak ada penyesuaian terhadap lingkungan), jalan sempoyongan dan bicara tidak terkontrol.

4. Pingsan, bila kadar alkohol dalam darah 270-440 mg/100 ml darah atau dalam urine 360-580 mg/100 ml urine.

Dalam keadaan ini respon terhadap rangsangan menurun dan tidak ada koordinasi pada otot sehingga terjadi kelumpuhan (paralysis).

5. Keadaan koma, bila kadar alkohol dalam darah 300-550 mg/100 ml darah atau dalam urine 480-700 mg/100 ml urine.

Dalam keadaan ini ketidak-sadarannya sempurna, temperatur lebih di bawah normal, gerak refleksinya melemah atau tidak ada sama sekali. Bila

sudah melampaui keadaan ini akan sukar sekali untuk ditolong dan bila kadar alkohol darah sudah lebih dari 450 mg/100 ml darah atau dalam urine lebih dari 600 mg/100 ml urine, maka sukar untuk ditolong dan penderita akan meninggal.

(Rusdihardjo, 1994 : 29-30)

Dari apa yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui kadar keracunan alkohol seorang peminum dapat ditentukan dengan pemeriksaan darah atau urine. Dan teknik yang digunakan adalah dengan pemeriksaan toksikologis, yaitu pemeriksaan dengan menggunakan analisis kimia untuk menentukan adanya racun alkohol.

Pada peminum-peminum berat yang sulit disembuhkan (kronis) akan timbul gejala-gejala sebagai berikut :

- a. Gangguan kesehatan fisik. Minuman keras dalam jumlah banyak dan waktu yang lama dapat menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas, lambung dan otot.

Pada pemakaian kronis minuman keras, dapat terjadi pengerasan hati (Cirrhosis hipatitis), peradangan lambung (Gastritis) dan tukak lambung (Ulcus ventriculi).

- b. Gangguan kesehatan jiwa. Minuman keras secara kronis dalam jumlah yang berlebihan menimbulkan kerusakan permanen pada jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan daya penilaian, kemampuan dan gangguan jiwa tertentu.
 - c. Gangguan fungsi sosial/pekerjaan. Akibat minuman keras, alam perasaan seseorang menjadi berubah, orang menjadi mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan terganggu. Hilangnya daya ingatan dan terganggunya kemampuan untuk menilai sesuai (judgment) mengakibatkan yang bersangkutan terpaksa tidak melakukan pekerjaan sehingga dikeluarkan dari pekerjaannya.
- (Rusdihardjo, 1994 : 31).

Ada juga yang mengatakan bahwa sepuluh persen dari peminum kronis akan menderita cirrhosis. Sebab kematian yang terpenting pada para peminum kronis adalah terjadinya kegagalan hati (liver failure) dan terjadinya ruptura varises esofagus sebagai akibat hipertensi portal. Jantung; Munich beer heart (Bollinger, 1884) adalah suatu keadaan di mana terjadi pembesaran jantung dan hipertrofi sekunder karena minum minuman keras yang berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama, sehingga adanya payah jantung kiri atau kanan yang terjadi secara mendadak

atau perlahan, distensi pembuluh vena leher dan nadi yang lemah (Idris Sidhi dan Iman Santoso, 1985 : 25-26).

Dengan menggunakan minuman keras secara berlebihan dan tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah, baik bagi diri sendiri maupun orang lain atau lingkungan masyarakat sekitarnya. Penyalahgunaan minuman keras atau alkohol (alcohol abuse) merupakan penyebab atau paling tidak sebagai faktor pencetus dari pembunuhan, pemerkosaan, perkelahian, kecelakaan lalu lintas dan tindak pidana lainnya.

Dalam kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas dibanyak negara dibuat undang-undang mengenai sampai sejauh mana alkohol (kadar alkohol) diperkenankan ada dalam tubuh pengemudi, misalnya :

- Di Inggris 80 mg per 100 ml;
- Di Amerika Serikat 80-150 mg per 100 ml;
- Di Swedia dan Norwegia 50 mg per 100 ml;
- Di Jerman Timu dan Czechoslovakia hanya 30 mg per 100 ml.

Ada penelitian yang dilakukan oleh Banay di penjara Sing Sing, hasilnya menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para pecandu alkohol itu hanya tindak pidana yang berkualitas rendah. Sedangkan tindak pidana yang berkualitas tinggi dilakukan oleh para penjahat di mana alkohol hanya

merupakan sekedar kesenangan saja, jadi bukan pecandu alkohol. Dengan perkataan lain perlu dibedakan "How Many Alcoholics are criminals dan How many criminals are alcoholics". (Idris Sidhi dan Iman Santoso, 1985 : 27-28).

Pemakaian minuman keras dapat menimbulkan gangguan organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, perasaan, perilaku. Timbulnya GMO ini disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat (otak). Minum minuman keras dalam jangka panjang dapat mengakibatkan gangguan pada otak, liver (hati), alat pencernaan, pankreas, otot janin endoktrin, nutrisi, metabolisme, dan resiko kanker (M.H. Ra'uf, H. Shanora, Y. Siradjuddin, 1997 : 1-2).

Dengan adanya gangguan organik (GMO) maka terdapat perubahan perilaku, misalnya perkelahian dan tindak kekerasan lainnya, ketidak mampuan menilai realitas, gangguan pada fungsi sosial dan pekerjaan, gangguan koordinasi, mudah marah dan tersinggung.

Akibat buruk pemakaian miras tersebut, di luar negeri sudah ada UU/Peraturannya yang menyangkut pembatasan produksi dan pemakaian. Sebagai contoh di Swedia : Penjualan miras hanya diperkenankan seminggu sekali pada hari Kamis, toko yang menjualnya khusus, pembeli/peminum berumur 21 tahun ke atas, dan setiap pembeli tidak boleh lebih dari satu liter (M.H. Ra'uf, H. Shanora, Y. Siradjuddin, 1997 : 2).

Dari sisi lain penggunaan minuman keras secara berlebihan dan tidak terkendali :

- a. Akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Tingginya kasus tindak pidana, pelanggaran lalu lintas dan gangguan kamtibmas yang diawali, disertai, bahkan diakhiri oleh penggunaan minuman keras;
- c. Kebiasaan menggunakan minuman keras yang secara berlebihan dapat dimanfaatkan oleh golongan-golongan tertentu untuk merongrong dan mengganggu stabilitas pembangunan daerah;
- d. Konsumsi minuman keras yang berlebihan dapat merusak kesehatan, fisik maupun kejiwaan dengan segala akibatnya.

(Penjelasan Umum PERDA TK. I IRJA, No. 11 Tahun 1994).

4. Pengertian Pemabukan Menurut KUHP

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pun mengatur mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau pemabukan yang tersebar dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 300; Pasal 492; Pasal 536; Pasal 537; Pasal 538; dan Pasal 539 KUHP.

Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 300 KUHP :

- (1) Dengan hukum penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- di hukum :
 1. barangsiapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minuman-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk
 2. barangsiapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya di bawah 16 tahun
 3. barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum minuman yang memabukkan.
- (2) Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Kalau perbuatan itu menyebabkan orang mati, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (4) Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya ia dapat dipecat dari pekerjaannya itu.

Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan secara singkat bahwa agar supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang yang menjual atau memberi minuman-minuman keras itu harus mengetahui bahwa orang yang membeli atau diberi minuman itu harus telah kelihatan nyata mabuk, kalau tidak, tidak dapat dikenakan pasal ini. Pasal ini juga dikenakan kepada orang yang membuat mabuk anak di bawah umur. Semua tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman keras.

2. Pasal 492 KUHP :

- (1) Barangsiapa yang sedang mabuk, baik di tempat umum merintangangi jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp.375,-
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lewat satu tahun sejak penetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah karena pelanggaran serupa itu juga atau lantaran pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 536 maka ia dihukum kurungan selama-lamanya dua minggu.

Dapat disimpulkan dari ketentuan pasal ini bahwa orang itu (si tersalah) supaya dapat dikenakan sanksi pidana harus dibuktikan bahwa ia mabuk di tempat umum, merintangangi jalan/lalu lintas dan mengganggu keamanan orang lain. Jika orang itu diam saja di rumahnya dan tidak mengganggu apa-apa, tidak dikenakan pasal ini.

3. Pasal 536 KUHP :

- (1) Barangsiapa yang nyata mabuk ada di jalan umum, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp.225,-
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum satu tahun, sejak penetapan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran pelanggaran serupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.

- (3) Kalau pelanggaran itu diulangi untuk kedua kalinya dalam satu tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang pertama karena ulangan pelanggaran itu, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu.
- (4) Kalau pelanggaran itu diulangi untuk ketiga kalinya atau selanjutnya di dalam satu tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang kemudian sekali lantaran ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atau selanjutnya, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan.

Supaya dapat dikenakan pasal ini si tersalah harus kentara mabuk dan berada di jalan umum. Jika berada dalam rumah, tidak dikenakan pasal ini.

4. Pasal 537 KUHP :

Barangsiapa menjual atau memberi minuman keras atau tuak keras diluar kantin militer kepada seorang militer dari balatentara darat, di bawah pangkat onderopsir atau kepada isteri, anak atau bujang militer itu, dihukum kurungan selama-lamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1.500,-

Pasal ini menghendaki tidak boleh menjual/ memberi minuman keras kepada tentara - AD di bawah pangkat Sersan diluar kantin militer. Sebenarnya pasal ini sudah tidak cocok lagi dengan kondisi sekarang.

5. Pasal 538 KUHP :

Penjual minuman keras atau gantinya, yang pada waktu menjalankan pencahariannya memberi minuman atau menjual minuman keras atau tuak keras kepada anak-anak yang umurnya di bawah 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1.500,-.

Yang dapat dihukum menurut Pasal ini adalah penjual minuman keras yang memberikan minuman keras kepada anak yang masih dibawah umur. Pasal ini dikaitkan juga dengan Pasal 300 KUHP.

6. Pasal 539 KUHP :

Barangsiapa yang waktu orang mengadakan pesta keramaian bagi umum atau permainan rakyat atau arak-arakan bagi umum, menyediakan minuman keras atau tuak keras dengan cuma-cuma atau menyediakan minuman keras atau tuak keras sebagai hadiah, dihukum kurungan selama-lamanya dua belas hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp.375,- (Soesilo, 1973 : 189,273, 273-294).

Menurut pasal ini yang dihukum adalah orang yang menyediakan dengan cuma-cuma atau sebagai hadiah minuman keras atau tuak pada waktu ada keramaian umum.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa mabuk menurut KUHP adalah kebanyakan minum minuman keras, sehingga tidak dapat menguasai lagi salah satu pancainderanya atau anggota badannya, minum di tempat umum, merintangai lalu lintas dan mengganggu ketertiban umum.

Pasal-pasal yang dikemukakan di atas mungkin perlu direvisi kembali karena sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan masyarakat dewasa ini.

5. Pengertian Tindak Pidana Dalam Kaitan Dengan Pemabukan

Istilah tindak pidana adalah merupakan terjemahan dari strafbaar feit. Strafbbaar feit itu sendiri berasal dari bahasa Belanda yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai pengertian. Ada yang mengartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum. Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah tindak pidana, ini terlihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia.

Dalam pengertian secara umum dari istilah-istilah di atas dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana (hukuman). Pada kesempatan ini dapat dikemukakan beberapa pengertian tentang tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa sarjana.

1. R. Soesilo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana itu harus terdiri dari unsur obyektif dan unsur subyektif (R. Soesilo, 1984 : 26).
2. Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1980 : 37).

merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.

4. Simons, merumuskan tindak pidana (strafbaar feit) itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. (P.A.F. Lamintang, 1984 : 176).

Simons menghendaki bahwa adanya suatu tindak pidana (Strafbaar feit) disyaratkan harus terdapat suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dihukum. Oleh karena itu tindakan tersebut harus memuat semua unsur yang dirumuskan dalam delik tersebut. Dan setiap tindak pidana menurut undang-undang pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukuman (pidana) tidak cukup apabila di situ hanya terdapat suatu tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang tersebut tidak dapat dihukum apabila tindak pidana yang telah ia lakukan itu tidak bersifat melawan hukum.

Dari beberapa pengertian tindak pidana sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan di-

ancam pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Dari rumusan atau pengertian tindak pidana sebagaimana yang disebutkan di atas apabila dikaitkan / dihubungkan dengan tindak pidana pemabukan dalam tesis ini, maka tindak pidana tersebut diartikan sebagai suatu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan mabuk (*dronkenschap*) sehingga mengganggu ketertiban umum, ketentraman dan ketenangan orang dalam masyarakat, sekaligus menjurus kepada terjadinya tindak pidana kekerasan. Oleh karena itu masalah ini tidak boleh dibiarkan dan harus ditindak tegas. Tentunya untuk menindaknya harus terpenuhi unsur-unsur dalam delik pemabukan tersebut, yakni unsur melawan hukum, unsur kesalahan, minum di tempat umum, berbau alkohol dan lain sebagainya.

Dalam setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan

dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
2. Macam-macam maksud atau oogmerk, seperti yang terdapat di dalam tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
3. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti yang terdapat dalam tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
4. Perasaan takut atau vrees, seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya seorang pegawai negeri melakukan kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP.

3. Kualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat (P.A.F. Lamintang, 1984 : 184).
4. Delik yang menghendaki keadaan obyektif dimuka umum, misalnya pemabukan Pasal 536 KUHP, pelanggaran kesusilaan Pasal 281, dan mengemis Pasal 504 KUHP (Sudarto, 1987 : 46).

Dari unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan di atas dapat dirumuskan secara singkat bahwa yang penting dalam unsur obyektif adalah perbuatan manusia, akibat dari perbuatan itu, adanya sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Sedangkan unsur subyektif yang penting adalah kesalahan (schuld) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelanggar (pelaku), dan adanya niat (maksud).

Apabila unsur-unsur ini dirumuskan dalam tindak pidana pemabukan, maka jika tindak pidana pemabukan itu dilakukan dengan kekerasan - diterapkanlah unsur-unsur subyektif, tetapi bila tindak pidana pemabukan itu mengganggu ketertiban umum - berlakulah unsur-unsur obyektif.

6. Tindak Pidana Kekerasan Akibat Pengaruh Alkohol

Tindak pidana kekerasan akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini bukan hanya terjadi di tingkat nasional (di kota-kota besar), di daerah-daerah pun masalah ini sering terjadi. Kalau membaca surat khabar hampir setiap hari menyajikan berita-berita yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan, misalnya perkosaan, penganiayaan, pembunuhan, pengrusakan, pembakaran dan sebagainya. Ini merupakan suatu trend baru yang perlu disikapi.

1. Arti Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana kekerasan ialah perbuatan memukul dengan menggunakan alat atau tanpa alat, menyepak, mengikat dengan tali atau menodong dengan pistol dan sebagainya. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang membuat orang pingsan atau menjadi tidak berdaya adalah termasuk perbuatan kekerasan (W. Bawengan, 1977 : 178-179). Yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan disini adalah menimbulkan cedera jasmaniah atau rohaniah bagi pihak korban. Si pembuat melaksanakannya dengan menggunakan alat-alat, seperti senjata api, benda tajam, benda tumpul dan benda keras lainnya.

Marshall B. Clinard (1976) berdasarkan hasil studi perbandingan di beberapa negara berkembang tentang kejahatan kekerasan mengemukakan bahwa kekerasan pada umumnya adalah suatu gejala sub-kebudayaan yang dihubungkan dengan faktor-faktor kultural tertentu, dimana kekerasan digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Dan lebih banyak dilakukan oleh pemuda-pemuda yang berusia dua puluhan tahun (W. Kusumah, 1982 : 49).

Di dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana kekerasan tidak diatur atau disebutkan secara jelas, hanya saja dalam Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa "membuat orang jadi pingsan atau membuat orang tidak berdaya lagi disamakan dengan melakukan kekerasan". Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana kekerasan merupakan tindak pidana yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani/fisik secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau menggunakan senjata tajam, menendang dan sebagainya.

Tindak pidana kekerasan yang dimaksud dalam tesis ini adalah perbuatan dengan sengaja

yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh seseorang atau sekelompok orang di mana mereka berada dalam keadaan mabuk atau karena pengaruh alkohol.

2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Perkembangan (Faktor-faktor Penyebab)

Perlu diketahui bahwa tindak pidana kekerasan dewasa ini telah meresahkan masyarakat. Kalau dahulu para penjahat mengancam uang atau nyawa, sekarang telah bergeser/berubah menjadi uang dan nyawa. Bahkan sangat memprihatinkan lagi karena banyak terjadi perampokan disertai pembunuhan dan pemerkosaan. Kejinya lagi, pembunuhan itu dilakukan setelah pelakunya menguras dan memperlakukan korban secara keji diluar batas-batas perikemanusiaan. Melihat peningkatan kejahatan ini, aparat keamanan dan masyarakat mulai gusar. Merekapun akhirnya tidak segan-segan memukul genderang perang melawan kejahatan (preman).

Pada pemilu (1997) yang baru lalu pun diwarnai dengan berbagai tindak pidana kekerasan, baik di Jawa, Madura, Kalimantan dan daerah-daerah lain. Masing-masing peristiwa di tiap-tiap daerah tersebut mempunyai motif atau faktor penyebab yang berbeda-beda. Sehingga para pakar

pun turut angkat bicara bahwa fenomena ini sudah menjurus kepada budaya kekerasan (brutal) dan bila dibiarkan akan mengganggu stabilitas nasional, karenanya perlu diantisipasi dan dikaji untuk dicari akar permasalahan.

Ada pakar (Said Tuhuleley) mengatakan bahwa fenomena tindak kekerasan dan kebingungan dalam berbagai sektor kehidupan manusia dewasa ini makin berkembang. Ironisnya hal itu telah makin menampakkan diri sebagai ciri masyarakat modern. Dan pada akhir abad XX ini kekerasan dan kebingungan juga menyelinap ke dalam kebijakan berbagai institusi kemasyarakatan. Yang oleh para sosiolog disebut kekerasan struktural. Sebagai penyebabnya adalah makin menipisnya nilai-nilai prinsipil, termasuk agama, dalam kehidupan kita dewasa ini. Sedangkan H.M. Amien Rais mengatakan bahwa kerusuhan dan tindak kekerasan belakangan ini akibat rakyat sudah tidak tahan menghadapi kesewenang-wenangan dan kezaliman ekonomi yang sudah berlangsung cukup lama. Kesewenang-wenangan itu bermula dari tiga penyakit kronis, yaitu korupsi, ketimpangan sosial, dan paham aji mumpung pada sementara petinggi. Hal-hal ini harus ditangani secara hati-hati, kalau tidak bisa menjadi letupan sosial, bahkan bisa lepas kendali

dan menjadi ledakan sosial (Suara Merdeka, 29 Agustus 1997).

Mengkaji tindak pidana kekerasan dengan segala asoeknya bukan sesuatu yang mudah karena tindak pidana itu beragam jenisnya dengan faktor penyebab yang berbeda-beda. Tindak pidana kekerasan telah ada sejak dahulu, dan di dalam masyarakat merupakan kejahatan-kejahatan tradisional. Hanya saja sekarang telah mengalami perkembangan baik dalam hal motif, sifat, bentuk, intensitas, maupun modus operandinya. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akhir-akhir ini semakin berkembang dengan pesat.

Tindak pidana kekerasan sangat berkaitan dengan sifat agresif manusia. Albert Bandura (1984) mengkaji tindak pidana kekerasan dari aspek proses. Menurut beliau tindak pidana kekerasan adalah hasil dari proses belajar yang mengarah pada imitation. Dengan demikian, penitruan bisa dilakukan/terjadi karena seringnya melihat tindak pidana kekerasan. Dalam hal ini media massa/film dituntut andil dalam proses ini (Darma Weda, 1996 : 110).

Suguhan film dan berita media massa tentang tindak pidana kekerasan merupakan faktor

yang sangat berperan dalam prose belajar. Jadi terjadinya suatu tindak pidana/kejahatan tidak terlepas dari adanya learning process. Namun suguhan film itu belum cukup dijadikan faktor utama semakin merebaknya tindak pidana kekerasan saat ini. Faktor itu hanya menjadi faktor stimulus saja, yang memicu orang untuk berbuat tindak pidana. Tetapi, ada faktor fundamental lainnya yang lebih signifikan di masyarakat, yakni terjadinya kesenjangan ekonomi yang semakin dalam, pengaruh iklim struktural yang sering mempraktekan kekerasan dan sebagainya.

Semua faktor itu memang memberikan kontribusi sendiri dalam mempengaruhi peningkatan kuantitas dan kualitas tindak pidana yang terjadi. Tidak bisa satu faktor saja yang diutamakan, mengingat sebab terjadinya tindak pidana memang sangat multifaaktor. Tindak pidana kekerasan biasanya dilakukan oleh pelaku-pelaku yang agresif tanpa memperhitungkan akibatnya.

Perilaku agresif selalu diikuti oleh adanya keadaan frustasi, ketidakpuasan, tekanan-tekanan dalam masyarakat (ekonomi) yang semuanya mendorong untuk terjadinya perbuatan deviasi (tindak pidana). Dan ini terjadi karena ketidakpuasan anggota masyarakat dalam mencapai tujuan

atau aspirasi yang mereka inginkan. Frustrasi pada warga masyarakat tersebut cenderung untuk melakukan penyelewengan terhadap norma-norma yang berlaku. Penyelewengan terhadap norma-norma yang berlaku, misalnya inovasi dengan mencuri, ritualisme dengan birokrasi, dan penarikan diri dengan melalui alkohol (minuman keras) dan obat bius (Sahetapy dan Reksodiputro, 1982 : 52-53).

Selain hal-hal sebagaimana yang disebutkan di atas sebagai penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan, perlu diperhatikan juga peranan korban dalam terjadinya tindak pidana kekerasan. Sebab tindak pidana seperti perkosaan, pembunuhan, dan penganiayaan lebih banyak terjadi karena adanya peranan korban. Korban secara sadar atau tidak melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan tindak pidana. Jadi korbanlah yang mempunyai andil besar untuk terjadinya tindak pidana. Misalnya, seorang perempuan pada malam hari berjalan sendirian ditempat yang sepi dengan pakaian yang merangsang, ketertulan disitu ada orang sedang minum alkohol, bisa terjadi perkosaan. Demikian juga seorang ibu memakai berbagai perhiasan emas di badannya kemudian pergi berbelanja atau ke tempat umum lainnya, bisa terjadi penodongan,

penjambretan, bahkan pembunuhan bila korban melawan, apalagi berhadapan dengan orang mabuk.

Dalam hal peranan korban untuk terjadinya tindak pidana, Azif Gosita mengatakan bahwa :

Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundangi pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan tindakannya. Dalam hal ini antara pihak korban dan pelaku tidak ada hubungan sebelumnya (tidak perlu). Misalnya, pihak korban bersikap dan bertindak lalai terhadap harta miliknya (meletakkan atau membawa barang berharga, tanpa mengusahakan pengamanannya) sehingga memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengambilnya tanpa izin. Bisa juga karena pihak korban berada di daerah rawan, sehingga memudahkan diri untuk menjadi sasaran perbuatan jahat (Gosita, 1982 : 34).

Demikianlah sekedar gambaran bahwa korban juga turut berperan terjadinya tindak pidana.

3. Tindak Pidana Kekerasan Akibat Pengaruh Alkohol

Pemakaian minuman keras/alkohol yang secara berlebihan akan menimbulkan berbagai masalah, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat disekitarnya. Karena peminum bisa berubah perilakunya, diantaranya mudah terangsang dan mudah marah. Demikian pula tindakan kekerasan sering menyertai setiap menyelesaikan suatu masalah.

Penyalahgunaan alkohol dapat merugikan masyarakat akibat agresivitas peminum yang bermuara pada tindak kriminal.

Noach (terjemahan J.E. Sahetapy, 1992) menyebutkan para alkoholik sebagai penjahat profesional yang malas bekerja. Mereka selalu mabuk dan mengancam daerah sekitarnya, membawa senjata dan menggunakan senjata itu untuk melakukan tindak pidana, misalnya perampokan, pencurian dan sebagainya yang mana semua tindak pidana ini selalu dilakukan dengan kekerasan (Noach, 1992 : 98).

Banyak tindak pidana kekerasan yang terjadi akibat minuman keras, dimana pelakunya semakin brutal dan sadis. Hal ini memaksa pemerintah untuk bertindak memerangi (membentasi) para pemabuk tanpa pandang bulu, semuanya harus ditindak tegas. Misalnya, pada beberapa waktu yang lalu (1995) ketika Brigjen TNI-AD Tampubolon tewas ditangan pemabuk, maka dilakukan operasi bersih terhadap preman dan menyikat habis ribuan botol minuman keras. Demikian pula ketika Lettu (Pol) Budi Prasetyo tewas ditangan preman mabuk di Blok M Jakarta Selatan - Maret 1995, maka dilakukan operasi kilat untuk memberangus preman beserta segala anasirnya, termasuk alkohol.

Sumber lain menyebutkan generasi muda Aborigin sudah hancur dengan alkohol, sehingga mengakibatkan banyak perkelahan dan tindakan

berkurang (Fakta, 1 Desember 1991). konsentrasi terhadap pelajaran di sekolah banyak yang kecanduan alkohol, sehingga mereka dipecat dari pekerjaan. Para pelajar pun berantakan, sehingga tidak menutup kemungkinan berkurang, akibatnya semua pekerjaan menjadi mempengaruhi kehidupan sehari-hari, konsentrasi Aborigin alkohol begitu dominan sehingga orang mengalami luka berat. Terhadap orang-orang setiap tahun 2.700 orang meninggal dunia, 29.000 supirnya terlalu banyak menenggak alkohol, dimana besar. Banyak kecelakaan di jalan raya karena Di Australia, alkohol menjadi problem alkohol merupakan persoalan besar. Ambil contoh : lain yang menganggap masalah penyalahgunaan yang gawat (besar). Berbeda dengan negara-negara ini karena dianggap belum menimbulkan masalah perhatian yang sungguh terhadap masalah pemabukan Hemang, untuk negara kita belum enaruh kembali.

memungkinkan para preman alkoholik beraksi bersifat sementara, tidak berlanjut sehingga Tindakan/operasi tersebut kelihatannya

H. Dadang Hawari menyebutkan di Amerika Serikat satu pertiga kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengemudi di bawah pengaruh alkohol, dan kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan kematian sebanyak 25.000 jiwa setiap tahun. Setiap tahunnya terdapat lima juta kasus penahanan yang dilakukan oleh polisi yang berkaitan dengan penyalahgunaan alkohol, hal ini merupakan 50% dari seluruh kasus penahanan oleh

1974 : 87).

Di Amerika Serikat, alkohol menimbulkan persoalan nomor satu, karena mengakibatkan korban jiwa dan cacat jasmani maupun rohani yang jauh lebih besar. Kira-kira 100 juta penduduk Amerika sudah terbiasa minum minuman keras, 9 sampai 13 juta orang diantaranya yang sudah ketagihan alkohol. Menurut catatan, kematian dan kerusakan mental akibat alkohol mengambil korban yang berlipat-lipat lebih banyak daripada bahaya obat-obat atau bahan-bahan lainnya (Soejono D,

tinggi (Kompas, 6 April 1997).

kekerasan lainnya. Kehancuran akibat alkohol ini teramat dahsyat bagi penduduk Aborigin, sehingga anak-anak menjadi terlantar karena tidak diurus oleh orang tua, dan tingkat kekerasan rumah tangga dikalangan masyarakat Aborigin sangat

pihak kepolisian. Hasil penelitian Mc Donald (1984); Clayton (1986) terdapat 80% dari narapisisa di Amerika melakukan kejahatan dibawah pengaruh alkohol (Rusdihardjo, 1994 : 31-32).

Sebuah temuan studi yang dilaporkan Scientific American edisi terbaru (1996) bahwa para pemabuk cenderung menjadi pembunuh atau melakukan bunuh diri. Sekitar 11 persen pemabuk di Amerika Serikat ditemukan menjadi pembunuh, sedang 8 persen berkecenderungan mengalami kecelakaan di jalan raya kala mengemudikan mobil, 17 persen menderita kanker kerongkongan dan radang pangkal tenggorokan, 9 persen mengalami stroke, 30 persen terkena sirosis hati. Dalam laporan itu juga dijelaskan, setidaknya 100.000 warga Amerika mati setiap tahunnya karena alkohol, dan mereka yang berkulit hitam beresiko 1,5 kali lebih besar dibandingkan yang berkulit putih (Jawa Pos, 21 Desember 1996).

Bagaimana halnya dengan di negara kita. Di Indonesia masalah pemabukan belum begitu dirasakan merusak dan membahayakan seperti apa yang dialami di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Tetapi sebaiknya kita bersiap-siap sebelum datangnya bahaya besar sebagai akibat alkoholisme yang merajalela. Apalagi di negara

Kembali kepada pokok masalah tindak pidana kekerasan akibat pengaruh alkohol yang terjadi di Irian Jaya, khususnya di Jayapura. Dapat diberikan beberapa contoh kasus untuk memberi gambaran kepada kita bahwa masalah ini merupakan persoalan berat (rumit). Karena apabila minuman keras dilarang untuk dijual (untuk sementara) para pemabuk akan lari ke minuman tradisional, bahkan

barang minuman di negara kita. tersebut mudah di dapat dimana-mana, dan bukan menempati urutan ke tiga, oleh karena barang ada tanda-tanda keberannya. Minuman keras (Nopember 1997). Agaknya ramalan tersebut sudah Alkohol; dan 4. Homoseks (Suara Merdeka, 7 4, yaitu : 1. Bunuh diri; 2. Narkotika; 3. kesehatan jiwa di Indonesia yang cukup serius ada meramalkan bahwa pada tahun 2000 nanti masalah dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta, Dokter Erwin Widjono (1975), psikiater

sional. harus ditanggulangi secara serius dan konsep seperti alkoholisme dan penyalahgunaan narkotik tahan manusia Indonesia dalam pembangunan, maka segala faktor yang dapat memperlemah daya telah berada pada tahap persiapan lepas landas, kita yang sedang membangun di segala bidang, dan

ada yang membuat sendiri, yaitu alkohol dari Rumah Sakit dicampur dengan bahan lainnya, jadi lah minuman keras yang siap diminum, tetapi celakanya banyak yang meninggal dunia karena campurannya tidak pas, inilah yang membuat pemerintah jadi pusing.

Tindak pidana yang terjadi pun banyak meresahkan masyarakat karena pelakunya semakin brutal dan sadis. Hal yang demikian ini menyebabkan pihak Bakortanasda Maluku - Irian Jaya terpaksa turun tangan untuk membantu menanggulangi masalah yang satu ini, disamping aparat hukum lainnya. Untuk penguraian lebih lanjut mengenai masalah ini akan dijelaskan pada bab III tentang analisis.

Contoh kasus yang dapat dikemukakan di sini adalah :

1. Di Jayapura beberapa waktu yang lalu (Maret 1996) pernah terjadi peristiwa besar yaitu pembakaran pasar Abepura dan fasilitas umum lainnya yang memakan korban jiwa dan kerugian materiil milyaran rupiah. Peristiwa ini dilakukan oleh para perusuh yang sebagian berada dalam keadaan mabuk. Peristiwa ini cukup brutal sehingga ABRI mengeluarkan perintah tembak di tempat dan jam malam

berlaku. Kota Jayapura semakin tercekam, perekonomian lumpuh dan transportasi di jalan raya pun macet. Hal ini berjalan kurang lebih satu minggu kemudian normal kembali (Gatra, 30 Maret 1996).

2. Seorang anggota ABRI-AD tewas di bacok pe-
mabuk. Pada tanggal 23 Maret 1997 malam pukul
20.00 WIT Terry (27 tahun) bersama
kawan-kawannya berjumlah lima orang dalam
keadaan mabuk membunuh seorang anggota ABRI-AD
Praka Thomas di depan toko Baru, Jalan
Gerilyawan Abepura - Jayapura. Mereka dalam
keadaan mabuk karena sebelumnya sudah minum
wisky drum mendatangi korban (pada saat itu
sebagai tukang ojek) untuk minta uang. Namun
diberi uang Rp. 1.000,- tersangka masih belum
puas dan minta lagi tetapi tidak diberi oleh
korban. Terjadi keributan disertai pemukulan,
korban lari tetapi dikejar tersangka bersama
lima temannya lalu membacok korban dengan
sabit dan ditusuk dengan badik, sehingga
korban jatuh terkapar dipinggir jalan sampai
menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sudah
jatuh terkapar masih diinjak-injak lagi oleh
para tersangka. Tidak ada yang berani melera-
i karena biasanya para pemabuk berbuat nekad.

Setelah itu para tersangka (pemabuk) melarikan diri, tetapi keesokan harinya mereka menyerahkan diri kepada polisi.

3. Seorang preman mabuk mati tertembak di Jayapura. Akibatnya, warga setempat membakar rumah dan menewaskan dua orang. Pada tanggal 8 April 1995 di Abepura - Jayapura terjadi pertengkaran antara Lamak Wamoar (pemabuk) dari Desa Nafri (penduduk asli) dengan La Kual dari desa Abepantai (pendatang dari Buton) pemilik kios/warung di desa itu. Lamak Wamoar dikenal sebagai pemabuk berat, dalam keadaan mabuk minta secara paksa sebotol coca-cola dari La Kual. La Kual tidak memberi, maka terjadilah pergelutan. La Kual tersungkur dan luka-luka lalu dibawa ke Rumah Sakit untuk berobat. Sebelum La Kual kembali ke rumah, datang enam anggota ABRI dari Batalyon Infanteri Yonif 733. Mereka ingin memeriksa Lamak Wamoar. Lamak tak gentar menghadapi enam anggota tentara tersebut dan berusaha melawan serta merebut senjata M-16 dari tangan tentara, walaupun sudah ada tembakan peringatan. Ketika bergulat itulah sebuah peluru menembus perutnya. Lamak tewas bersimbah darah. Keluarganya (warga) Lamak marah dan menyerang warga

Buton (keluarga La Muall) dengan bom ikan (bom melotov). Akibatnya 18 rumah porak-poranda dilalap api, dan 21 rumah lainnya rusak, dan dua orang nenek memenemui ajal (Forum Keadilan, 11 Mei 1995). Semuanya ini terjadi karena ulah orang mabuk.

Kasus yang terakhir inilah membuat Pemda Tingkat II Kabupaten Jayapura meninjau kembali. Perda tentang Minuman Keras yang selama ini berlaku. Kemudian Perda tersebut diadakan perubahan/perbaikan disesuaikan dengan kondisi sekarang, yaitu menaikkan pajak atas izin penjualan minuman keras. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai masalah ini dapat dilihat/dibaca pada bab III tentang hasil penelitian dan analisis.

Dengan mengemukakan kasus-kasus ini (tentunya masih ada kasus-kasus yang lain) dengan maksud untuk memberi gambaran secara umum tentang kondisi obyektif pemabukan di Jayapura. Dan kesan yang ditarik dari kasus-kasus tersebut adalah bahwa perbuatan pemabuk di Jayapura bukan hanya brutal dan sadis, tetapi pelakunya semakin berani dan siap menerima atau menghadapi resiko apapun yang terjadi.

Pada kesempatan ini dapat diberikan dana yang sering terjadi di Jayapura, di mana selama diawali dan diakhiri dengan minuman keras, yang sekaligus merupakan pembahasan dari pada tesis ini, antara lain :

a. Perbuatan disengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain, atau yang hanya menimbulkan perasaan sakit tanpa ada perubahan bentuk dari keadaan semula, dan juga dengan sengaja dan direncanakan melukai berat orang lain - Penjelasan Pasal 351, Pasal 354 KUHP.

Contoh kasus :

Tersangka Yance F (YF) 22 tahun, pekerjaan tidak ada, dalam keadaan mabuk menganiaya isterinya Fransiska R (korban). Dengan kepala tangannya ia meninju korban. Bukan itu saja, tangan kirinya yang memegang pisau ditikamkan pada tubuh isterinya. Akibatnya, korban mengalami luka pada bagian muka dan payudara kanan. Penganiayaan itu terjadi pada tanggal 15 Desember 1995 pukul 16.30 WIT. Di Desa Natri, Kecamatan Abepura-Jayapura. Ketika itu tersangka sedang duduk minum minuman

keras merek Jenever dengan teman-temannya, tiba-tiba datang korban meninggal suaminya untuk pulang, dan pada saat itu ia memukul suaminya dengan kayu. Akibat kejadian itu, tersangka malu dengan teman-temannya maka terjadilah penghinayaan tersebut - Melanggar Pasal 351 KUHP.

Kasus lainnya adalah tersangka Otis Dimara 35 tahun, buruh, pada tanggal 11 Mei 1994 di Palimak II, Kecamatan Jayapura Selatan dalam keadaan mabuk menganiaya korban. Dengan cara, pelaku mengambil parang dan menggar korban kemudian melukainya pada bagian tangan kanan - Melanggar Pasal 351 KUHP.

b. Perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain untuk memiliki secara melawan hak. Perbuatan ini bisa juga dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, termasuk tindak pidana pencurian - Penjelasan Pasal 362-365 KUHP.

Contoh kasus :

Pada tanggal 10 Februari 1996 di jalan Percetakan Kecamatan Jayapura Utara, tersangka Soter Kenengan, umur 25 tahun,

pekerjaan tidak ada, dalam keadaan mabuk berjalan-jalan sepanjang jalan Ahmad Yani terus berputar ke arah jalan Percetakan. Sampai di depan Supermarket Jaya, ia melihat seorang ibu menenteng tas noken. Ia menghampiri ibu itu dan menendangnya sehingga itu terjatuh lalu ia merampas tas tersebut dan membawa lari. Beberapa saat kemudian dia ditangkap oleh Wempi Modok dan dibawa ke Polres Jayapura - Melanggar Pasal 362 KUHP.

c. Perbuatan disengaja dengan menghilangkan nyawa orang, dan dengan cara apapun adalah merupakan tindak pidana pembunuhan - Pen-jelasan Pasal 338 KUHP.

Contoh kasus :

Pada tanggal 18 Maret 1996 di Bonggo-Jaya-pura tersangka Oskar Sangkaren 38 tahun, pekerjaan tani, dalam keadaan mabuk mendatangi korban lalu memukanya dengan linggis sehingga korban meninggal dunia - Melanggar Pasal 338 KUHP, Subsider 351 ayat (3) KUHP.

d. Perbuatan disengaja dan atau ancaman ke-kerasan untuk beresetubuh dengan seorang

perempuan yang bukan isterinya, sudah dapat dimasukkan sebagai perbuatan pemerkosaan -

Penjelasan Pasal 285 KUHP.

Contoh Kasus :

Pada tanggal 20 Februari 1994 sekitar pukul 19.00 WIT (malam) di Entrop Kecamatan Jayapura Selatan, tersangka Hamadi 30 tahun, pekerjaan tidak ada, dalam keadaan mabuk memaksa seorang perempuan (korban) untuk bersetubuh tetapi korban tidak mau sehingga dengan kekerasan dan paksaan korban diperkosa, kemudian dicekik lehernya sampai mati. Lalu korban ditanam/dibenamkan dalam lumpur untuk menghilangkan jejak. Antara korban dan pelaku sudah saling mengenal - Melanggar Pasal 285 KUHP dan Pasal 338 KUHP.

e. Perbuatan disengaja dengan melawan hak, yang membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuatu barang atau binatang, atau merusak rumah (gedung), atau fasilitas umum lainnya yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dimana hal demikian dapat dipidana sebagai perbuatan menghancurkan

atau merusak barang orang sesuai dengan Pasal 406-410 KUHP.

Contoh kasus :

Pada tanggal 28 Agustus 1994 di Sentani Jayapura tersangka Yehuda Ondy 29 tahun, pekerjaan tani, dalam keadaan mabuk mendatangi korban di rumahnya, kemudian merusak kaca lover dan masuk dalam rumah lalu memukul korban - Melanggar Pasal 406 KUHP, Subsidier Pasal 351 KUHP.

f. Perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, atau memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, segala perbuatan itu melanggar kesusilaan dan berada dalam lingkungan nafsu birahi - Penjelasan pasal 269 KUHP.

Perbuatan cabul, zina, susila yang dimaksud di sini adalah perbuatan berseputuh, memegang atau meraba-rasa anggota badan perempuan yang sensitif, dan semuanya dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan di mana pelakunya berada dalam keadaan mabuk.

g. Dari sisi lain, tindak pidana pemabukan

dapat juga dianggap keterliban umum,

yaitu mabuk di tempat umum, merintangi lalu

lintas dan tindakan lainnya - Penjelasan

Pasal 492 KUHP. Misalnya : pada tanggal 13

Maret 1997 terdakwa Riko, Ridho dan

Justinus minum minuman keras di depan PT.

Sucofindo Jayapura sampai mabuk (teler).

Dalam kondisi seperti itu mereka mengotak-

atik motor-motor yang berada di sekitarnya,

mereka ditegur oleh Satpam yang ada di situ

tetapi tidak dihentikan. Lalu datang

seorang anggota Polisi juga menegur tetapi

mereka tidak terima. Kemudian ketiganya

diangkut ke Polres untuk diminta keterangan-

an. Kasus ini pun berjalan hingga ke peng-

adilan negeri Jayapura. Mereka bertiga di

vonis masing-masing 7 hari penjara -

Melanggar Pasal 492 KUHP.

B. Tata Cara Pengadaan atau Pemasukkan Minuman Keras ke

Irian Jaya

Dalam hal pengadaan atau pemasukkan minuman

keras di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya perlu

diatur, dan mendapat pengawasan yang ketat agar tidak

menimbulkan ekkses-ekses negatif atau permasalahan di

Untuk mendapatkan izin memasukkan minuman keras perusahaan yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Kepala Biro Bina Perekonomian Setwilda Tingkat I Irian Jaya dengan melampiri persyaratan :

memberikan syarat-syarat untuk memperoleh izin memasukkan minuman keras sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 11 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pemakaian Minuman Keras Antar Pulau ke Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, memberikan syarat-syarat untuk memperoleh izin memasukkan minuman keras sebagai berikut :

a. Tata Cara Izin Pemakaian Minuman Keras

peredarannya.

cara izin memasukkan minuman keras maupun pengawasan Untuk mengantisipasi hal ini perlu diatur tata pembatasan dan pengawasan yang seksama.

disebabkan pemakaian dan pengadaan minuman keras tanpa keterlibatan masyarakat akan terganggu. Hal ini atau kuantitasnya. Akibatnya situasi keamanan dan besaran tanpa adanya pengawasan yang menekan jumlah akan terjadi pemakaian minuman keras secara besar-keras itu sendiri. Apabila hal ini tidak diatur maka persaingan diantara para pedagang atau pengecer minuman yang mendatangkan minuman keras maupun adanya adanya permainan yang tidak sehat dari para pengusaha kemudian hari. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah

1. Surat izin sebagai pedagang minuman keras dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;
 2. Surat penunjukan sebagai Stockist/distributor daerah dari pabrik/distributor umum minuman keras;
 3. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat setelah dikordinasikan dengan Kapolres setempat yang memuat pertambangan jumlah dan jenis minuman keras yang dapat dimasukkan sesuai kondisi daerah ;
 4. Foto copy akte pendirian perusahaan yang dilegalisir oleh pejabat pembuat akte ;
 5. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dilegalisir oleh instansi berwenang dan Surat Tanda Daftar Perusahaan ;
 6. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;
 7. Surat fiskal antar daerah ;
 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Izin tersebut diberikan kepada :
- a. Perusahaan Daerah ;
 - b. Perseroan Terbatas (PT), yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia dan mempunyai cabang di wilayah daerah serta bergerak di bidang usaha perdagangan.

c. CV atau Firma yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berkedudukan di wilayah daerah dan bergerak di bidang perdagangan.

Setelah semua persyaratan izin tersebut dilengkapi dan memenuhi persyaratan maka Gubernur Kepala Daerah memberikan izin dalam bentuk Keputusan. Izin ini diberikan untuk jangka waktu satu tahun kemudian dapat diperpanjang kembali. Perpanjangan ini diajukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa izin yang lalu berakhir. Izin tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain dengan cara apapun, dan jumlah minuman keras yang dimasukkan tidak boleh melebihi dari jumlah yang ditetapkan dalam izin. Kepada pemegang izin dikenakan pungutan retibusi atas izin, dan wajib mencantumkan label perusahaan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala pada setiap botol/kaleng minuman keras yang dimaksud. Izin sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Gubernur Kepala Daerah apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran-pelanggaran, atau atas permintaan sendiri.

Ketentuan pidana dikenakan kepada sipelanggarnya dengan ancaman pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,-- (Lima puluh ribu rupiah). Atau minuman keras itu

Oleh karena itu dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu instansi pemerintah terkait.

Oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan an minuman beralkohol dilakukan secara terkoordinasi hal pelaksanaan pengawasan dan pengendalian beredar- dijual dalam wilayah Indonesia. Demikian pula dalam produksi dalam negeri yang boleh diperdagangkan atau dijual di Indonesia, maupun jenis minuman keras ditetapkan jenis minuman apa yang boleh diimpor untuk perindustrian dan perdagangan juga menentukan/me- Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Menteri beralkohol di dalam negeri harus mendapat izin dari menyebutkan bahwa produksi atau pembuatan minuman Pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol Menurut Kepres nomor 3 Tahun 1997 tentang

Menyadari betapa berat dan sangat luasnya akibat yang ditimbulkan oleh penggunaan dan penyalahgunaan minuman keras, maka perlu adanya peraturan pengendalian produksi, pengedaran, dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras.

b. Pengawasan Peredaran Minuman Keras

dimusnahkan apabila pemasukannya tanpa izin Gubernur Kepala Daerah.

lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota pada
Kepala Daerah Tingkat II. Tempat-tempat tertentu
lainnya itu tidak boleh berdekatan dengan tempat
peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi
tertentu lainnya.

Dalam Perda Nomor 11 tahun 1994 Daerah
Tingkat I Irian Jaya menegaskan bahwa pengawasan
pemasukkan dan peredaran minuman keras di daerah
dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah. Untuk
membantu kelancaran pelaksanaan pengawasan ini
Gubernur dibantu oleh instansi terkait.

Tindakan pengawasan yang dilakukan Gubernur
Irian Jaya terhadap peredaran minuman keras di
wilayah Propinsi Irian Jaya adalah sesuai dengan
Tindakan pengawasan yang dilakukan Gubernur
dizinkan oleh Gubernur untuk mengedarkan minum-
an keras di wilayah Irian Jaya ;

(2) Penetapan kuota dimaksudkan untuk pembatasan jum-
lah minuman keras di Irian Jaya ;

(3) Pengenaan tanda pengendali dimaksudkan untuk alat
pengawasan peredaran minuman keras di lapangan.

Memang diakui bahwa tugas pengawasan peredar-
an minuman keras ini cukup berat, karena meskipun
sudah ada larangan memasukkan minuman keras tanpa
izin tetapi toh masih ada saja orang mendatangkan.

Demikian juga pada waktu-waktu tertentu oleh pemerintah daerah dengan tegas melarang peredaran atau penjualan minuman keras di seluruh kota jayapura, tetapi kelihatannya ada orang tetap mabuk. Ini memang masalah yang perlu diatasi, oleh karena itu dalam tugas pengawasan ini perlu dilakukan cara terkoordinasi dengan baik antar instansi terkait.

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan pengawasan terhadap pemasukkan dan peredaran minuman keras sangat penting, karena apabila pengawasan dilakukan secara sistematis, kontinyu dan terarah, berarti merupakan langkah awal keberhasilan untuk menekan para pemakai minuman keras secara berlebihan, sekaligus tidak memberi peluang untuk terjadinya tindak pidana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV

A. Data Tindak Pidana Akibat Pengaruh Alkohol/Minuman Keras

Minuman keras atau alkohol merupakan suatu persoalan yang harus diperhatikan sebagai bagian tak terpisahkan dari perilaku menyimpang oleh para pemakainya. Dia (minuman keras) akan menjadi masalah apabila disalahgunakan oleh para pemakainya, artinya digunakan secara berlebihan sehingga menimbulkan berbagai persoalan, antara lain keterlibatan umum terganggu, kenyamanan masyarakat tidak tenang, dan berbagai tindak pidana lainnya.

Di Indonesia memang belum menaruh perhatian yang sungguh terhadap penyalahgunaan minuman keras dengan terjadinya tindak kriminal. Belum ada data penelitian atau laporan tentang jumlah peminum minuman keras dalam hubungan dengan terjadinya tindak pidana (W. Kusumah, 1988 : 85).

Di Irian Jaya - khususnya Jayapura hal yang demikian ini pun sama, belum ada pencatatan yang baik (lengkap) terhadap masalah ini. Padahal orang menyalahgunakan minuman keras selalu ada saja, peredaran dan penjualan minuman keras terlalu banyak, baik yang resmi maupun yang tidak resmi.

Dalam hal minuman keras ini Penda melihatnya dalam kaitan dengan income (pendapatan asli daerah), sedangkan pihak keamanan memandangnya dalam hubungan dengan gangguan kriminalitas.

Kapolda Irian Jaya Brigjen. Pol. Drs. Sjahrel Achmad mengatakan bahwa dari 173 kasus yang ada, terdapat beberapa jenis kasus yang dikatakan rawan di Irian Jaya, antara lain : sara, kerusakan/demonstrasi, pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan kejahatan susila. Khusus mengenai penganiayaan, pencurian dan kejahatan susila, umumnya disebabkan oleh karena minuman keras. Untuk mengantisipasi hal itu, Kapolda Irian Jaya dan Gubernur Irian Jaya telah mengambil kebijaksanaan bersama perihal pengawasan terhadap para distributor yang memasukkan minuman keras ke Irian Jaya (Cendrawasih Pos, 19 Maret 1997).

Dalam hal pengawasan terhadap minuman keras Pold Irian Jaya dan jajarannya di daerah-daerah telah melakukan operasi-operasi secara wilayah maupun secara terpusat. Operasi itu dikenal dengan operasi Kasusasi untuk melakukan pengawasan dan penertiban tempat-tempat penjualan minuman keras demi terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat (Wawancara dengan Kaditserse Pold Iria Kol. Pol. Drs. L.P. Siagian, 5 Maret 1997).

Untuk mengetahui banyaknya tindak pidana kekerasan yang terjadi akibat pengaruh penyalahgunaan

alkohol, maka perlu diadakan penelitian untuk memperoleh data. Dari data ini akan diketahui daerah atau lokasi mana saja di wilayah Kotamadya Jayapura rawan minuman keras dalam kaitan dengan terjadinya tindak pidana.

Data yang disajikan di sini merupakan hasil penelitian yang dilakukan penulis di tiga Kecamatan yang berada di kotamadya Jayapura, yaitu Kecamatan Jayapura Utara, Kecamatan Jayapura Selatan, dan Kecamatan Abepura, kemudian dilengkapi pula dengan data dari Polres Jayapura.

1. Di Kecamatan Jayapura Utara

Data tindak pidana kekerasan akibat penyalahgunaan minuman keras di Kecamatan Jayapura utara menunjukkan perkembangan naik turun (dalam arti tidak tetap).

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di Polsek Jayapura Utara menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana yang terjadi dan dilaporkan pada tahun 1992 sebanyak 6 perkara, tahun 1993 sebanyak 14 perkara, tahun 1994 sebanyak 12 perkara, tahun 1995 sebanyak 24 perkara, dan tahun 1996 sebanyak 9 perkara.

Untuk lebih jelasnya, mengenai jenis-jenis tindak pidana kekerasan yang terjadi akibat pe-

nyalahgunaan minuman keras sebagaimana disebutkan di atas, dapat dilukiskan dalam tabel di bawah ini.

TABEL 3

TINDAK PIDANA KEKERASAN AKIBAT PENGARUH
ALKOHOL/MIRAS DI WILAYAH HUKUM
POLSEK JAYAPURA UTARA
LIMA TAHUN TERAKHIR 1992-1996

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah/Tahun					Jumlah
		1992	1993	1994	1995	1996	
1	Pembunuhan	-	-	-	-	-	-
2	Pencurian	5	3	1	2	3	14
3	Penganiayaan	-	6	9	21	5	41
4	Perkosaan	-	-	-	-	-	-
5	Perzinahan/cabul	1	3	1	1	1	7
6	Pengrusakan	-	2	1	-	-	3
T o t a l		6	14	12	24	9	65

Sumber : Polsek Jayapura Utara, 1997
(Diolah kembali)

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada jenis tindak pidana tertentu yang dalam perkembangan selama lima tahun berturut-turut (1992-1996) tidak terjadi kasus. Dan ada juga hanya terjadi tiga kasus selama lima tahun tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kasus tindak pidana akibat pengaruh alkohol/minuman keras dalam perkembangan dapat dianalisis bahwa :

(1) Tindak pidana pembunuhan selama lima tahun berturut-turut (1992-1996) tidak ada kasus pem-

bunuhan yang terjadi akibat penyalahgunaan minuman keras.

(2) Tindak pidana pencurian dalam perkembangannya dapat dirinci sebagai berikut, tahun 1992 terjadi 5 kasus, tahun 1993 turun menjadi 3 kasus, tahun 1994 hanya 1 kasus, tahun 1995 naik menjadi 2 kasus, kemudian naik menjadi 3 kasus pada tahun 1996.

(3) Penganiayaan pada tahun 1992 tidak terjadi kasus, tahun 1993 terjadi 6 kasus, tahun 1994 naik menjadi 9 kasus, tahun 1995 naik menjadi 21 kasus, kemudian menjadi 5 kasus pada tahun 1996. (4) Tindak pidana perkosaan selama lima tahun berturut-turut (1992-1996) tidak terjadi kasus.

(5) Tindak pidana perzinahan/cabul ada tahun 1992 terjadi 1 kasus, tahun 1993 naik menjadi 3 kasus, kemudian pada tahun 1994, 1995 dan 1996 masing-masing terjadi 1 kasus.

(6) Tindak pidana pengrusakan pada tahun 1992 tidak terjadi kasus, tahun 1993 terjadi 2 kasus, tahun 1994 turun menjadi 1 kasus, dan pada tahun 1995 dan tahun 1996 tidak terjadi kasus.

Dari data yang dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana kekerasan yang paling banyak terjadi akibat penyalahgunaan minuman keras/alkohol adalah penganiayaan, dan yang

paling sedikit atau tidak pernah terjadi adalah pembunuhan.

2. Di Kecamatan Jayapura Selatan

Data tindak pidana kekerasan akibat penyalahgunaan minuman keras di Kecamatan Jayapura Selatan menunjukkan perkembangan naik turun (dalam arti tidak tetap). Bahkan ada jenis tindak pidana tertentu yang tidak terjadi sama sekali selama lima tahun terakhir.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di Polsek Jayapura Selatan selama lima tahun terakhir (1992-1996) menunjukkan bahwa pada tahun 1992 jumlah tindak pidana yang terjadi dan dilaporkan sebanyak 47 perkara, pada tahun 1993 sebanyak 78 perkara, tahun 1994 sebanyak 44 perkara, tahun 1995 sebanyak 50 perkara, dan tahun 1996 sebanyak 64 perkara.

Untuk lebih jelasnya mengenai jenis-jenis tindak pidana kekerasan yang terjadi akibat penyalahgunaan minuman keras sebagaimana disebutkan di atas, dapat dilukiskan dalam tabel di bawah ini.

TABEL 4
TINDAK PIDANA KEKERASAN AKIBAT PENGARUH
ALKOHOL/MIRAS DI WILAYAH HUKUM
POLSEK JAYAPURA SELATAN
LIMA TAHUN TERAKHIR 1992-1996

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah/Tahun					Jumlah
		1992	1993	1994	1995	1996	
1	Pembunuhan	-	-	-	-	-	-
2	Pencurian	21	27	18	30	31	127
3	Penganiayaan	8	31	18	12	19	88
4	Perkosaan	4	2	2	2	2	12
5	Perzinahan	6	3	2	1	-	12
6	Kesusilaan/cabul	4	6	3	4	4	21
7	Pengrusakan	4	9	1	1	8	23
T o t a l		47	78	44	50	64	283

Sumber : Polsek Jayapura Selatan, 1997
(Dilolah kembali)

Tabel di atas menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan yang terjadi akibat penyalahgunaan minuman keras/alkohol di Kecamatan Jayapura Selatan lebih meningkat atau lebih banyak dibandingkan dengan kedua kecamatan lainnya.

Tindak pidana kekerasan tersebut dapat dianalisis bahwa :

(1) Tindak pidana pembunuhan selama lima tahun terakhir (1992-1996) tidak ada kasus pembunuhan yang terjadi akibat penyalahgunaan minuman

keras.

- (2) Tindak pidana pencurian dalam perkembangannya dapat dirinci sebagai berikut ; pada tahun 1992 terjadi 21 kasus, tahun 1993 naik menjadi 27 kasus, tahun 1994 turun menjadi 18 kasus, tahun 1995 naik menjadi 30 kasus, dan tahun 1996 naik lagi menjadi 31 kasus.
- (3) Tindak pidana penganiayaan pada tahun 1992 terjadi 8 kasus, tahun 1993 naik menjadi 31 kasus, tahun 1994 turun menjadi 18 kasus, tahun 1995 turun lagi menjadi 12 kasus, dan pada tahun 1996 naik menjadi 19 kasus.
- (4) Tindak pidana perkosaan pada tahun 1992 terjadi 4 kasus, kemudian pada tahun 1993, 1994, 1995 dan 1996 masing-masing terjadi 1 kasus.
- (5) Tindak pidana perzinahan pada tahun 1992 terjadi 6 kasus, tahun 1993 turun menjadi 3 kasus, tahun 1994 turun lagi menjadi 2 kasus, tahun 1995 hanya 1 kasus, dan tahun 1996 tidak terjadi kasus.
- (6) Tindak pidana kesusilaan/cabul pada tahun 1992 terjadi 4 kasus, tahun 1993 naik menjadi 6 kasus, tahun 1994 turun menjadi 3 kasus, tahun 1995 naik menjadi 4 kasus, dan tahun 1996 tetap 4 kasus.
- (7) Tindak pidana pengrusakan pada tahun 1992 terjadi 4 kasus, tahun 1993 naik menjadi 9 kasus,

tahun 1994 turun menjadi 1 kasus, tahun 1995 tetap 1 kasus, dan tahun 1996 naik menjadi 8 kasus.

Dari data yang dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana kekerasan akibat penyalahgunaan minuman keras yang paling banyak terjadi adalah pencurian, dan yang paling sedikit atau tidak pernah terjadi adalah pembunuhan.

3. Di Kecamatan Abepura

Data tindak pidana kekerasan akibat penyalahgunaan minuman keras di kecamatan Abepura menunjukkan perkembangan naik turun (dalam arti tidak tetap).

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di Polsek Abepura selama lima tahun terakhir (1992-1996) menunjukkan bahwa pada tahun 1992 jumlah tindak pidana yang terjadi dan dilaporkan sebanyak 16 perkara, tahun 1993 sebanyak 8 perkara, tahun 1994 sebanyak 16 perkara, tahun 1995 sebanyak 13 perkara, dan tahun 1996 sebanyak 15 perkara.

Untuk lebih jelasnya mengenai jenis-jenis tindak pidana kekerasan yang terjadi akibat penyalahgunaan minuman keras sebagaimana disebutkan di atas dapat dilukiskan dalam tabel di bawah ini.

TABEL 5

TINDAK PIDANA KEKERASAN AKIBAT PENGARUH
ALKOHOL/MIRAS DI WILAYAH HUKUM
POLSEK ABEPURA
LIMA TAHUN TERAKHIR 1992-1996

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah/Tahun					Jumlah
		1992	1993	1994	1995	1996	
1	Pembunuhan	-	-	-	1	1	1
2	Pencurian	5	3	4	5	3	20
3	Penganiayaan	7	5	8	8	7	35
4	Perkosaan	-	-	1	-	2	3
5	Perzinahan/cabul	2	-	2	-	1	5
6	Pengrusakan	2	-	1	-	1	4
T o t a l		16	8	16	13	15	68

Sumber : Polsek Abepura, 1997.
(Dilolah kembali)

Tabel di atas menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan yang terjadi di Kecamatan Abepura akibat penyalahgunaan minuman keras/alkohol tidak teratur, karena ada jenis tindak pidana selama lima tahun terakhir hanya terjadi satu kasus, dan ada juga tiga kasus dan seterusnya.

Tindak pidana kekerasan tersebut dapat diana-
lisis sebagai berikut :

(1) Tindak pidana pembunuhan selama lima tahun ter-
akhir (1992-1996) hanya terjadi satu kasus.

(2) Tindak pidana pencurian pada tahun 1992 terjadi
5 kasus, tahun 1993 turun menjadi 3 kasus, tahun
1994 naik menjadi 4 kasus, tahun 1995 naik lagi

menjadi 5 kasus, dan tahun 1996 turun menjadi 3

kasus.

(3) Tindak pidana penganiayaan tahun 1992 terjadi 7 kasus, tahun 1993 turun menjadi 5 kasus, tahun 1994 naik menjadi 8 kasus, tahun 1995 tetap menjadi 8 kasus, dan tahun 1996 turun menjadi 7 kasus.

(4) Tindak pidana perkosaan pada tahun 1992, 1993 tidak terjadi kasus, tahun 1994 hanya terjadi 1 kasus, kemudian pada tahun 1995 juga tidak terjadi kasus, dan tahun 1996 terjadi 2 kasus.

(5) Tindak pidana perzinahan/cabul pada tahun 1992 terjadi 2 kasus, tahun 1993 tidak terjadi kasus, tahun 1994 terjadi 2 kasus, tahun 1995 juga tidak terjadi kasus, dan tahun 1996 hanya terjadi 1 kasus.

(6) Tindak pidana pengrusakan pada tahun 1992 terjadi 2 kasus, tahun 1993 dan tahun 1995 tidak terjadi kasus, sedangkan tahun 1994 dan 1996 masing-masing hanya terjadi 1 kasus.

Dari data yang dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di Kecamatan Abepura tindak pidana kekerasan yang paling banyak terjadi akibat penyalahgunaan minuman keras adalah penganiayaan, dan yang paling sedikit adalah pembunuhan.

1). Selanjutnya, data kuantitatif dari ketiga kecamatan tersebut kita hitung per Kotamadia Jayapura selama lima tahun terakhir (1992-1996) maka akan disusun sebagai berikut :

- a. Di Kecamatan Jayapura Utara terjadi 65 kasus
- b. Di Kecamatan Jayapura Selatan terjadi 283 kasus
- c. Di Kecamatan Abepura terjadi 68 kasus.

Di sini dimaksudkan untuk mengetahui tindak pidana kekerasan akibat penyalahgunaan minuman keras yang terjadi di Kotamadia Jayapura, berupa : pembunuhan, pencurian, penganiayaan, perkosaan, perzinahan/cabul/susila, dan pengrusakan. Data ini setelah dihitung frekuensi dan persentasenya kemudian dianalisis. Analisisnya adalah menggunakan analisis perbandingan, yaitu membandingkan dua atau tiga hal/komponen untuk mengetahui selisih atau rasionya, kemudian menyimpulkan. Juga membandingkan suatu komponen dengan keseluruhan komponen untuk mengetahui komponen mana yang menonjol (Supranto, 1995 : 76).

Untuk itu data tersebut dapat disajikan dalam tabel di bawah ini.

FREKUENSI TINDAK PIDANA KEKERASAN AKIBAT
PENYALAHGUNAAN MIRAS DI KODIA JAYAPURA
LIMA TAHUN TERAKHIR 1992-1996

TABEL 6

No.	L o k a s i	Frekuensi (f)	Prosentase (F)
1	Kecamatan Jayapura Utara	65	15,62 %
2	Kecamatan Jayapura Selatan	283	68,03 %
3	Kecamatan Abepura	68	16,35 %
J u m l a h		416 (N)	100,00 %

Sumber : Diolah kembali dari tabel 3, 4 dan 5.

Dengan melihat data tersebut dapat dianalisis bahwa tindak pidana kekerasan akibat penyalahgunaan minuman keras di Kotamadia Jayapura lebih banyak terjadi di Kecamatan Jayapura Selatan, yaitu sebanyak 283 kasus, kemudian disusul Kecamatan Abepura sebanyak 68 kasus, dan yang terakhir Kecamatan Jayapura Utara sebanyak 65 kasus. Dengan perbandingan antara Kecamatan Jayapura Selatan dengan Kecamatan Abepura selisih 215 kali, rasio 4,16, sedangkan dengan Kecamatan Jayapura Utara selisih 218 kali, rasio 4,35.

Jadi dari 416 kasus yang terjadi di Kotamadia Jayapura lebih banyak terjadi di Kecamatan Jayapura Selatan, yaitu sebanyak 283 kali (= 68,03%), sedangkan di Kecamatan Abepura sebanyak 68 kali (= 16,35%), dan di Kecamatan

Jayapura Utara sebanyak 65 kali (= 15,62%). Kesimpulan : Di Kecamatan Jayapura Selatan lebih rawan dari pada Kecamatan Abepura dan Kecamatan Jayapura Utara, dengan tingkat kerawanan di Jayapura Selatan 4,16 kali dari Kecamatan Abepura, dan 4,35 kali dari Kecamatan Jayapura Utara. Keputusan : Di Kecamatan Jayapura Selatan perlu diadakan pengawasan dan penerbitan terhadap para pedagang dan penjual minuman keras, termasuk jam-jam penjualannya, operasi keamanan lebih diintensifkan, serta penambahan petugas patroli.

Dari analisis data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang terjadi semunya karena pengaruh alkohol, sehingga dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang erat antara minuman keras/alkohol dengan tindak pidana kekerasan yang terjadi di Kotamadya Jayapura.

2) Kemudian untuk mengetahui tingkat perkembangan rata-rata per tahun dari tindak pidana kekerasan akibat pengaruh minuman keras tersebut, maka akan dikemukakan data berikut ini. Data ini diolah dari tabel 3, 4, dan 5 yang nantinya akan disusun dalam bentuk tabel untuk menentukan perkembangan rata-rata per tahun.

Data tersebut disusun berdasarkan perkembangan selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 1992 sampai tahun 1996.

1. Tahun 1992 tindak pidana yang terjadi dan dilaporkan adalah pembunuhan tidak ada kasus, pencurian 31 kasus, penganiayaan 15 kasus, perkosaan 4 kasus, zina/cabul/susila 13 kasus, dan pengrusakan 6 kasus (jumlah = 69 kasus).

2. Tahun 1993 tindak pidana yang terjadi dan dilaporkan adalah pembunuhan tidak ada kasus, pencurian 33 kasus, penganiayaan 42 kasus, perkosaan 2 kasus, zina/cabul/susila 12 kasus, dan pengrusakan 11 kasus (jumlah = 100 kasus).

3. Tahun 1994 tindak pidana yang terjadi dan dilaporkan adalah pembunuhan tidak ada kasus, pencurian 23 kasus, penganiayaan 35 perkosaan 3 kasus, zina/cabul/susila 8 kasus, dan pengrusakan 3 kasus (jumlah = 72 kasus).

4. Tahun 1995 tindak pidana yang terjadi dan dilaporkan adalah pembunuhan tidak ada kasus, pencurian 37 kasus, penganiayaan 41 kasus, perkosaan 2 kasus, zina/cabul/susila 6 kasus, dan pengrusakan 1 kasus (jumlah = 87 kasus).

5. Tahun 1996 tindak pidana yang terjadi dan dilaporkan adalah pembunuhan 1 kasus, pencurian 37 kasus, penganiayaan 31 kasus,

perkosaan 4 kasus, zina/cabul/susila 6 kasus, dan pengrusakan 9 kasus (jumlah = 88 kasus).

Dari data yang diuraikan di atas kemudian dituangkan/disusun dalam bentuk tabel untuk mengetahui perkembangan tindak pidana kekerasan akibat penyalahgunaan minuman keras di Kotamadia Jayapura. Tabel tersebut dapat disusun sebagai berikut.

TABEL 7
PERKEMBANGAN TOTAL TINDAK PIDANA
AKIBAT PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS
DI KODIA JAYAPURA
LIMA TAHUN TERAKHIR 1992-1996

Tahun	Total Tindak Pidana Per Tahun	Rata-rata Per Bulan	Prosentase
1992	69	5	-
1993	100	8	+ 44,93 %
1994	72	6	- 28,00 %
1995	87	7	+ 20,83 %
1996	88	7	+ 1,15 %
Rata-rata perkembangan per tahun			+ 9,73 %

Sumber : Diolah kembali dari tabel 3, 4 dan 5.

Tabel di atas menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan yang terjadi akibat penyalahgunaan minuman keras di Kotamadia Jayapura mengalami perkembangan naik turun, dalam arti naik, kemudian turun dan naik kembali. Tetapi perkembangan kenaikan dan penurunan ini tidak

terlalu menyolok.

Selanjutnya dapat dianalisis bahwa tindak pidana yang terjadi dan dilaporkan pada tahun 1992-1993 naik 31 kasus (+ 44,93%), tahun 1993-1994 turun 28 kasus (- 28%), tahun 1994-1995 naik 15 kasus (+ 20,83%), dan tahun 1995-1996 naik hanya 1 kasus (+ 1,15%).

Secara keseluruhan tindak pidana kekerasan yang terjadi akibat penyalahgunaan minuman keras selama lima tahun terakhir (1992-1996) sebanyak 416 kasus. Dengan perkembangan rata-rata per tahun + 9,73%.

Dengan melihat jumlah tindak pidana kekerasan yang terus meningkat (walaupun peningkatan-nya tidak terlalu menyolok) seperti yang terlihat pada tabel 7 di atas, maka sudah jelas bagi kita atau setidaknya-tidaknya dapat dibuktikan bahwa penyalahgunaan minuman keras mempunyai hubungan untuk terjadinya tindak pidana kekerasan di Kotamadya Jayapura. Singkatnya, penyalahgunaan minuman keras mempunyai kaitan erat dengan terjadinya tindak pidana.

4. Di Polres Jayapura

Data yang dikemukakan di sini khusus mengenai tindak pidana pemabukan, yaitu perbuatan

orang masuk yang mengganggu ketertiban umum, menghalangi lalu lintas, mengancam keamanan orang lain, masuk dijalan umum, dan membuat keonaran lainnya. Peraturan mereka ini dikenakan Pasal 492 dan Pasal 536 KUHP, yang pemrosesannya dikategori kan dalam tindak pidana ringan.

Data yang dihimpun penulis dari Polres Jayapura selama lima tahun terakhir (1992-1996) menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana pemabukan yang terjadi dan dilaporkan pada tahun 1992 sebanyak 37 kasus, tahun 1993 sebanyak 262 kasus, tahun 1994 sebanyak 279 kasus, tahun 1995 sebanyak 77 kasus, dan tahun 1996 sebanyak 32 kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilukiskan dalam bentuk tabel di bawah ini.

TABEL 8

PERKEMBANGAN JUMLAH TINDAK PIDANA PEMABUKAN
DI WILAYAH HUKUM POLRES JAYAPURA
LIMA TAHUN TERAKHIR 1992-1996

Tahun	Jumlah Tindak Pidana Pemabukan	Rata-rata Per Bulan	Prosentase
1992	37	3	-
1993	262	21	+ 608,11 %
1994	279	23	+ 6,49 %
1995	77	6	- 72,40 %
1996	32	2	- 58,44 %
Rata-rata perkembangan per tahun			+ 120,94 %

Sumber : Polres Jayapura, 1997
(Diolah kembali)

Dari data tabel tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pemabukan di Kodia Jayapura tingkat perkembangannya naik dan turunnya sangat menyolok, dalam arti naiknya sangat tinggi dan turunnyaapun sangat drastis. Dan kalau dianalisis terlihat bahwa pada tahun 1992 terjadi 37 kasus dan tahun 1993 terjadi 262 kasus, berarti naik 225 kasus atau + 608,11%; tahun 1993 terjadi 262 kasus dan tahun 1994 terjadi 279 kasus, naik 17 kasus atau + 6,49%; tahun 1994 terjadi 279 kasus dan tahun 1995 terjadi 77 kasus, berarti turun 202 kasus atau - 72,40%; tahun 1995 terjadi 77 kasus dan tahun 1996 terjadi 32 kasus, turun 45 kasus atau - 58,44%.

Secara keseluruhan tindak pidana pemabukan di Kodia Jayapura selama lima tahun terakhir (1992-1996) sebanyak 687 kasus. Dengan perkembangan rata-rata per tahun + 120,94%. Memang kalau dilihat dari perkembangan rata-rata sangat tinggi, tetapi bila dilihat dari tingkat kejadiannya sudah mulai menurun pada dua tahun terakhir. Hal ini disebabkan pihak keamanan (Polisi) dengan berbagai kebijakan untuk menanggulangi dan memberantas masalah mabuk-mabukan ini, siapapun yang mabuk di jalan/tempat umum, langsung ketertiban umum langsung

ditangkap dan diproses. Pemerintah Daerah Kodia Jayapura (Walikota) juga mengeluarkan kebijakan, bahwa dalam rangka pengamanan Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998 dilarang memasukkan minuman keras ke Jayapura. Tetapi, apakah setelah Sidang Umum MPR 1998 masalah mabuk-mabukan bertambah lagi atau berkurang, kita tunggu saja.

Perlu diketahui bahwa dari delapan jenis tindak pidana ringan, pemabukan menempati urutan pertama, sebanyak 687 kasus, urutan kedua penganiayaan ringan sebanyak 374 kasus, urutan ketiga penghinaan ringan sebanyak 45 kasus, dan seterusnya ..., sampai urutan terakhir penipuan ringan satu kasus. Data ini dihitung dari lima tahun terakhir (1992-1995) dari bagian Sabara Polres Jayapura.

Sedangkan mengenai tindak kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Jayapura, dari 27 jenis tindak pidana (kejahatan), tidak pidana akibat minuman keras (416 kasus) menempati urutan ketiga setelah pencurian (627 kasus) sebagai urutan pertama, dan penganiayaan (609 kasus) menempati urutan kedua. Data ini dihitung dari lima tahun terakhir 1992-1996 di Polres Jayapura.

B. Data Minuman Keras Yang Beredar Di Kotamadia Jayapura

Pada bagian ini akan diuraikan tentang banyaknya minuman keras yang beredar di Kotamadia Jayapura beserta perusahaan pemasok. Di Jayapura saat ini sudah semakin banyak tempat-tempat hiburan yang tentunya memerlukan minuman keras.

Di kota Jayapura bisnis di bidang jasa kian laris, dimana-mana ada kafetaria, bar, rumah makan yang dilengkapi dengan karaoke. Terkadang kafetaria berubah fungsi menjadi jualan minuman keras. Bahkan untuk membuat daya tarik, hampir setiap kafetaria dan bar ada pelayan perempuan. Terkadang para perempuan ini berfungsi ganda. Ini bukan rahasia lagi.

Dengan maraknya bisnis jasa ini dibarengi dengan pencuatnya peredaran minuman keras yang semakin berkembang, yang ujung-ujungnya berakhir dengan gangguan kriminalitas.

Kapolda Irian Jaya, Brigjen Pol. Drs. Sjahrel Achmad menegaskan bahwa pihak Polri akan menindak tegas pengusaha bar, diskotik, restoran karaoke, rumah makan, dan pengusaha lainnya yang tidak mematuhi peraturan penjualan minuman keras. Hal itu ditegaskan kapolda baru-baru ini dalam pertemuan dengan 34 pengusaha bar, diskotik, restoran karaoke, rumah makan dan pengusaha lainnya se-Jayapura. Menurut Kapolda bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi tindak kriminalitas yang faktor

Berdasarkan Keputusan Gubernur Irian Jaya No. 88 Tahun 1996 disebutkan bahwa PT. Bessiana Catur Prutama memasok minuman keras golongan A jenis bir anker untuk Kodia Jayapura sebanyak 50.000 karton. Satu karton berisi 24 botol. Jadi bir anker yang beredar di Kodia Jayapura sebanyak 1.200.000 botol. Sedangkan PT. Irian Jaya Sehat berdasarkan Keputusan Gubernur Irian Jaya No. 227 tahun 1996 memasok minuman keras golongan A jenis bir bintang dan bir Guinness untuk Kodia Jayapura

memasok bir anker. PT. Bessiana Catur Prutama memasok minuman keras golongan A jenis bir. PT. Irian Jaya Sehat memasok minuman keras jenis bir bintang dan bir Guinness, sedangkan PT. Bessiana Catur Prutama memasok minuman keras golongan A jenis bir. PT. Irian Jaya Sehat (BCP). Kedua perusahaan ini khusus untuk Prutama PT. Irian Jaya Sehat dan PT. Bessiana Catur Prutama ada dua perusahaan memasok, Untuk Kodia Jayapura

perusahaan memasok. Untuk Kodia Jayapura ada dua perusahaan memasok, yaitu PT. Irian Jaya Sehat dan PT. Bessiana Catur Prutama (BCP). Kedua perusahaan ini khusus untuk PT. Irian Jaya Sehat memasok minuman keras golongan A jenis bir. PT. Irian Jaya Sehat memasok minuman keras jenis bir bintang dan bir Guinness, sedangkan PT. Bessiana Catur Prutama memasok minuman keras golongan A jenis bir anker untuk Kodia Jayapura sebanyak 50.000 karton. Satu karton berisi 24 botol. Jadi bir anker yang beredar di Kodia Jayapura sebanyak 1.200.000 botol. Sedangkan PT. Irian Jaya Sehat berdasarkan Keputusan Gubernur Irian Jaya No. 227 tahun 1996 memasok minuman keras golongan A jenis bir bintang dan bir Guinness untuk Kodia Jayapura

penyebab utamanya adalah minuman beralkohol, sehingga tindak kriminal yang mengganggu ketertiban umum lebih banyak disebabkan mabuk akibat minum minuman keras (Cenderawasih Pos, 16 April 1997). Tampaknya, persoalan memasokkan minuman keras ke wilayah Irian Jaya dan pederanya mendapat sorotan. Pasalnya, sebagian besar tindak kriminal di daerah ini bersumber dari minuman keras. Walaupun begitu, pihak pemerintah daerah masih terus memberikan izin kepada perusahaan memasok.

sebanyak 50.000 karton. Kemudian PT. Irian Jaya Sehat menambah lagi 3.362 karton bir bintang dan bir Guinness berdasarkan Surat Gubernur Irian Jaya Nomor 503/2036/SET/96. Surat Keputusan tambahan yang terakhir inilah yang dinilai sementara pihak sudah melebihi kuota. Karena kuota untuk Jayapura tahun 1996 hanya 100.000 karton. Berdasarkan dua SK Gubernur tersebut maka PT. Irian Jaya Sehat memasukkan bir bintang dan Guinness sebanyak 53.362 karton. Satu karton berisi 24 botol/kaleng, berarti 1.280.688 botol/kaleng yang beredar di Kotamadia Jayapura.

Jadi secara keseluruhan minuman keras golongan A jenis bir anker, bintang dan Guinness yang beredar di wilayah Kotamadia Jayapura sebanyak 2.480.68 botol atau kaleng.

Untuk lebih jelasnya dapat dirinci sebagai berikut :

1. PT. Bessiana Catur Pratama	1.200.000 botol
2. PT. Irian Jaya Sehat	1.280.688 botol/kaleng
Jumlah =	2.480.688 botol/kaleng

Jumlah inilah yang dikonsumsi oleh masyarakat Jayapura selama satu tahun (1996). Catatan : Disini belum termasuk minuman keras golongan B dan C, serta minuman keras yang dibuat secara tradisional.

Secara nasional data minuman keras golongan A menurut data Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Indonesia saat ini ada 8 produsen minuman keras golongan A yang memproduksi 140 juta liter minuman keras berkadar alkohol 1-5% per tahun (Gatra, 22 Februari 1997).

Dari jumlah itu Propinsi Irian Jaya menyeras 4.800.000 botol/kaleng atau 2.400.000 liter untuk tahun 1996. Dan khusus Kota Jayapura menyeras 2.480.688 botol/kaleng atau 1.240.344 liter untuk tahun 1996.

Dari jumlah ini apabila dihitung / diukur per jumlah penduduk Kotamadya Jayapura berarti setiap orang (penduduk) mengkonsumsi minuman keras jenis bir (anker, bintang, guinness) 6,6 liter per tahun. Di sini belum termasuk minuman keras golongan B dan C. Oleh karena itu perlu dibatasi masuknya minuman keras ke Irian Jaya.

Seperti dikatakan, dampak membantirnya minuman keras di Irian Jaya belakangan ini, mengakibatkan semakin bertambahnya jumlah tindak kriminal. Sehingga membuat sementara pejabat terkait angkat bicara, yang pada dasarnya menghimbau pemerintah (Gubernur Iria) untuk membatasi kuota minuman keras untuk periode tahun 1997. Hampir seluruh Bupati dan Kapolres minta kalau boleh izin yang diberikan dibatasi jumlahnya jauh di bawah kuota saat ini (Cendrawasih Pos, 24 Maret 1997).

Berkaitan dengan data minuman keras tersebut di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut sehubungan dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Kalau dalam pembangunan, sekaligus menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Padahal salah satu program pemerintah sekarang adalah menciptakan sumber daya manusia yang mampu mengantisipasi masa depan, mempunyai keahlian dibidang teknologi dan ilmu pengetahuan.

Oleh karena itu tidak ada jalan lain pemerintah harus menertibkan tempat penjualan minuman keras yang tersebar di wilayah Kodia Jayapura (terutama kios-kios di pinggiran kota). Menurut pengamatan penulis banyak kios-kios kecil penjual barang kelontongan tetapi di dalamnya juga jual minuman keras. Menurut penjelasan mereka soalnya jual minuman keras untung, apalagi sudah tengah malam harganya lebih mahal lagi.

Hal-hal yang demikian inilah membuat orang setiap hari mabuk, walaupun pada waktu-waktu tertentu pemerintah daerah melarang menjual minuman keras (untuk sementara).

C. Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Alkohol

1. Faktor Undang-Undang

Dilakui bahwa memang belum ada Undang-undang

Yang secara khusus mengatur masalah pemabukan atau penyalahgunaan alkohol. Masalah ini hanya diatur dalam beberapa pasal dalam KUHAP, yaitu Pasal 300; Pasal 492; Pasal 536; Pasal 537; Pasal 538; dan Pasal 539 KUHAP. Pasal-pasal tersebut tidak tegas dan sanksinya pun terlalu ringan. Apabila terjadi tindak pidana pemabukan, hakim memberi putusan terlalu ringan. Demikian juga terhadap pengusaha-pengusaha yang mendatangkan atau memasukkan minuman keras secara ilegal hukumannya pun terlalu ringan, paling-paling hanya denda.

Dengan sanksi pidana yang ringan ini membuat orang tidak jera, sehingga mereka minum dan erus minum. Hal ini secara langsung berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dan sekaligus akan menjurus kepada terjadinya berbagai tindak pidana.

Kalau dilihat pasal-pasal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat sekarang ini. Dalam arti pasal-pasal itu sudah tertinggal jauh dalam mengantisipasi masalah pemabukan, baik dilihat dari segi redaksional maupun sanksi atau ancaman pidananya.

Mabuk sekarang berbeda dengan mabuk pada zaman KUHAP dibuat, oleh karena itu perlu dipikirkan untuk meninjau kembali pasal-pasal tersebut. Menurut

penulis sebaiknya terhadap para pembuk dikenakan sanksi pidana yang tegas. Sekarang sudah ada Keppres yang disebut Keppres Miras (Nomor 3 tahun 1997). Hanya saja Keppres ini belum jelas atau tidak tegas karena di dalamnya tidak diatur ancaman sanksi pidananya. Oleh karena itu dalam perkembangan selanjutnya Keppres ini sebaiknya ditingkatkan saja menjadi undang-undang.

Sanksi pidana ini penting karena dia tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal, yaitu mencegah dan menanggulangi kejahatan. Orang atau sipelaku akan berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana lagi apabila sanksi pidana diterapkan dengan tegas.

J.M. Van Bemmelen mengatakan bahwa dengan adanya pidana orang lain dibuat takut untuk melakukan kejahatan (pencegahan umum), atau pun untuk menjaga supaya si pelaku menjauhkan diri dari tindakan yang seperti itu lagi (pencegahan khusus). (Van Bemmelen, 1984 : 27).

Demikian juga Roeslan - Saleh mengatakan bahwa :

...pidana sangat perlu karena pengaruh pidana itu bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat (Muladi dan Nawawi Arief, 1992 : 153)

Di sini Roeslan Saleh menghendaki harus ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan oleh si pelaku dan tidak boleh di-
biarkan begitu saja.

Dalam pasal-pasal sebagaimana yang telah disebutkan di atas mungkin hanya dua pasal saja yang dapat diberlakukan terhadap para pemabuk yang meng-
ganggu ketertiban umum, antara lain Pasal 492 dan
Pasal 536 KUHP, tetapi kelihatannya yang lebih
banyak diterapkan adalah Pasal 492 KUHP.

Pada bagian terdahulu telah disebutkan sanksi pidana yang ada dalam pasal 492 KUHP, yaitu hanya enam hari kurungan atau denda Rp. 375,-- bagi pelaku penyalahgunaan minuman keras yang menganggu ke-
tertiban umum, hal mana sudah tidak sesuai lagi
dengan kondisi di Irian Jaya.

Dengan sanksi yang ringan/lemah disertai dengan pemabukan itu sendiri merupakan perkara singkat, sehingga dalam kenyataannya tidak diterapkan secara efektif, dan yang bersangkutan tidak terlalu merasa berat atau tersiksa dengan hanya sanksi kurungan enam hari. Dari hasil penelitian (wawancara) mereka para pemabuk (responden) sekitar 10 persen mengatakan bahwa mabuk tidak masalah, paling-paling ditangkap dan dihukum satu minggu masuk penjara - itu soal biasa.

Perkara-perkara pemabukan dikategorikan

tindak pidana ringan sehingga penyelesaiannya pun tidak memakan waktu dan prosedur yang berbelit-belit. Data yang diperoleh dari pengadilan negeri Jayapura menunjukkan perkara pemabukan cukup banyak. Terhadap para pelakunya, oleh hakim dikenakan Pasal 536 dan Pasal 492 KUHP dengan hukuman penjara rata-rata enam sampai tujuh hari. Dengan hukuman enam hari ini para pemabuk tidak pernah merasa menyesal malah senang-senang saja.

Pada kesempatan ini dapat dikemukakan data perkara pemabukan yang disidangkan di pengadilan negeri Jayapura. Data tersebut diambil empat tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tahun 1993 sebanyak 188 perkara

Tahun 1994 sebanyak 208 perkara

Tahun 1995 sebanyak 121 perkara

Tahun 1996 sebanyak 32 perkara.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Dengan melihat data tersebut di atas memberi gambaran bahwa tingkat tindak pidana pemabukan yang masuk ke pengadilan negeri menunjukkan perkembangan naik dan turun dan terus menurun. Misalnya tahun 1993/1994 naik 20 perkara (10,63%), kemudian tahun 1994/1995 menunjukkan gejala menurun 87 perkara (-41,82%), dan terus menurun pada tahun 1995/1996 menjadi 89 perkara (-73,55%). Gejala penurunan ini disebabkan pemerintah (Polisi) terus menekan kebiasaan mabuk-mabukan dengan melakukan operasi terhadap orang-orang mabuk yang mengganggu ketertiban umum, dan juga melakukan pemberian hukuman terhadap tempat-tempat penjualan minuman keras. Kebiasaan mabuk-mabukan ini lebih banyak terjadi pada waktu habis bulan (terima gaji) maupun pada waktu hari raya Natal dan Tahun Baru. Mereka ini (para pemabuk) adalah tidak mempunyai pekerjaan

Sumber : Pengadilan Negeri Jayapura, 1997
(Ditolak kembali)

Tahun	Jumlah Kasus	Prosentase
1993	188 perkara	-
1994	208 perkara	+ 10,63 %
1995	121 perkara	- 41,82 %
1996	32 perkara	- 73,55 %

TABEL 9
JUMLAH TINDAK PIDANA PEMABUKAN
DI PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
TAHUN 1993-1996

tetap yang terdiri dari pemuda-pemuda tanggung
berumur rata-rata 20-35 tahun.

Berdasarkan data tabel tersebut di atas dapat
memberi gambaran kepada kita bahwa minuman keras
mempunyai pengaruh atau hubungan untuk terjadinya
tindak pidana pemabukan. Tindak pidana pemabukan
di sini dalam pengertian menggunakan keterlibatan umum,
merintangi lalu lintas, minum di tempat umum dan
lain-lain.

Undang-undang (KUHP) membedakan antara mabuk dan
kentara mabuk. Pasal 492 KUHP menyebutkan bahwa
mabuk adalah kebanyakan minum minuman keras,
sehingga tidak dapat menguasai lagi salah satu
pancainderanya atau anggota badanya. Sedangkan Pasal
536 KUHP menyebutkan bahwa kentara mabuk adalah
mabuk demikian rupa, sehingga terlihat dan dapat
diketahui oleh setiap orang dan menggunakan perasaan
pada orang-orang di sekitarnya.

Di Jayapura mabuk dan kentara mabuk ini
sedemikian meluas sehingga mengganggu kenyamanan
orang, turun ke jalan dan merintangi lalu lintas,
mabuk di pasar, di depan toko dan sebagainya. Dalam
situasi dan kondisi seperti ini aparat keamanan
(Polisi) segera bertindak mengamankan orang-orang
mabuk ini demi terjaminnya keamanan dan keterlibatan
dalam masyarakat.

Suatu Keputusan Mahkamah Agung Negeri Belanda yaitu Areerst Hoge Raad tanggal 11 Maret 1929, bahwa tugas Polisi itu meliputi mempertahankan ketertiban dan keamanan serta ketenteraman umum; dalam tugas ini termasuk pula menyebarkan orang-orang yang mabuk di jalan umum untuk dibawa dan ditahan di kantor Polisi. Setelah sembuh, lalu didengar keterangannya untuk dituntut (Soesilo, 1973 : 293).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemabukan tidak boleh diberikan berlaut-laut karena nantinya akan menimbulkan bahaya yang lebih besar.

Berpatokan pada data sebagaimana terlihat dalam tabel 8 dan tabel 9 menunjukkan bahwa tindakan pemabukan (mabuk-mabukan) sudah terlalu banyak. Hal ini menandakan bahwa ada orang yang berulang kali ditahan setelah keluar mabuk lagi, tidak jera. Ini berarti pasal-pasal dalam KUHP tersebut sanksinya sudah tidak efektif lagi dalam menangkai masalah pemabukan ini.

Oleh karena itu sebaiknya pemabukan ini dinyatakan (dikategorikan) sebagai tindak pidana biasa, jangan dimasukkan dalam tindak pidana ringan. Yang menjadi alasan penulis adalah :

1. Mabuk menimbulkan rasa takut bagi warga masyarakat (fear of crime).

Masyarakat pada umumnya mempunyai kegemaran untuk minum minuman keras atau alkohol. Sebelum Belanda masuk di Irian Jaya, masyarakat sudah mengenal minuman keras yang dibuat secara tradisional, yaitu yang disebut Sagner dan Bobo. Apabila ada pesta atau upacara adat di kampung-kampung harus ada minuman keras dan itu merupakan kebanggaan

2. Faktor Sosial Budaya (kebiasaan)

Hal-hal tersebut perlu dikemukakan untuk menjadi bahan pemikiran untuk menilai kembali pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang pemabukan, dan atau peraturan perundang-undangan lainnya. bentuk dan variasinya.

yang dapat menimbulkan kejahatan dalam berbagai holisme merupakan salah satu faktor kriminogen 4. W.A. Bongger berpendapat bahwa mabuk atau alko-jaya.

orang-orang Indonesia, lebih khusus lagi di Irian orang-orang Eropa, tidak memikirkan bentuk mabuk sekarang, hanya mereka membayangkannya tidak membayangkannya mabuk pada jaman modern 3. Pembentuk undang-undang (KUHP) pada waktu itu karena minuman keras.

2. Data menunjukkan bahwa tindak pidana yang terjadi di Jayapura 16,37 persen disebabkan oleh mabuk

tersendiri bagi penyelenggara pesta.

Minum minuman keras pada waktu pesta/acara adat harus teratur tidak boleh sembarangan, tata caranya diatur menurut adat. Sehingga orang minum bukan untuk mabuk-mabukan, apalagi berkelahi - itu dilarang keras. Dapat dikatakan bahwa minum minuman keras pada acara-acara adat dampak negatifnya tidak ada. Artinya tidak terjadi tindak kriminal, tidak ada gangguan ketertiban dan keamanan dalam kampung. Minum pada upacara/pesta adat semuanya diawasi oleh kepala suku.

Minuman keras dilihat dari segi tradisi digunakan dalam kehidupan masyarakat, baik digunakan sehari-hari maupun dalam upacara-upacara adat. Penggunaan minuman keras secara tradisional pada umumnya disertai norma-norma tertentu yang membatasi agar warga masyarakat tidak menggunakan secara berlebihan sampai mabuk-mabukan, meskipun pada masyarakat-sampai masyarakat tertentu (a.l. beberapa suku Dayak di Kalimantan) diperkenankan minum sampai mabuk asalkan hal itu dilakukan dalam forum resmi, yaitu pada waktu upacara. Penggunaan minuman keras secara tradisional mempunyai fungsi antara lain sebagai media yang dianggap dapat menghubungkan seseorang dengan makhluk-makhluk yang ada di alam gaib (salah

Sudjarwo Tjondronegoro mengatakan bahwa politik propaganda Belanda dengan menggunakan alkohol (minuman keras) telah banyak merusak sifat-sifat asli masyarakat Irian. Sebagian dari golongan masyarakat yang terdapat di kota-kota

(Cendrawasih Pos, 14 Mei 1997).

yang diijah untuk suatu jangka waktu yang lama Irian Jaya dengan tanpa gangguan apa-apa dari pihak dapat dan bisa melanjutkan kolonialisme di bumi memajukan daya pikir masyarakat Irian agar pihaknya Belanda menggunakan alkohol sebagai alat untuk mabuk. Disiniilah merupakan suatu cara pihak kolonial masyarakat. Sehingga dimana-mana terlihat orang sehingga dengan mudah dapat diperoleh/dibeli oleh bertambah. Minuman keras ini harganya sangat murah dan lain-lain sehingga masyarakat kegemarannya makin alkohol seperti bir, anggur, whisky, jenever, gin ini berlangsung terus sampai Belanda masuk ke Irian Jaya dengan memperkenalkan minuman keras atau Untuk masyarakat Irian Jaya, kebiasaan minum

Unen, 1991 : 6).

waktu pesta/upacara adat (Seminar Miras Polda Irja- sebagai sarana untuk menggalakan suasana pada kan diri di depan umum (pada waktu upacara adat), seseorang untuk lebih berani (percaya diri) menampilkan satu sarana meditasi), sebagai sarana untuk membantu

Masalah ini disengani bukan hanya oleh kalangan muda saja, melainkan juga digandrungi mereka yang sudah tua, anak-anak yang belum cukup umur, pegawai negeri/swasta. Mereka berdalih bahwa

bak sang kekasih yang sulit dilupakan begitu saja. Dan bagi mereka yang sudah kecanduan, minuman keras menghilangkan pikiran tegang dan melepaskan lelah, generasi penerusnya. Sebab, selain konon dapat keras yang dapat memabukkan lebih digandrungi oleh kebiasaan itu sulit dihilangkan bahkan minum minuman kebiasaan sejak nenek moyangnya. Sampai saat ini, Jaya bukan hal baru. Melainkan sudah menjadi Mabuk karena kebiasaan bagi masyarakat Irian memang sudah ada sebelumnya.

Minum ini tentunya melanjutkan kebiasaan minum yang macam-macam, termasuk berfikir politik. Kesenangan sedemikian rupa supaya jangan berfikir yang kesenangan atau hiburan, dan masyarakat dibuat Minum alkohol pada waktu itu hanya sebagai

kolonialnya (Tjondronegoro, 1977 : 33). karena nantinya dapat dipakai sebagai alat Belanda. Mereka dimanjakan (Verwend) oleh Belanda, makan keju seperti Belanda, bisa mabuk seperti diajari berpakaian seperti Belanda, berminum Bir dan tempat kekuasaan Belanda kolonial, dimana mereka

minum minuman keras itu memang perlu. Tak heran bila di kantor, di warung, bahkan sepanjang jalan raya pun mereka menggunakannya.

Dari hasil wawancara dengan responden banyak mengatakan (60 persen) bahwa minum minuman keras itu perlu dan sulit dihilangkan karena sudah menjadi kebiasaan dari dulu. Dan bahkan kalau tidak minum badan terasa sakit dan malas kerja (tidak ada semangat). Ada yang mengatakan sulit menghilangkan kebiasaan minum ini karena sejak muda (di bawah umur) sudah kenal alkohol.

Untuk menghilangkan kebiasaan jelek tersebut, tentu tidak segampang mengecat tembok. Begitu tembok dicat, kotoran yang menempel bisa hilang. Namun di sini perlu beberapa alternatif pencegahan dan penanggulangan yang positif, demi tercapainya pembangunan di segala sektor, khususnya membangun mental. Dikawatirkan, bila masalah ini tidak cepat ditanggulangi tidak menutup kemungkinan Irian Jaya, khususnya Jayapura akan rawan tindak kriminal.

Sekarang persolannya kita serahkan saja kepada pemerintah daerah. Hanya saja bila permasalahan ini dibiarkan begitu saja, kejadian lebih parah dan runyam tentu menyusulnya.

Ada satu contoh kasus menarik yang membuat orang geleng-geleng kepala terjadi di Jayapura.

Untuk kelancaran usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan, maka perlu mengalih sumber-sumber pendapatan daerah, antara lain memasukkan minuman keras. Untuk mengantisipasi hal tersebut Penda membuat kebijakan

3. Faktor Kebijakan Penda Irja (Perda)

Dimana minuman keras sudah masuk masyarakat di kampung-kampung di pedalaman, yaitu di Kecamatan Nimboran, sekitar 100 Km lebih dari kota Jayapura. Beberapa waktu lalu (1996) masyarakat Kecamatan Nimboran - Gayem meloloskan minuman keras masuk ke kampung dengan cara memasukkan dalam peti jenasah, kemudian ditutup dan dibungkus rapi lalu dimasukkan dalam mobil ambulans. Teknik ini dimaksudkan untuk bisa lolos dari pemeriksaan pos ABRI (tentara) di sepanjang jalan, karena di hutan-hutan ada pos-pos tentara dan setiap mobil yang lewat harus diperiksa KTP maupun barang-barang yang ada dalam mobil. Setelah sampai dekat pos tentara orang-orang yang ada dalam mobil menngis sesunggunya seakan-akan ada mayat benaran dalam peti jenasah (pada hal isinya miras), sehingga mobil tidak diperiksa lagi oleh tentara dan disuruh jalan terus. Loloslah mereka sampai kampung. Minuman keras tersebut adalah untuk pesta adat di kampung.

dengan mengeluarkan Perda Nomor 11 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pemasukkan Minuman Keras antar Pulau ke wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, dan Perda Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pajak Minuman Keras.

Perda Nomor 11 Tahun 1994 tersebut untuk menggantikan Perda Nomor 8 Tahun 1988 yang sebelumnya berupa Keputusan Gubernur Nomor 44 Tahun 1988 yang juga mengatur Tata Cara Pemasukkan Minuman Keras ke Wilayah Propinsi Irian Jaya. Sedangkan Perda Nomor 5 Tahun 1988 adalah untuk mengadakan perubahan dan perbaikan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pajak Minuman Keras, khusus mengenai beberapa ketentuan yang sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan pembangunan dewasa ini, dan perubahan tarif pajak atas ijin penjualan minuman keras. Perlu diketahui bahwa Perda Nomor 5 Tahun 1988 merupakan perubahan pertama terhadap Perda Nomor 6 Tahun 1972.

Untuk itu perlu diberikan penjelasan secara garis besar mengenai tarif retribusi dan pajak atas ijin penjualan minuman keras dari Perda-perda tersebut sebagai berikut :

1. Perda nomor 11 tahun 1994

Perda Nomor 11 Tahun 1994 sebagai

kebijakan untuk mengatur kembali pemasukkan dan pengedaran minuman keras di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, karena Perda sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan sekarang.

Dalam Perda Nomor 11 Tahun 1994 tersebut sudah diatur tarif retribusinya dengan rincian sebagai berikut :

a. Untuk minuman keras golongan A Rp. 300,-- /
karton atau peti ;

b. Untuk minuman keras golongan B Rp. 200,-- /
karton atau peti ;

c. Untuk minuman keras golongan C Rp. 4.500,-- /
karton atau peti.

(Pasal 11 Perda Nomor 11 Tahun 1994).

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya tarif retribusi ini dianggap kurang memadai sehingga perlu diadakan perubahan/perbaikan.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri

tanggal 21 Desember 1995, Pemda mengadakan perbaikan/perubahan tarif retribusi tersebut

dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 161 Tahun 1996

khusus mengenai tarif retribusi pemasukkan minuman keras ke wilayah Propinsi Daerah Tingkat

I Irian Jaya ditetapkan sebagai berikut :

(a) Untuk minuman keras golongan A :

1. Sampai dengan 330 mlRp. 25,- per botol/kaleng.
2. Diatas 330 ml sampai-
dengan 1000 mlRp. 50,- per botol/kaleng.

(b) Untuk minuman keras golongan B :

1. Sampai dengan 1000 mlRp. 200,- per botol.
2. Diatas 1000 ml sampai-
dengan 2000 mlRp. 400,- per botol.

(c) Untuk minuman keras golongan C :

1. Sampai dengan 1000 mlRp. 300,- per botol.
2. Diatas 1000 ml sampai
dengan 2000 mlRp. 600 per botol.

Jadi di sini tarif retribusi memasukkan minuman keras tidak lagi dihitung per karton atau peti, tetapi dihitung per botol atau kaleng untuk masing-masing golongan.

Dengan demikian kepada instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, Biro Bina Perencanaan dan Biro Hukum Setwilda Tingkat I

Irian Jaya dalam penerbitan ijin dan penarikan tarif retribusi memasukkan minuman keras ke wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya wajib melaksanakan ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 161 Tahun 1996 tersebut di atas.

Untuk sementara apabila dihitung tarif retribusi yang masuk ke kas Daerah Tingkat I Irian untuk tahun 1996 sebesar Rp. 62.017.200,--.

Ini dihitung berdasarkan data minuman keras golongan A yang masuk di Kodia Jayapura selama tahun 1996, yaitu 2.480.688 botol/kaleng dikalikan Rp. 25,-

Mengenai pembayaran retribusi ini para pengusaha pemasok minuman keras harus membayar retribusi lebih dulu ke kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, kemudian ijin diserahkan kepada pemegang ijin setelah ada bukti setor retribusi tersebut (Pasal 12 Perda Nomor 11 Tahun 1994). Ijin ini diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan. Keputusan Gubernur inilah yang menetapkan jumlah atau banyaknya minuman keras yang dimasukkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Mengenai perusahaan pemasok, jenis minuman keras golongan A, dan kuotanya sudah dijelaskan

Untuk ketahuan bahwa data yang dipaparkan dalam tulisan ini hanya minuman keras golongan A jenis bir dengan kadar ethanol 1-5%. Sedangkan minuman keras golongan B dan C tidak dapat dikemukakan dalam tesis ini karena data mengenai kuotanya tidak diberikan oleh Biro Hukum Setwilda Tingkat I Irian Jaya. Menurut Kepala Biro Hukum

dan terus minum.

beredar di bumi Irian Jaya ini kami tetap minum menegaskan selama minuman keras itu ada dan mudah diperoleh/dibeli di kios-kios. Dan mereka karena minuman keras itu ada di mana-mana dan responden 30 persen mengatakan bahwa mereka minum Menurut hasil wawancara dengan para

dibeli dan diminum di tempat itu juga.

di pinggiran jalan raya seperti pedagang asongan, pengamatan penulis di Kecamatan Abepura dijual tradisional. Minuman tradisional ini berdasarkan minuman keras golongan B dan C, serta minuman kelihatannya terlalu banyak ditambah lagi dengan minuman keras golongan A yang beredar jumlah yang ditetapkan dalam kuota. Sehingga perusahaan pemasok mendatangkan melebihi dari Jayapura, tetapi dalam praktek/kenyataannya sudah ditetapkan jumlah kuota untuk Kodia pada halaman yang lalu pada bagian B. Disitu

Setwilda Tingkat I bahwa hal atau masalah itu rahasia dan sulit diberikan karen menyangkut kepentingan orang banyak, yaitu kepentingan pihak-pihak yang ada di atas, termasuk yang ada di tingkat pusat, sehingga beliau tidak berani memberi data mengenai kuota minuman keras tersebut. (Wawancara dengan Karo Hukum Setwilda Tingkat I Irja, Jos Renyuan, S.H., tanggal 3 Maret 1997). Hal ini menurut penulis sangat disesalkan, tetapi di sisi lain bisa dimaklumi.

Memang masalah minuman keras di Irian Jaya merupakan masalah yang sangat kompleks, apalagi sudah menyangkut persaingan bisnis sehingga banyak cara yang digunakan untuk memasukkan minuman keras ini. Karena memang Irian Jaya memiliki prospek bagi pemasaran minuman keras cukup bagus.

Bagi pihak pemerintah daerah tidak ada masalah untuk memberikan ijin memasukkan minuman keras di Irian Jaya, karena pajak minuman keras mendatangkan income yang lebih besar. Untuk Daerah Tingkat I mendapatkan pajak atas ijin memasukkan, sedangkan untuk Daerah Tingkat II mendapatkan pajak atas ijin penjualan.

2. Perda Nomor 5 Tahun 1988

Penarikan pajak atas ijin penjualan minuman keras di Kotamadia Daerah Tingkat II Jayapura didasarkan atas Perda Nomor 5 Tahun 1988 tentang pajak atas minuman keras.

Data pajak atas ijin penjualan minuman keras yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kotamadia Jayapura sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1996 adalah sebesar Rp.120.459.062,- yang perinciannya sebagai berikut: pajak atas minuman keras untuk tahun 1991/1992 targetnya sebesar Rp.20.500.000,- realisasinya sebesar Rp.23.306.980,- (naik 113,69%), tahun 1992/1993 targetnya Rp.18.000.000,- realisasinya sebesar Rp.24.461.800,- (naik 135,89%), tahun 1993/1994 targetnya Rp.24.461.800,- (naik 135,89%), tahun 1993/1994 targetnya Rp.26.200.000,- realisasinya sebesar Rp.27.371.860,- (naik 104,47%), tahun 1994/1995 targetnya Rp.18.000.000,- realisasinya sebesar Rp.20.135.600,- (naik 111,86%), tahun 1995/1996 targetnya Rp.22.000.000,- realisasinya sebesar Rp.25.182.822,- (naik 114,46%). (Laporan Dispenda Kodis Jayapura, 1997).

Untuk lebih jelasnya, maka data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tetapi apabila dilihat dari perkembangan tahun. pemasukkan pajak atas izin penjualan minuman keras tiap tahun menunjukkan variabel naik turun dengan perkembangan rata-rata per tahun + 3,86%. Dalam tahun 1992/1993 naik Rp.1.154.820,- (+ 4,95%), tahun 1993/1994 naik Rp. 2.910.060,- (+ 11,89 %), tahun 1994/1995 tahun Rp.7.236.260,- (-26,43%), dan tahun 1995/1996 naik Rp.5.047.222,- (+ 25,06%). Pajak ini dihitung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Dengan melihat posisi data yang ada dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa pajak minuman keras tiap tahun melebihi target yang ditetapkan. Ini berarti suatu kenaikan dalam realisasinya setiap

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura, 1997.

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	1991/1992	Rp. 20.500.000,-	Rp. 23.306.980,-	113,69
2.	1992/1993	Rp. 18.000.000,-	Rp. 24.461.800,-	135,89
3.	1993/1994	Rp. 26.200.000,-	Rp. 27.371.860,-	104,47
4.	1994/1995	Rp. 18.000.000,-	Rp. 20.135.600,-	111,86
5.	1995/1996	Rp. 22.000.000,-	Rp. 25.182.822,-	114,46
Jumlah		Rp.104.700.000,-	Rp.120.459.062,-	115,05

TABEL 10
PAJAK ATAS IZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS
DI KOTAMADIA JAYAPURA
TAHUN 1991/1992 - 1995/1996

Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pajak Minuman Keras. Besarnya pajak yang dibayar dirinci sebagai berikut :

a. Untuk diminum di tempat lain :

1. Yang menjual minuman keras golongan A Rp.7.500,-/bulan

2. Yang menjual minuman keras golongan B Rp.10.000,-/bulan

3. Yang menjual minuman keras golongan C Rp.15.000,-/bulan

b. Untuk diminum di tempat penjualan :

1. Yang menjual minuman keras golongan A Rp.5.000,-/bulan

2. Yang menjual minuman keras golongan B Rp.7.500,-/bulan

3. Yang menjual minuman keras golongan C Rp.10.000,-/bulan.

(Pasal 14 Perda No.5 Tahun 1988).

Penentuan pajak minuman keras ini didasarkan pada motif ekonomi, yaitu untuk meningkatkan pendapatan daerah. Menurut penjelasan Samuel, S.H., dari Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jayapura mengatakan bahwa faktor utama mendatangkan/memasukkan minuman keras ke Irian Jaya adalah untuk menambah income daerah. Tetapi dari sisi lain beliau mengatakan sebaiknya pada waktu-waktu mendatang

pemasukkan minuman keras ke Irian Jaya perlu dikurangi, karena akibat yang timbul dari minuman keras terlalu banyak, mental dan moral masyarakat jadi rusak, banyak orang mabuk-mabukan di sembarang tempat, dan terjadi tindak pidana lainnya (Wawancara penulis dengan Semuel, S.H., Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura, tanggal 28 Februari 1997).

3. Perda Nomor 5 Tahun 1996

Dalam perkembangan selanjutnya penentuan besarnya pajak minuman keras sebagaimana yang disebutkan di atas kemudian mengalami perubahan lagi dengan dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 18 Januari 1996, tentang Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Yang Mengandung Alkohol. Perda Nomor 5 Tahun 1996 ini adalah merupakan perubahan kedua atas Perda Nomor 6 Tahun 1972. Perubahan ini pada intinya ditekankan pada peningkatan (menaikkan) tarif pajak penjualan minuman yang mengandung alkohol yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pajak atas ijin penjualan untuk diminum di tempat lain sebesar Rp. 85.000,-/bulan.
- b. Pajak atas ijin penjualan untuk diminum di tempat

penjualan sebesar Rp. 75.000,-/bulan.

(Pasal 14 Perda No. 5 Tahun 1996).

Perda ini juga menekankan kepada ketentuan lokasi penjualan, di mana lokasi penjualan minuman keras untuk diminum di tempat tidak boleh berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah dan rumah sakit dilarang menjual minuman yang mengandung alkohol kepada anak-anak di bawah umur 17 tahun. Dan pada surat ijin penjualan minuman yang mengandung alkohol untuk diminum di tempat penjualan dicantumkan jam penjualan minuman setiap harinya.

Dalam Perda yang baru ini (Perda No.5 Tahun 1996) besarnya tarif pajak ijin penjualan minuman keras sengaja dinaikkan atau lebih besar dari Perda yang lama (Perda No.5 Tahun 1988), dimaksudkan untuk bisa menekan atau setidaknya tidaknya mengurangi tindak kriminal akibat pengaruh alkohol yang terjadi di kota Jayapura. Karena menurut Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Kabupaten Jayapura, Lukas Mra-Mra, S.H., bahwa pada akhir-akhir ini (1996) banyak terjadi tindak pidana di Jayapura akibat penyalahgunaan minuman keras, bahkan sudah menjurus kebrutalisme, tentara dibunuh, desa dibakar yang mengakibatkan banyak korban jiwa, dan tindak pidana kekerasan lainnya. Sehingga Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura memerintahkan kepada Kepala Bagian Hukum untuk meninjau kembali atau memperbaiki Perda yang lama (Perda No.5 Tahun 1988), khusus mengenai tarif

penyalahgunaan minuman keras yang telah dijelaskan
Kembali kepada faktor-faktor penyebab

secara ilegal semakin ada saja.
tempat-tempat atau kios-kios penjual minuman keras
menjadi Rp.50.000,-. Inilah yang menyebabkan
yaitu dendanya yang dulu Rp.100.000,- diturunkan
dinaikkan, tetapi ancaman hukumannya diturunkan,
khususnya Perda Tingkat II pajak ijin penjualannya
retribusinya, maupun pajak ijin penjualannya.
Miras yang baru semakin naik pula tarif
dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin ada Perda
Dari Perda-Perda yang dikemukakan di atas

tidak pidana.
bahkan disalahgunakan untuk melakukan berbagai
masyarakat untuk mengkonsumsi secara bebas dan
yang beredar sehingga memberi peluang kepada
Yang jelasnya, semakin banyak minuman keras
saja perkembangannya.

Tetapi apakah teori ini bisa berhasil, kita tunggu
tanggal 26 Februari 1997).

Setiada Tingkat II Jayapura, Lukas Mra-Mra, S.H.,
berkurang. (Wawancara penulis dengan Kabag Hukum
naik (mahal) akibatnya daya masyarakat peminum akan
tinggi (besar) berarti harga jual di pasaranpun akan
Dengan dasar pemikiran bahwa dengan pajak yang
pajak ijin penjualan minuman keras supaya dinaikkan.

di atas, maka untuk menentukan prosentasenya masing-masing faktor dapat diikuti pendapat/penjelasan yang dikemukakan Soerjono Soekanto. Dimana beliau mengatakan bahwa apabila pengumpulan data di lapangan telah selesai, maka peneliti harus meneliti kembali informasi/keterangan yang telah diterima itu, baik dari hasil wawancara maupun pengamatan kemudian memasukkan ke dalam kategori-kategori/klasifikasi yang relatif tepat, dan menghitung/ menentukan prosentasenya dengan menggunakan rumus :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Cara ini adalah sangat sederhana, dan diperlukan untuk analisis deskriptif, dengan tujuan mengungkapkan data tentang apa yang lazim (biasanya), apa yang unik dan bagaimana variasinya (Soerjono Soekanto, 1982 : 264-268).

Sesuai dengan spesifikasi penelitian tesis ini adalah deskriptif analisis maka untuk menentukan prosentase faktor-faktor penyebab penyalahgunaan minuman keras tersebut adalah sebagai berikut :

Faktor-faktor penyebab		
	f	%
Faktor Undang-Undang	5	10 %
Faktor Sosial Budaya (kebiasaan)	30	60 %
Faktor kebijakan Pemda	15	30 %
(Perda)		
Jumlah	50	100 %
(N)		

Dengan melihat data tersebut dapat dianalisis bahwa dari ketiga faktor penyebab penyalahgunaan minuman keras, faktor sosial budaya (kebiasaan) lebih besar pengaruhnya dari faktor-faktor yang lainnya. Dengan perbandingan faktor sosial budaya (kebiasaan) 60 %, faktor Undang-Undang 10%, dan faktor kebijakan Pemda (Perda) 30 %. Kesimpulannya : faktor sosial budaya (kebiasaan) lebih dominan atau mempunyai pengaruh lebih besar untuk penyalahgunaan minuman keras di Kota Jayapura. Dengan peminum lebih banyak pemuda-pemuda tanggun yang berumur rata-rata 20-35 tahun, dan tidak mempunyai pekerjaan tetap (lebih banyak penganggur). Keputusan : Pemerintah tidak boleh lepas tangan atau membiarkan masalah mabuk-mabuk ini semakin merajalela, karena nantinya bisa tercipta suatu generasi yang pemalas dan tidak berkreasi. Oleh karena itu minuman keras perlu dibatasi pemasukannya dan dijual di tempat-tempat tertentu saja. Dan terhadap pemuda-pemuda peminum ini disalurkan keperusahaan-perusahaan yang ada di Irian Jaya, baik di bidang pertambangan, perkebunan kelapa sawit perusahaan kayu (triplek), dan perusahaan-perusahaan lainnya. Selain itu perlu dibina kerohanianya melalui lembaga-lembaga keagamaan yang ada, juga peranan Kepala Suku dapat dilibatkan dalam pembinaan ini. Pembangunan di

Irian Jaya porsi nya lebih banyak diarahkan ke pembangunan mental, moral (non fisik).

Dalam masalah sosial budaya yang penulis maksudkan di sini adalah kebiasaan minum-minuman keras yang dibawa terus dari waktu lalu (dulu) sampai sekarang, sehingga generasi muda (pemuda) ini tinggal meniru apa yang sudah ada. Sekarang ini orang minum minuman keras sebagai pergaulan, menimbulkan keberanian (sok jagoan), rasa solidaritas, kesenangan, merasa bangga, dan minum untuk balas dendam (cari gara-gara/masalah).

D. Kebijakan Penanggulangan

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan yang terjadi akibat pengaruh penyalahgunaan alkohol dapat digunakan sarana penal dan nonpenal. Penggunaan sarana penal dan nonpenal merupakan bagian penting dari politik kriminal (criminal policy). Politik kriminal ialah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan (Sudarto, 1986 : 150). Definisi ini menurut Barda Nawawi Arief diambil dari Marc Ancel, "the rational organization of the control of crime by society". Upaya ini pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Jadi dapat dikatakan adanya

keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial; dan juga ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan nonpenal (Nawawi Arief, 1996 : 4).

Penanggulangan tindak pidana/kejahatan lewat jalur penal lebih dititikberatkan pada sifat represif, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat preventifnya.

1. Upaya penal/tindakan represif

Penggunaan sarana penal dalam menanggulangi tindak pidana/kejahatan tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (criminal law policy/penal policy). Jadi penal policy berarti kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Oleh karena itu hukum (UU) pidana harus dibuat dan dirumuskan secara baik dan dilaksanakan dengan konsekwen.

Sudarto menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Pada kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Demikian pula sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana (Nawawi Arief, 1996 : 27-29). Pemikiran tentang penegakan hukum pidana

tidak boleh dilupakan dalam lingkup usaha menanggulangi kejahatan secara menyeluruh, oleh karena itu di samping menggunakan hukum pidana diperlukan sarana lain dari tatanan sosial dan kekuatan sosial untuk melindungi masyarakat yang dilindungi oleh perilaku kejahatan (Bambang Poernomo, 1988 : 57).

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa penegakan hukum pidana dapat diartikan secara luas, bukan saja tindakan represif sesudah terjadi kejahatan, tetapi juga meliputi tindakan preventif sebagai usaha menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan dan menangkai kejahatan tetap pada garis batas yang terendah. Pelaksanaan untuk penegakan hukum pidana secara tidak langsung menjadi kewajiban semua orang yang berkepentingan, dan secara langsung menjadi tugas Polri dan petugas hukum lainnya dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana (Bambang Poernomo, 1988 : 60).

Pendapat lain menyatakan bahwa kebijakan pidana atau kebijakan penal (penal policy), mencakup

baik pengetahuan maupun seni yang terutama berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan praktis, yang memungkinkan peraturan-peraturan positif dirumuskan lebih baik dan sekaligus memberi pedoman bagi pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang tersebut, dan juga bagi aparat koreksi yang secara konkrit menjadikan putusan pengadilan tersebut mempunyai efek praktis (Muladi, 1995 : 131).

Jadi kebijakan penegakan hukum pidana diwujudkan dengan pemberian sanksi pidana. Atau sanksi pidana itu dijadikan sebagai sarana dalam penanggulangan tindak pidana/kejahatan (Sudarto, 1986 : 150).

Oleh karena itu, dalam konteks permasalahan tindak pidana akibat pengaruh alkohol, maka penggunaan sarana penal dapat dijumpai dalam pasal-pasal di KUHP yang mengatur tentang masalah pemabukan. Setelah terjadi tindak pidana pemabukan aparat hukum segera memproses sesuai ketentuan (pasal) dalam KUHP dan disesuaikan dengan tingkat perbuatannya. Hakim pun harus menerapkan sanksi pidana secara tegas terhadap pelaku tindak pidana pemabukan.

Sarana penal berlaku juga terhadap penjual minuman keras tanpa izin dan pengusaha yang mendatangkan/memasukkan minuman keras secara ilegal.

Terhadap mereka-mereka ini perlu ditindak tegas.

Berdasarkan data tabel yang lalu tergambar bahwa aparat penegak hukum (polisi) di Jayapura sudah bekerja keras untuk memproses dan mengajukan perkara-perkara pemabukan ini sampai ke pengadilan untuk disidangkan dan memperoleh/mendapat hukuman. Hanya saja hukuman atau sanksi pidana ini sering terlaui ringan sehingga membuat orang tidak jera dan kelihatannya masalah mabuk-mabukan ini

tetap saja ada.

Terhadap pengusaha yang memasukkan minuman keras secara ilegal hanya dikenakan sanksi pidana berdasarkan Perda yang ada. Misalnya ada seorang pengusaha (Edy Gosai) telah memasukkan minuman keras ke Jayapura sebanyak 87 peti wisky drum, 50 karton wisky drum Colimbus, 31 karton Hensen House, dan 1 peti Jenever lalu menjualnya tanpa ijin. Kemudian polisi merasa dan menyita minuman keras tersebut, dan terhadap pelakunya diajukan ke pengadilan. Putusan pengadilan hanya dikenakan hukuman denda Rp.50.000,--. Hukuman yang demikian ini menurut penulis terlaui ringan sehingga sulit untuk memberantas masalah pemabukan secara tuntas.

Dalam tindakan represif polisilah merupakan petugas hukum yang pertama-tama menanggapi tindak pidana yang terjadi (termasuk tindak pidana

pembunuhan). Oleh karena itu polisi dituntut ketelitian, kesabaran dan profesionalisme. Tindakan represif meliputi rangkaian kegiatan pemindahan yang ditujukan ke arah pengungkapan terhadap kasus kejahatan atau tindak pidana yang telah terjadi. Bentuk kegiatannya meliputi penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya yang sah menurut undang-undang (Gregorius Aryadi, 1995 : 56).

Terhadap penjahat maupun pembuk yang agresif maka polisi ialah yang berdiri paling depan untuk menghadapinya serta tidak tanggung-tanggung bertindak demi kepentingan masyarakat. Karena polisi selain sebagai alat negara penegak hukum, juga mempunyai tugas melindungi masyarakat.

Tugas polisi Republik Indonesia (POLRI) pada umumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961, Pasal 2, yang antara lain berbunyi :
(1) a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.

c. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam.

d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.

Sebagai penyelidik, maka polisi berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Sedangkan sebagai penyelidik dapat dilakukan tindakan berupa: penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, larangan meninggalkan tempat, pemeriksaan dan penyitaan, pemeriksaan tempat, pemeriksa dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan menghadapkan seorang pada penyelidik dan

(Prodjohamidjojo, 1985 : 9).

Indonesia adalah penyelidik dan penyelidik bahwa setiap pejabat polisi negara Republik pertegas lagi dalam KUHAP (UU NO. 8 Tahun 1981), Tugas polisi dalam bidang penyelidikan ini diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

(4) Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang di-membahayakan masyarakat dan Negara.

(3) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.

(2) Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum rakat terhadap peraturan-peraturan negara.

e. Mengusahakan ketertarikan warga negara dan masya-

lain-lain yang kesemuanya bertujuan untuk memperjelas persoalan.

Khusus mengenai pencegahan dan memberantas masalah tindak pidana pemabukan adalah pertama-tama merupakan tanggungjawab polisi (Pasal 2 ayat 1 b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961), di samping instansi-instansi lain juga turut berperan terhadap masalah ini. Polisi di Jayapura dalam patrolinya setiap saat setelah menemukan orang mabuk yang mengganggu di jalan raya atau membuat onar/kekacauan di tengah-tengah masyarakat maka terhadap pemabuk itu ditangkap dan dibawa ke pos polisi untuk ditahan sementara sampai mabuknya hilang lalu diperiksa. Bila tidak memenuhi unsur-unsur diserahkan ke bagian Bimas untuk dinasehati lalu disuruh pulang. Bagi yang memenuhi unsur-unsur tetap diproses untuk diajukan ke pengadilan melalui kejaksaan.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 b UU Nomor 13 Tahun 1961 disebutkan mencegah dan memberantas masalah mabuk-mabukan. Jadi masalah pemabukan dimasukkan dalam penyakit-penyakit masyarakat, seperti halnya dengan gelandangan, pengemis, dan lain-lain. Sebaliknya ketentuan pasal ini perlu ditinjau kembali, dan masalah pemabukan jangan dimasukkan dalam penyakit-penyakit masyarakat, tetapi dinyatakan (dikriminalisasikan) sebagai tindak

pidana biasa, karena mabuk pada jamian sekarang lebih kompleks dan semakin berkembang yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang cukup serius. Dan bila perlu dijadikan sebagai alasan pemberat hukuman. Seperti halnya di negeri Belanda, bahwa seorang melakukan perbuatan di bawah pengaruh alkohol atau bahan lain yang mengakibatkan matinya orang lain, atau di bawah pengaruh alkohol menyebabkan kecelakaan di jalan raya, merupakan keadaan yang memberatkan pidana (D. Schaftmeister, N. Keijzer dan P.H. Sutorius, 1995 : 116). Selanjutnya dikatakan bahwa terjadinya perbuatan pidana karena gangguan kesadaran yang disebabkan oleh minuman alkohol pelakunya tetap dapat dipidana. Barangsiapa yang menggunakan alkohol harus dapat mengira bahwa dia bisa terjerumus dalam keadaan (untuk) melakukan perbuatan pidana, makanya dia harus bertanggungjawab atas akibatnya. Jadi tidak ada alasan pemaaf. Demikian juga terhadap kegonggongan jiwa yang hebat tidak disebabkan oleh serangan, tetapi karena pengaruh alkohol, maka pembelaan terpaksa melampaui batas tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk tidak dipidana. Jadi tidak ada alasan pembeda (D. Schaftmeister, N. Keijzer dan P.H. Sutorius, 1995 : 63, 69).

2. Upaya Nonpenal/tindakan preventif

Penggunaan sarana nonpenal atau disebut juga tindakan preventif menitikberatkan pada tindakan sebelum tindak pidana terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan/tindak pidana lewat jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan (Nawati Arief, 1996:49).

Usaha pencegahan tindak kriminal termasuk tindak pidana pemabukan yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan yang positif. Sehubungan dengan itu, maka kita harus mengubah lingkungan dengan mengurangi hal-hal yang mendukung perbuatan kriminal. Terutama dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendesain suatu lingkungan dimana orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku menyimpang (Widiyanti dan Waskito, 1987 : 155).

Melang tindakan pencegahan (preventif) lebih baik dilakukan daripada tindakan represif. Karena tidak memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokratis, dan juga lebih ekonomis bila

dibandingkan dengan tindakan represif.

Seorang ahli moral berkebangsaan Inggris J. Benthan menyatakan bahwa mencegah kejahatan lebih utama daripada menghukumnya. Beliau menyebutkan beberapa tindakan yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan itu. Umpamanya : minuman keras yang dianggap salah satu sebab utama dari kejahatan agresif, harus dibentras dengan macam-macam jalan, seperti menyebarkan rakyat agar gemar olah raga, musik, sandiwara, dan lain-lain (Bonger, 1982 : 52). Di Australia kaum wanita Oborigin membentuk group-group musik untuk mencegah kaum laki-laki kecanduan alkohol. Kaum wanita ini mengadakan pertemuan-pertemuan untuk menangani masalah alkohol dan bahayanya. Badan yang menyelenggarakan ini disebut "The counsil for Aboriginal Alcohol Program Service" (Fakta, tanggal 1 Desember 1991). Menang di Australia masalah alkohol menjadi problem besar di negara itu. Ada istilah tiada hari tanpa alkohol, sehingga orang dalam kehidupannya setiap hari minum alkohol. Dan banyak kaum laki-laki oborigin yang terjerumus dalam minuman keras/ alkohol. Seorang isteri akan masuk ke dalam malam suaminya pulang dalam keadaan mabuk. Bagaimana di Irian Jaya .

Di Irian Jaya, dan khususnya Jayapura masalah

pemabukan tidak ada habis-habisnya, sehingga pihak keamanan (Polda Irian Jaya) menganggap masalah ini sebagai hal yang perlu ditangani secara serius. Apalagi dengan munculnya berbagai tindak pidana yang disebabkan karena minuman keras, maka Polda Irian Jaya melakukan beberapa tindakan/upaya berupa :

(1) Operasi "kewilayahan" yang dimulai tanggal 1 April 1997, dengan tujuan penertiban para penjual, pengusaha, dan pemakai minuman keras.

(2) Polda Irian Jaya memerintahkan para Kapolres se Irian Jaya agar tidak memberikan rekomendasi minuman keras untuk jangka waktu menjelang Pemilu 1997 sampai dengan Sidang Umum MPR 1998 bagi semua golongan minuman keras, berdasarkan Surat Kapolda Irian Jaya Nomor : B/212/II/1997 - Dit Serse. B tertanggal 20 Februari 1997.

(3) Kapolda Irian Jaya dengan Surat Nomor : B/162/II/ 1997/Dit Serse B tanggal 3 Februari 1997 meminta kepada Gubernur Irian Jaya untuk tidak mengizinkan memasukkan minuman keras baik golongan A, B dan C demi terciptanya kondisi Kamtibmas yang kondusif dalam rangka terselenggaranya Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998.

(4) Operasi "Terpadu Ketupat Kasuari 97" yang dilaksanakan berdasarkan hasil rapat koordinasi

Lintas Sektoral tentang Minuman Keras, yang berlangsung di Polda Irian Jaya pada tanggal 29 Januari 1997, yang isinya antara lain :

a. penindakan secara terpadu bagi pemasok, penyalur, dan penjual minuman keras yang tidak memiliki ijin.

b. Semua pihak berkeinginan untuk mempersulit perijinan minuman keras dengan maksud mengurangi peredaran minuman keras secara bertahap.

c. Pemegang ijin diwajibkan memberikan Daftar Penjualan kepada instansi terkait.

d. Minuman keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan dianggap ilegal dan termasuk dalam sasaran operasi.

(Untuk lebih jelasnya mengenai hasil kesepakatan rapat koordinasi tersebut dapat dilihat pada lampiran tesis ini).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kapolda Irian Jaya, Kapuskodalops Polda Irian Jaya, para Kadit Opsnal Polda Irian Jaya, Aster Kasdam VIII/Trikora, Karo Hukum Setwilda Tingkat I Irian Jaya, Karo Perekda Setwilda Tingkat I Irian Jaya, Kepala Kakanwil Deperindag Propinsi Irian Jaya, Kepala Balai Pom Irian Jaya, Bupati KDH Tingkat II Jayapura, Walikotamadia Jayapura, Kapondam III/Trikora, Dandim

1701 Jayapura, dan Kapolres Jayapura.

Di pihak Pemerintah Daerah Tingkat I Irian

Jaya pun mengadakan tindakan preventif antara lain :

(a) Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian

Jaya Nomor 3/Inst/617/1977 tanggal 21 April 1997

tentang Penerbitan Tempat-tempat Penjualan dan

Pedaran Minuman Keras di Propinsi Irian Jaya.

(b) Pelaksanaan Pengendalian minuman keras Pemda

Tingkat I Irian Jaya tetap mewaspada ke-

lebihan kuota minuman keras yang masuk ke Irian

Jaya yang tidak sesuai dengan kuota yang

ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, dan

juga melakukan pengendalian minuman keras

berdasarkan prosedur tetap Bakortanasda Maluku

Irian Jaya tanggal 6 Januari 1994 (Risalah Rapat

Paripurna DPRD Tingkat I Irian Jaya, Masa Sidang

1 Tahun 1994/1995).

(c) Pemda Tingkat II Kotamadia Jayapura juga

mengeluarkan instruksi dalam rangka Pemilu 1997

untuk menghentikan sementara peredaran dan

penjualan minuman keras di wilayah Kotamadia

Jayapura. Instruksi Walikota Kotamadia Jayapura

tersebut dengan nomor 1 tahun 1997, tanggal 7

Mei 1997 tentang penghentian sementara penjualan

dan peredaran minuman keras hanya ditujukan

kepada pedagang leveransir minuman keras dan

pedagang pengecer minuman keras, tidak berlaku bagi tempat hiburan tertentu, yaitu hotel berbintang, restoran, bar dan diskotik. Kebijakan ini sebenarnya kurang begitu baik (tidak adil), karena kalau dilarang yah sebaiknya dilarang semuanya, biar semua orang tidak minum minuman keras. Ini malahan lebih baik karena secara tidak langsung sudah melatih masyarakat untuk mengurangi kebiasaan minum minuman keras.

Dari apa yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa operasi pengendalian minuman keras baik yang dilakukan oleh kepolisian maupun yang dilakukan secara terpadu harus dilaksanakan dengan konsekwen dan berkesinambungan, jangan bersifat situasional. Khusus operasi terpadu Ketupat Kasuari 97 jangan hanya ditujukan kepada pengusaha pemasok, penjual dan penjual minuman keras saja, tetapi juga kepada para pemakai minuman keras (orang yang mabuk-mabukkan).

Dengan demikian beberapa upaya atau tindakan preventif (nonpenal) yang perlu dilakukan adalah :

a. Mengadakan pembatasan pemasukan minuman keras di wilayah Propinsi Irian Jaya, khususnya di Jayapura.

b. Penerbitan terhadap tempat-tempat penjualan minuman keras (kios, warung) dan tempat lain yang dianggap rawan minuman keras, termasuk tempat penjualan minuman tradisional.

c. Minuman keras hanya dijual di tempat-tempat tertentu seperti bar, restoran dan hotel dengan harga yang mahal.

d. Kegiatan patroli polisi dilakukan secara kontinyu dan di tempat-tempat rawan minuman keras.

e. Melarang menjual minuman keras pada waktu hari raya Natal dan Tahun Baru yaitu satu bulan sebelumnya dan satu bulan sesudah hari raya.

f. Terhadap para pemabuk perlu diadakan pembinaan atau penyuluhan keagamaan, serta dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti vokal group, kemah kerja dan lain-lain.

Dalam pembinaan ini dilibatkan para tokoh/pemuka agama untuk menyadarkan para pemabuk ini melalui khotbah-khotbah bahwa mabuk melanggar norma moral dan merupakan dosa, serta tidak punya tempat di Kerajaan Surga.

Di Amerika Serikat misalnya, pada jaman sekarang ini alkoholisme merupakan persoalan terbesar dalam pelayanan pastoral gereja. Para pendeta menyepakati bersama prinsip-prinsip pendekatan terhadap alkoholisme sebagai persoalan yang

menyangkut pelayanan pastoral (I.J. Cairns, 1982: 60-61).

g. Penyuluhan kepada masyarakat umum bahwa alkohol itu berbahaya, merusak kesehatan, dilarang agama, dan dari segi ekonomi keluarga merugikan, serta banyak menimbulkan gangguan kamtibmas. Kegiatan ini disertai dengan pemutaran film (video) tentang keadaan orang mabuk dengan tingkah laku yang menjijikkan.

Film (video) ini dapat juga dipertontonkan kepada para peoabuk agar dapat menimbulkan rasa iba dan malu terhadap diri sendiri (Soedjono Dirdjo-sisworo, 1984 : 8).

3. Penanggulangan Secara Nasional

Selain tindakan-tindakan yang dilakukan di tingkat daerah, perlu juga dilakukan di tingkat pusat. Dalam arti pemerintah pusat harus membatasi dan mengawasi produksi minuman keras baik kuantitas maupun kualitasnya.

Kebijakan pemerintah dalam menangani minuman keras terutama ditujukan kepada produsen minuman keras. Terhadap pabrik yang berijin harus diadakan pengawasan produksinya. Sebab bisa saja jumlah produksi yang dilaporkan kepada pemerintah tidak sesuai jumlah nyata yang diluncurkan di pasaran. Dan

apabila ketahuan maka produesennya harus ditindak tegas, bila perlu pabriknya ditutup.

Kenyataannya, tindakan penertiban yang dilakukan selama ini hanya ditujukan pada sektor hilir, tidak dimbangi dengan tindakan pada sektor hulu. Artinya, hanya peminum dan para penjual minuman keras (berijin atau tidak) yang disikat habis, sementara produsen minuman keras tidak tersentuh tindakan aparat. Tindakan tegas terhadap sektor hilir, tanpa menutup sektor hulu, tidak akan menyentuh akar masalahnya. Ribuan botol minuman keras dikikis habis, tetapi dalam waktu bersamaan ribuan botol minuman keras dihasilkan pabrik.

Menurut data Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Indonesia saat ini (1987) terdapat 116 produsen minuman keras dengan produksi 225 juta liter minuman keras per tahun. Dengan rincian kadar alkohol di atas 5 % sebanyak 85 juta liter per tahun, sedangkan kadar alkoholnya 1 - 5 % sebanyak 140 juta liter per tahun. Di samping itu tiap tahun Indonesia mengimpor 800.000 liter minuman keras yang kadar alkohol di atas 5 %, dan 5 juta liter minuman keras yang kadar alkoholnya di bawah 5 % (Gatra, 22 Februari 1987). Apabila ditotal secara keseluruhan, maka minuman keras golongan A, B dan C yang beredar di Indonesia setiap tahun sebanyak

230.800.000 liter.

Dengan begitu banyaknya minuman keras yang beredar, maka sebaiknya pemerintah membatasi produksi dan impor minuman keras. Terhadap pabrik minuman keras yang tidak berijin ditutup dan pemiliknya ditinggal tegas. Pokoknya, tindakan tegas diterapkan pada semua lini, sehingga diharapkan dapat berhasil guna.

Untuk menindak penyalahgunaan minuman keras harus dilakukan secara menyeluruh, karena masalah ini saling terkait antara produsen (pembuat) - penjual - pemasok - produsen.

BAB V

P E N U T U P

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu maka akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana kekerasan yang terjadi di Kotamadya Jayapura lebih banyak disebabkan oleh pengaruh alkohol/minuman keras. Selama lima tahun terakhir (1992-1996) telah terjadi 416 kasus, dimana tindak pidana penganiayaan menempati urutan pertama dengan 164 kasus (39,42%), pencurian 161 kasus (38,70%), zina/cabul/susila 45 kasus (10,82%), pengrusakan 30 kasus (7,21%), perkosaan 15 kasus (3,61%), dan pembunuhan 1 kasus (0,24%).

2. Dari tiga lokasi penelitian, Kecamatan Jayapura Selatan rawan pemabukan, artinya di Kecamatan Jayapura Selatan lebih banyak terjadi tindak pidana kekerasan akibat pengaruh minuman keras dibandingkan dengan kedua kecamatan lainnya. Dengan perbandingan Kecamatan Jayapura Selatan 68,03% (283 kasus), Kecamatan Abepura 16,35% (68 kasus), dan Kecamatan Jayapura Utara 15,62% (65 kasus). Tingkat kerawanan

4. Peranan aparat penegak hukum dalam menanggulangi masalah pemabukan belum optimal. Karena sekalipun diadakan penindakan terhadap para pemabuk (tindakan represif) maupun merazia minuman keras (tindakan preventif) tetapi kelihatannya masih ada saja orang yang mabuk. Polda Irian Jaya melakukan operasi "Kewilayahan" dan operasi "Ketupat Kasuari 97" yang pemabukan penempati urutan pertama.

(1996). Dari delapan jenis tindak pidana ringan, + 120,94% dihitung dari lima tahun terakhir (1992- (687 kasus), dengan rata-rata perkembangan per tahun (dikategorikan dalam tindak pidana ringan) 58,61% Sedangkan mabuk yang menganggu ketertiban umum memepati urutan ketiga.

3. Penyalahgunaan minuman keras selain mengakibatkan terjadinya tindak kriminal (tindak pidana kekerasan), juga menganggu ketertiban umum. Data menunjukkan bahwa tindak pidana yang terjadi di kota Jayapura 16,37% disebabkan oleh mabuk karena minuman keras, dengan perkembangan rata-rata per tahun + 9,73%. Dari 27 jenis tindak pidana yang terjadi di Jayapura, tindak pidana akibat minuman keras memepati urutan ketiga. (1992-1996).

Kecamatan Jayapura Selatan 4,16 kali dari Kecamatan Jayapura, dan 4,35 kali dari Kecamatan Jayapura Utara. Data ini dihitung dari lima tahun terakhir

dilaksanakan secara terpadu antar instansi terkait dalam rangka mengendalikan peredaran minuman keras maupun penindakan terhadap pemasok, penjual dan pemakai yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah Irian Jaya (Gubernur) pun mengeluarkan instruksi penertiban tempat-tempat penjualan dan peredaran minuman keras di Propinsi Irian Jaya. Hanya saja operasi-operasi maupun instruksi tersebut dalam rangka pengamanan Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998. Jadi sifatnya situasional (sementara), artinya ada situasi atau keadaan tertentu baru diadakan operasi dan penindakan. Ini namanya tidak menyelesaikan masalah secara tuntas.

5. Tindakan pengawasan terhadap pemasukan dan peredaran minuman keras sangat penting, karena apabila pengawasan dilakukan secara baik, kontinyu dan terarah, berarti merupakan langkah awal keberhasilan untuk menekan para pemakai minuman keras secara berlebihan sekaligus tidak memberi peluang untuk terjadinya tindak pidana.

6. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan minuman keras/alkohol yang paling dominan adalah faktor sosial budaya, kemudian faktor kebijakan Pemda (Perda), dan faktor Undang-undang. Faktor sosial budaya (kebiasaan) sangat berpengaruh karena

kebiasaan minum ini terbawa dari dulu sampai sekarang. Hanya saja sekarang motivasinya sudah berbeda/berubah, orang minum sekarang sok jagoan dan merasa bangga kalau minum. Bagi yang sudah kecanduan minuman keras bagaikan sang kekasih yang sulit dilupakan begitu saja. Pola pikir seperti inilah yang perlu dihilangkan atau dirubah. Sedangkan faktor kebiasaan Pemda (Tingkat I) dimaksudkan membuat Pemda tentang pemasukkan minuman keras. Dengan adanya Pemda ini sehingga pengusaha pemasok mendapatkan/memasukkan minuman keras terlalu banyak bahkan melebihi dari kuota yang ditetapkan. Akibatnya banyak minuman keras yang beredar dalam masyarakat, kios-kios kecilpun menjual minuman keras. Dengan banyaknya minuman keras yang beredar sehingga memberi peluang kepada masyarakat untuk mengkonsumsi secara bebas dan bahkan disalahgunakan untuk melakukan berbagai tindak pidana. Minuman keras memang berpotensi timbulnya kriminalitas. Disamping itu faktor undang-undang juga turut berperan dalam penyalahgunaan minuman keras. Karena sanksi pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP yang mengatur tentang pemabukan terlalu ringan. Sehingga membuat orang tidak jera, bahkan para pemabuk ini berulang kali berurusan/ditahan polisi, dan masuk penjara.

7. Untuk menghilangkan kebiasaan minum minuman keras di

Irian Jaya, dan khususnya di Jayapura tidak

segampang yang dibayangkan karena sangat kompleks.

Oleh karena itu perlu beberapa alternatif pencegahan

dan penanggulangan yang positif, demi tercapainya

pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan

mental. Dikawatirkan, bila masalah ini tidak cepat

ditannggulangl tidak menutup kemungkinan Irian Jaya,

khususnya Jayapura akan rawan tindak kriminal,

bahkan berbagai kejadian yang lebih parah dan runyam

tentu menyusulnya. Minuman keras ini lebih

digandrungi kaum muda (pemuda-pemuda tanggung) yang

berusia 20-35 tahun.

8. Pemakaian minuman keras/alcohol secara berlebihan

dan tidak terkendali akan menimbulkan berbagai

masalah, baik bagi diri sendiri, maupun orang lain

atau lingkungan masyarakat sekitarnya. Penyalahgunaan

alcohol (alcohol abuse) merupakan penyebab atau

paling sedikit sebagai faktor pencetus terjadinya

tindak kriminal. Data yang ada menunjukkan adanya

hubungan antara minuman keras dan tindak pidana.

Dalam arti bahwa penyalahgunaan minuman keras

dapat menimbulkan tindak pidana kekerasan, antara

lain penganiayaan, pencurian, zina/cabul/susila,

pengrusakan, perkosaan dan pembunuhan.

9. Tindak pidana kekerasan yang dimaksud dalam tesis ini adalah perbuatan dengan sengaja yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh seseorang atau sekelompok orang dimana mereka berada dalam keadaan mabuk atau karena pengaruh alkohol. Pelaku biasanya menggunakan kekuatan fisik, misalnya memukul dengan tangan, menendang, menggunakan benda tajam, dan benda-benda keras lainnya.

10. Secara nasional pemerintah Indonesia menganggap masalah pemabukan belum begitu meresahkan dan membahayakan, seperti apa yang dialami oleh negara-negara lain. Tetapi sebaiknya kita bersiap-siap sebelum datangnya bahaya besar sebagai akibat alkoholisme yang sedang membangun di segala bidang, dan telah berada pada tahap persiapan lepas landas, maka segala faktor yang dapat memperlemah daya tahan manusia Indonesia dalam pembangunan, seperti alkoholisme, narkotik dan ekstasi harus ditanngulangi secara serius dan konsepsional.

11. Penyalahgunaan minuman keras atau disebut juga masalah pemabukan kurang mendapat pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahkan pasal-pasal yang mengatur tentang masalah tersebut tidak begitu jelas dan sanksinya pun terlalu

ringan. Padahal kalau kita mengamati atau melihat kejadian-kejadian yang terjadi akibat pemabukan membawa kerugian yang tidak sedikit. Singkatnya, segi negatifnya lebih banyak daripada segi positifnya.

B. S a r a n

1. Perlu dibatasi atau dikurangi kuota minuman keras semua golongan (A, B, dan C) untuk masuk ke Irian Jaya pada umumnya, dan Jayapura khususnya. Dijual di tempat-tempat tertentu, seperti bar, diskotik, hotel dengan harga yang mahal.

2. Di Kotamadya Jayapura pada umumnya, dan Kecamatan Jayapura Selatan khususnya perlu diadakan pengawasan dan penerbitan terhadap para pedagang dan penjual minuman keras, termasuk jam-jam penjualannya, operasi keamanan lebih ditingkatkan, serta penambahan petugas patroli. Penindakan tegas terhadap para pemakai minuman keras yang menyalahgunakannya.

3. Terhadap para pemabuk perlu pembinaan di bidang keagamaan, dan harus dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti vokal group, kemah kerja, dan lain-lain.

4. Penyuluhan kepada masyarakat umum bahwa alkohol/minuman keras itu berbahaya, merusak kesehatan,

dilarang agama, dan dari segi ekonomi keluarga merugikan, serta banyak menimbulkan gangguan kamtibmas.

5. Terhadap pemuda yang suka mabuk supaya disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Irian Jaya, baik di bidang pertambangan, perkebunan kelapa sawit, kapal-kapal penangkap ikan/udang, dan perusahaan-perusahaan lainnya sebagai tenaga kasar.

6. Pemerintah sebaiknya membatasi produksi dan impor minuman keras, dan tidak memberikan ijin baru kepada perusahaan (produsen) yang mau mendirikan pabrik baru. Pabrik minuman keras yang tidak berjijin, dan yang memproduksi melebihi dari jumlah yang ditetapkan pemerintah supaya diberikan dan ditindak tegas. Pokoknya tindakan tegas harus diterapkan pada semua lini sehingga diharapkan dapat berhasil guna.

7. Perlu adanya undang-undang tentang minuman keras, atau setidaknya-tidaknya Keppres yang baru tentang minuman keras (Nomor 3 Tahun 1997) dittingkatkan menjadi undang-undang, selain itu pasal-pasal dalam KUHP tentang pemabukan supaya direvisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Artief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : PT Gatra Aditya Bakti, 1996.
- _____. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Semarang : CV Ananta, 1994
- Arjadi, Gregorius. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana. Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya, 1995.
- Bonger, W.A. Pengantar Tentang Kriminologi (Terjemahan R.A. Koesnoen), Cetakan keenam, Jakarta : PT Pembangunan dan Ghaila Indonesia, 1982.
- Bemmel, Van J.M. Hukum Pidana 1 - Hukum Pidana Material Bagian Umum (terjemahan Hasnan). Jakarta : Bina Cipta, 1984.
- Bawengan, Gerson W. Pengantar Psikologi Kriminal. Jakarta : Pradnya Paramita, 1977.
- Cairns, I.J. Alkoholisme. Jakarta : PT BPK Gunung Mulia, 1982.
- Dirdjosisworo, Soedjono. Alkoholisme. Paparan Hukum dan Kriminologi, Bandung : Remadja Karya CV, 1984.
- _____. Pathologi Sosial (Gelandangan, Narkotika, Alkoholisme, Pelacuran, Penyakit Jiwa, Kejahatan dan lain-lain). Cetakan kedua. Bandung : Penerbit Alumni, 1974.
- Laporan Rajak. Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jayapura, 1997.
- Flasay, Don A.L. "Dari Hollandia ke Jayapura". Cenderawasih Pos (Jayapura), 11 Maret 1997.
- Gosita, Arif. "Peranan Korban Dalam Interaksi Sosial Memengaruhi Terjadinya Kejahatan". Prisma (Jakarta) : LP3ES, 1982.
- Gie, The Liang - F. Soegeng Istanto. Pertumbuhan Pemerintahan Propinsi Irian Barat dan Kemungkinan-kemungkinan Perkembangan Otonomnya Di hari Kemudian. Jilid I, Yogyakarta : Seksi Penerbitan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada, 1968.

- Kartono, Kartini, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung: CV. Manda Maju, 1990.
- Kusumah, W. Mulyana, Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988.
- _____. Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Lamintang, P.A.F., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Bary, 1984.
- Moelyatno, Azas-azas Hukum Pidana, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1980.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kajian Pidana, Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Cetakan 1, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1985.
- M.H. Ra'uf, H. Shanora, Y. Siradjuddin, Penyalahgunaan Ecstasy, Miras Dan Bahaya AIDS di Kalangan Generasi Muda, Jakarta: BP. Dharmas Bhakti, 1997.
- M.O. Siagian, A.W. Jayapura, Dulu, Sekarang dan Esok, Jayapura: Departemen Penerangan RI Kantor Wilayah Propinsi Irian Jaya, 1978.
- Noach, W.M.E., Kriminologi Suatu Pengantar, Dilengkapi oleh Grat Van Den Heuvel, Diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1992.
- Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: PT Fresco Jakarta, 1979.
- Poernomo, Bambang, Kapita Selekta Hukum Pidana, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1988.
- Prodjohamidjojo, Martiman, Komentar Atas KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Roemantyo, R. Profile Kotamadya Jayapura, Jayapura: (tanpa penerbit), 1996.
- Rusdihardjo - Brigjen Pol. Narkotika, Alkoholik dan Kejahatan, Makalah Seminar Kriminologi VII, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.

Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, Masa Sidang 1. Jayapura : Sekretariat DPRD Tk. I Irian Jaya, 1994/1995.

Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor : Politeia, 1973.

_____. Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus. Bandung : PT. Karya Nusantara, 1984.

Sudarto, Hukum Pidana 1, Semarang : Badan Penyelidikan Bahan-bahan Kuliah FH-UNDIP, 1987.

_____. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung : Penerbit Alumni, 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan keempat, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.

Seminar Narkoba (Narkotika, Obat-obat Terlarang dan Alkohol). Surabaya : Tulang Elita, 1992.

Sidhi, Abdul Munim Idris dan Sutomo Slamet Iman Santoso. Ilmu Kedokteran Kehakiman. Cetakan Kedua. Jakarta : PT Gunung Agung, 1985.

Sahetapy, J.E. dan B. Mardjono Reksodiputro. Paradoks Dalam Kriminalologi. Jakarta : CV. Rajawali, 1982.

Seminar Minuman Keras dan Laku-laku Kriminal. Kerjasama Polda Irija - Uncen Jayapura, 1991.

Supranto, J. Pengantar Statistik Bidang Hukum. Cetakan Pertama. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 1995.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan Kedua. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1982.

Schaftmeister, D., N. Keijzen dan PH. Sutorius. Hukum Pidana (Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia - Belanda). Editor Penerjemahan J.E. Sahetapy. Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1985.

Tjondronegoro, Sudjarwo. Rendez-vous dengan Revolusi di Irian Barat. Jakarta : Idayu Press, 1977.

Weda, Made Dharma. Kriminalologi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Widiyanti, Nini dan Yulius Wasita. Kejahatan Dalam Masya-
rakat dan Pencegahannya. Jakarta : PT. Bina Aksara,
1987.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-kentu-
an Pokok Kepolisian Negara. Jakarta : CV. Pantjuran
Tjupuh, 1982.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1987
Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
Jakarta : Sekretariat Kabinet RI, 31 Januari 1987.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya,
Nomor 11 Tahun 1994, Tentang Tata Cara Pemasaan Minuman
Keras Antar Pulau ke Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I
Irian Jaya.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura, Nomor
5 Tahun 1988 tentang Pajak Minuman Keras.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura, Nomor
5 Tahun 1996 tentang Pajak Atas Izin Penjualan Minuman
Yang Mengandung Alkohol.

Gatra, 22 Februari 1997.

Gatra, 30 Maret 1996.

Forum Keadilan, 11 Mei 1995.

Fakta, 1 Desember 1991.

Cenderawasih Pos (Jayapura), 19 Maret 1997.

Cenderawasih Pos (Jayapura), 14 Mei 1997.

Cenderawasih Pos (Jayapura), 16 April 1997.

Cenderawasih Pos (Jayapura), 24 Maret 1997.

Suara Merdeka (Semarang), 29 Agustus 1997.

Suara Merdeka (Semarang), 7 Nopember 1996.

Jawa Pos (Surabaya), 21 Desember 1996.

Kompas (Jakarta), 6 April 1997.